

SIAPA MENIKMATI PERTUMBUHAN EKONOMI INDONESIA?

Oleh

Prof Ir Rudy C Tarumingkeng, PhD

www.rudycr.com/cv.pdf

Institut Bisnis dan Multimedia (IBM ASMI)

Pertumbuhan menjadi pembangunan ketika manfaat produktivitas, pendapatan, kesempatan, dan layanan publik meluas melampaui kelompok yang paling kuat secara ekonomi dan politik.

ARTIKEL ILMIAH 

SIAPA MENIKMATI PERTUMBUHAN EKONOMI INDONESIA?

Membaca distribusi manfaat pertumbuhan:
antara upah, aset, pekerjaan, peluang,
dan kesejahteraan rakyat.



Oleh:
Prof Ir Rudy C Tarumingkeng, PhD

 www.rudyc.com/cv.pdf



IBM-ASMI

(Institut Bisnis dan Multimedia)

1. SIAPA YANG MENIKMATI?



Pekerja



UMKM



Kelas
Menengah



Daerah



Pemilik
Modal

2. INDIKATOR KUNCI



Pertumbuhan



Ketimpangan



Upah



Pekerjaan



Kemiskinan

3. PERTANYAAN UTAMA

- ? Apakah manfaat pertumbuhan tersebar luas?
- ? Siapa paling diuntungkan?
- ? Siapa masih tertinggal?
- ? Bagaimana kebijakan memperluas kesejahteraan?

“

"Pertumbuhan ekonomi yang baik bukan hanya menambah angka, tetapi memperluas manfaat bagi sebanyak mungkin rakyat."

”



Abstrak

Artikel ini mengajukan pertanyaan ekonomi-politik yang mendasar: siapa yang menikmati pertumbuhan ekonomi Indonesia? Pertanyaan tersebut penting karena kenaikan Produk Domestik Bruto tidak otomatis identik dengan pemerataan pendapatan, peningkatan kualitas pekerjaan, perluasan kepemilikan aset, atau mobilitas sosial. Pada triwulan II-2026 ekonomi Indonesia tumbuh 5,29 persen secara tahunan, sementara kemiskinan Maret 2026 turun menjadi 8,07 persen. Namun Gini Ratio Maret 2026 tercatat 0,368, naik dibanding September 2025, dan 40 persen penduduk terbawah menerima 19,22 persen dari total pengeluaran. Pada Mei 2026 Tingkat Pengangguran Terbuka berada pada 4,65 persen dan rata-rata upah buruh Rp3,39 juta per bulan. Artikel ini menggunakan perspektif ekonomi politik, ekonomi kelembagaan, distribusi fungsional pendapatan, dan capability approach untuk menilai bagaimana pertumbuhan dialirkan melalui upah, laba, rente, pajak, transfer, aset, layanan publik, dan kesempatan ekonomi. Pembahasan mencakup pekerja formal dan informal, kelas menengah, UMKM, petani, perempuan, pemuda, wilayah, perusahaan besar, sektor keuangan, BUMN, hilirisasi, investasi asing, platform digital, AI, pajak, subsidi, perlindungan sosial, pendidikan, kesehatan, perumahan, dan kualitas lingkungan. Argumen utama artikel adalah bahwa pertumbuhan yang tinggi tetapi sempit secara distributif dapat menghasilkan kemajuan statistik tanpa transformasi sosial yang sepadan. Indonesia memerlukan pertumbuhan yang lebih padat pekerjaan berkualitas, lebih produktif, lebih kompetitif, dan lebih luas basis kepemilikannya. Keberhasilan ekonomi seharusnya diukur bukan hanya dari seberapa cepat output bertambah, melainkan dari seberapa luas masyarakat memperoleh pendapatan, aset, keamanan ekonomi, layanan publik bermutu, serta kemampuan untuk naik kelas secara berkelanjutan.

Kata Kunci: pertumbuhan ekonomi; distribusi pendapatan; ketimpangan; kemiskinan; upah; kelas menengah; UMKM; aset; mobilitas sosial; rent seeking; kesejahteraan; Indonesia.

Snapshot Distribusi Pertumbuhan Indonesia 2026

Indikator	Kondisi 2026	Pertanyaan Distribusional
Pertumbuhan PDB Triwulan II	5,29% y-on-y	Apakah pertumbuhan menciptakan pendapatan dan pekerjaan yang tersebar luas?
Kemiskinan Maret	8,07%; 22,93 juta orang	Apakah penurunan kemiskinan disertai mobilitas keluar dari kerentanan?
Gini Ratio Maret	0,368	Apakah manfaat pertumbuhan semakin terkonsentrasi?
Porsi pengeluaran 40% terbawah	19,22%	Seberapa besar bagian konsumsi kelompok bawah dalam total pengeluaran?
TPT Mei	4,65%	Apakah tingkat pengangguran rendah disertai pekerjaan yang berkualitas?

Rata-rata upah buruh Mei	Rp3,39 juta/bulan	Apakah upah riil meningkat sejalan dengan produktivitas dan biaya hidup?
Pekerja pertanian, kehutanan, perikanan	42,60 juta; 28,75% pekerja	Apakah sektor penyerap tenaga kerja terbesar juga menghasilkan pendapatan memadai?
Kontribusi Pulau Jawa terhadap PDB Q2	56,47%	Apakah pertumbuhan spasial cukup menyebar ke luar pusat ekonomi tradisional?

1. Pendahuluan: Dari Pertumbuhan menuju Pertanyaan Distribusi

Pertumbuhan ekonomi adalah syarat penting bagi peningkatan kesejahteraan, tetapi tidak menjawab secara otomatis siapa yang memperoleh tambahan pendapatan, aset, pekerjaan, dan kualitas layanan. Cara masyarakat menikmati pertumbuhan ditentukan oleh posisi mereka dalam pasar kerja, kepemilikan aset, akses kepada layanan, dan kemampuan memengaruhi aturan. Dalam konteks ini, pertumbuhan agregat, distribusi manfaat, dan rumah tangga menjadi jalur penting yang menghubungkan aktivitas ekonomi dengan kesejahteraan. Karena Indonesia sangat beragam dalam struktur wilayah, pendidikan, kepemilikan aset, dan kesempatan kerja, satu angka nasional dapat menggambarkan arah umum tetapi tidak cukup menjelaskan pengalaman masyarakat. Analisis perlu bergerak sampai ke tingkat kelompok pendapatan, pekerjaan, gender, generasi, dan daerah.

Dimensi pertumbuhan agregat menunjukkan bahwa posisi awal sangat menentukan. Rumah tangga yang memiliki modal, tanah, pendidikan tinggi, jaringan bisnis, atau pekerjaan formal biasanya lebih mudah menangkap peluang baru. Sebaliknya, kelompok dengan aset terbatas sering harus menggunakan tambahan pendapatan untuk menutup kebutuhan dasar atau membayar utang. Akibatnya, tingkat pertumbuhan yang sama dapat menghasilkan akumulasi kekayaan yang sangat berbeda. Kebijakan publik harus menyadari efek kumulatif ini karena ketimpangan hari ini dapat menjadi ketimpangan kesempatan esok hari.

Dimensi distribusi manfaat berkaitan dengan kekuatan tawar. Dalam pasar yang ideal, produktivitas dan kompetisi mendorong pembagian manfaat yang relatif efisien. Dalam praktik, informasi tidak sempurna, pasar dapat terkonsentrasi, dan pekerja atau pemasok kecil sering menghadapi pilihan terbatas. Ketika posisi tawar tidak seimbang, kenaikan nilai tambah dapat lebih banyak menjadi margin keuntungan daripada upah atau harga yang diterima produsen kecil. Institusi persaingan, hukum kontrak, organisasi pekerja, dan keterbukaan informasi karena itu memengaruhi distribusi hasil.

Dimensi rumah tangga memperlihatkan peran negara sebagai pembentuk distribusi sebelum dan sesudah pasar. Sebelum pasar, negara memengaruhi kualitas pendidikan, kesehatan, infrastruktur, hak atas tanah, dan aturan kompetisi. Setelah pasar, negara menggunakan pajak, transfer, subsidi, dan layanan publik untuk memodifikasi hasil. Perdebatan tentang pemerataan sering terlalu berfokus pada redistribusi setelah pendapatan terbentuk, padahal kebijakan yang membentuk kesempatan awal dapat lebih efektif dan lebih bermartabat dalam jangka panjang.

Selanjutnya, perusahaan menuntut perhatian terhadap waktu. Kelompok yang tidak menikmati manfaat sekarang mungkin dapat memperoleh manfaat di masa depan apabila pertumbuhan menghasilkan investasi, keterampilan, dan pasar baru. Namun janji tersebut hanya kredibel jika terdapat mekanisme nyata yang menghubungkan pertumbuhan hari ini dengan kesempatan esok hari. Tanpa jalur mobilitas, masyarakat akan melihat pertumbuhan sebagai keuntungan bagi kelompok lain. Persepsi semacam itu dapat menurunkan kepercayaan dan dukungan terhadap reformasi.

Dimensi negara menekankan bahwa distribusi yang baik tidak sama dengan membagi hasil secara seragam. Pembangunan membutuhkan insentif bagi inovasi, investasi, kewirausahaan, dan pengambilan risiko. Yang perlu dijaga adalah agar keuntungan luar biasa berasal dari penciptaan nilai dan kompetisi, bukan dari rente, monopoli, atau akses politik. Dengan kata lain, ketimpangan yang berasal dari inovasi produktif mempunyai implikasi berbeda dari ketimpangan yang berasal dari privilese kelembagaan.

Pada tingkat rumah tangga, manfaat pertumbuhan seharusnya terlihat melalui kombinasi peningkatan pendapatan riil, stabilitas pekerjaan, akses pelayanan publik, dan kemampuan menabung atau memiliki aset. Jika kenaikan pendapatan nominal habis oleh biaya perumahan, transportasi, pendidikan, atau kesehatan, pengalaman kesejahteraan dapat tertinggal dari statistik makro. Karena itu, ukuran distribusi perlu menggabungkan pendapatan dengan biaya hidup dan kualitas layanan yang diterima.

Pada tingkat perusahaan, pertumbuhan inklusif berarti semakin banyak perusahaan produktif mampu memasuki pasar, tumbuh, dan menghubungkan diri dengan rantai nilai yang lebih besar. Ekonomi yang didominasi sedikit perusahaan sangat produktif dan banyak usaha mikro berproduktivitas rendah akan menghasilkan dualisme. Kebijakan harus memfasilitasi transisi perusahaan dari mikro menuju kecil dan menengah melalui pembiayaan, manajemen, teknologi, standardisasi, dan akses pasar, bukan hanya memberikan bantuan yang mempertahankan skala kecil.

Pada tingkat daerah, pertumbuhan agregat dan perusahaan harus dianalisis bersama. Daerah yang telah memiliki infrastruktur, tenaga terampil, pasar besar, dan jaringan pemasok cenderung terus menarik investasi sehingga muncul efek aglomerasi. Efisiensi aglomerasi penting, tetapi negara juga perlu mengurangi biaya konektivitas dan membangun kapasitas kota serta kawasan di luar pusat lama. Pemerataan spasial tidak berarti menyebarkan seluruh aktivitas secara sama, melainkan menciptakan cukup banyak pusat pertumbuhan agar penduduk mempunyai pilihan ekonomi tanpa harus selalu berpindah ke metropolitan utama.

Implikasi kebijakan dari pembahasan ini adalah perlunya evaluasi distributif pada setiap kebijakan utama. Pemerintah perlu menilai siapa penerima manfaat langsung dan tidak langsung, siapa menanggung biaya fiskal atau lingkungan, apakah kebijakan memperkuat kompetisi, serta apakah terdapat mekanisme koreksi jika manfaat terlalu terkonsentrasi. Pendekatan ini bukan anti-pertumbuhan. Justru distribusi yang lebih luas dapat memperbesar pasar domestik, memperkuat modal manusia, dan menciptakan dukungan politik bagi reformasi produktivitas.

Karena itu, keberhasilan pada tema ini perlu diuji melalui perubahan yang dapat diamati pada pertumbuhan agregat, distribusi manfaat, rumah tangga, perusahaan, dan negara. Pertanyaan yang tepat bukan hanya apakah indikator rata-rata membaik, tetapi apakah kelompok bawah bergerak lebih cepat, apakah kelas menengah menjadi lebih aman, apakah pekerja memperoleh bagian dari produktivitas, dan apakah keuntungan ekonomi semakin bergantung pada inovasi dibanding akses khusus. Inilah

perbedaan antara pertumbuhan yang sekadar terjadi dan pembangunan yang memperluas kemampuan masyarakat.

2. Mengapa Pertanyaan 'Siapa Menikmati?' Penting

Ekonomi politik mengingatkan bahwa setiap perubahan struktur ekonomi menciptakan pemenang, pihak yang tertinggal, dan kelompok yang menanggung biaya transisi. Pertanyaan distribusional harus memeriksa bukan hanya pendapatan saat ini, tetapi juga keamanan ekonomi dan kemampuan memperoleh peluang di masa depan. Dalam konteks ini, insentif, kekuasaan tawar, dan akses menjadi jalur penting yang menghubungkan aktivitas ekonomi dengan kesejahteraan. Karena Indonesia sangat beragam dalam struktur wilayah, pendidikan, kepemilikan aset, dan kesempatan kerja, satu angka nasional dapat menggambarkan arah umum tetapi tidak cukup menjelaskan pengalaman masyarakat. Analisis perlu bergerak sampai ke tingkat kelompok pendapatan, pekerjaan, gender, generasi, dan daerah.

Dimensi insentif menunjukkan bahwa posisi awal sangat menentukan. Rumah tangga yang memiliki modal, tanah, pendidikan tinggi, jaringan bisnis, atau pekerjaan formal biasanya lebih mudah menangkap peluang baru. Sebaliknya, kelompok dengan aset terbatas sering harus menggunakan tambahan pendapatan untuk menutup kebutuhan dasar atau membayar utang. Akibatnya, tingkat pertumbuhan yang sama dapat menghasilkan akumulasi kekayaan yang sangat berbeda. Kebijakan publik harus menyadari efek kumulatif ini karena ketimpangan hari ini dapat menjadi ketimpangan kesempatan esok hari.

Dimensi kekuasaan tawar berkaitan dengan kekuatan tawar. Dalam pasar yang ideal, produktivitas dan kompetisi mendorong pembagian manfaat yang relatif efisien. Dalam praktik, informasi tidak sempurna, pasar dapat terkonsentrasi, dan pekerja atau pemasok kecil sering menghadapi pilihan terbatas. Ketika posisi tawar tidak seimbang, kenaikan nilai tambah dapat lebih banyak menjadi margin keuntungan daripada upah atau harga yang diterima produsen kecil. Institusi persaingan, hukum kontrak, organisasi pekerja, dan keterbukaan informasi karena itu memengaruhi distribusi hasil.

Dimensi akses memperlihatkan peran negara sebagai pembentuk distribusi sebelum dan sesudah pasar. Sebelum pasar, negara memengaruhi kualitas pendidikan, kesehatan, infrastruktur, hak atas tanah, dan aturan kompetisi. Setelah pasar, negara menggunakan pajak, transfer, subsidi, dan layanan publik untuk memodifikasi hasil. Perdebatan tentang pemerataan sering terlalu berfokus pada redistribusi setelah pendapatan terbentuk, padahal kebijakan yang membentuk kesempatan awal dapat lebih efektif dan lebih bermartabat dalam jangka panjang.

Selanjutnya, risiko menuntut perhatian terhadap waktu. Kelompok yang tidak menikmati manfaat sekarang mungkin dapat memperoleh manfaat di masa depan apabila pertumbuhan menghasilkan investasi, keterampilan, dan pasar baru. Namun janji tersebut hanya kredibel jika terdapat mekanisme nyata yang menghubungkan pertumbuhan hari ini dengan kesempatan esok hari. Tanpa jalur mobilitas, masyarakat akan melihat pertumbuhan sebagai keuntungan bagi kelompok lain. Persepsi semacam itu dapat menurunkan kepercayaan dan dukungan terhadap reformasi.

Dimensi legitimasi menekankan bahwa distribusi yang baik tidak sama dengan membagi hasil secara seragam. Pembangunan membutuhkan insentif bagi inovasi, investasi, kewirausahaan, dan pengambilan risiko. Yang perlu dijaga adalah agar keuntungan luar biasa berasal dari penciptaan nilai dan kompetisi,

bukan dari rente, monopoli, atau akses politik. Dengan kata lain, ketimpangan yang berasal dari inovasi produktif mempunyai implikasi berbeda dari ketimpangan yang berasal dari privilese kelembagaan.

Pada tingkat rumah tangga, manfaat pertumbuhan seharusnya terlihat melalui kombinasi peningkatan pendapatan riil, stabilitas pekerjaan, akses pelayanan publik, dan kemampuan menabung atau memiliki aset. Jika kenaikan pendapatan nominal habis oleh biaya perumahan, transportasi, pendidikan, atau kesehatan, pengalaman kesejahteraan dapat tertinggal dari statistik makro. Karena itu, ukuran distribusi perlu menggabungkan pendapatan dengan biaya hidup dan kualitas layanan yang diterima.

Pada tingkat perusahaan, pertumbuhan inklusif berarti semakin banyak perusahaan produktif mampu memasuki pasar, tumbuh, dan menghubungkan diri dengan rantai nilai yang lebih besar. Ekonomi yang didominasi sedikit perusahaan sangat produktif dan banyak usaha mikro berproduktivitas rendah akan menghasilkan dualisme. Kebijakan harus memfasilitasi transisi perusahaan dari mikro menuju kecil dan menengah melalui pembiayaan, manajemen, teknologi, standardisasi, dan akses pasar, bukan hanya memberikan bantuan yang mempertahankan skala kecil.

Pada tingkat daerah, insentif dan risiko harus dianalisis bersama. Daerah yang telah memiliki infrastruktur, tenaga terampil, pasar besar, dan jaringan pemasok cenderung terus menarik investasi sehingga muncul efek aglomerasi. Efisiensi aglomerasi penting, tetapi negara juga perlu mengurangi biaya konektivitas dan membangun kapasitas kota serta kawasan di luar pusat lama. Pemerataan spasial tidak berarti menyebarkan seluruh aktivitas secara sama, melainkan menciptakan cukup banyak pusat pertumbuhan agar penduduk mempunyai pilihan ekonomi tanpa harus selalu berpindah ke metropolitan utama.

Implikasi kebijakan dari pembahasan ini adalah perlunya evaluasi distributif pada setiap kebijakan utama. Pemerintah perlu menilai siapa penerima manfaat langsung dan tidak langsung, siapa menanggung biaya fiskal atau lingkungan, apakah kebijakan memperkuat kompetisi, serta apakah terdapat mekanisme koreksi jika manfaat terlalu terkonsentrasi. Pendekatan ini bukan anti-pertumbuhan. Justru distribusi yang lebih luas dapat memperbesar pasar domestik, memperkuat modal manusia, dan menciptakan dukungan politik bagi reformasi produktivitas.

Karena itu, keberhasilan pada tema ini perlu diuji melalui perubahan yang dapat diamati pada insentif, kekuasaan tawar, akses, risiko, dan legitimasi. Pertanyaan yang tepat bukan hanya apakah indikator rata-rata membaik, tetapi apakah kelompok bawah bergerak lebih cepat, apakah kelas menengah menjadi lebih aman, apakah pekerja memperoleh bagian dari produktivitas, dan apakah keuntungan ekonomi semakin bergantung pada inovasi dibanding akses khusus. Inilah perbedaan antara pertumbuhan yang sekadar terjadi dan pembangunan yang memperluas kemampuan masyarakat.

3. Pertumbuhan PDB dan Batas Ukurannya

PDB mengukur produksi, bukan pemerataan, keamanan kerja, kualitas lingkungan, atau distribusi kemampuan antarindividu. Perbedaan antara penciptaan nilai dan pembagian nilai merupakan inti analisis karena sektor yang tumbuh cepat belum tentu mempunyai keterkaitan luas dengan rumah tangga. Dalam konteks ini, PDB per kapita, pendapatan disposabel, dan aset menjadi jalur penting yang menghubungkan aktivitas ekonomi dengan kesejahteraan. Karena Indonesia sangat beragam dalam struktur wilayah, pendidikan, kepemilikan aset, dan kesempatan kerja, satu angka nasional dapat

menggambarkan arah umum tetapi tidak cukup menjelaskan pengalaman masyarakat. Analisis perlu bergerak sampai ke tingkat kelompok pendapatan, pekerjaan, gender, generasi, dan daerah.

Dimensi PDB per kapita menunjukkan bahwa posisi awal sangat menentukan. Rumah tangga yang memiliki modal, tanah, pendidikan tinggi, jaringan bisnis, atau pekerjaan formal biasanya lebih mudah menangkap peluang baru. Sebaliknya, kelompok dengan aset terbatas sering harus menggunakan tambahan pendapatan untuk menutup kebutuhan dasar atau membayar utang. Akibatnya, tingkat pertumbuhan yang sama dapat menghasilkan akumulasi kekayaan yang sangat berbeda. Kebijakan publik harus menyadari efek kumulatif ini karena ketimpangan hari ini dapat menjadi ketimpangan kesempatan esok hari.

Dimensi pendapatan disposabel berkaitan dengan kekuatan tawar. Dalam pasar yang ideal, produktivitas dan kompetisi mendorong pembagian manfaat yang relatif efisien. Dalam praktik, informasi tidak sempurna, pasar dapat terkonsentrasi, dan pekerja atau pemasok kecil sering menghadapi pilihan terbatas. Ketika posisi tawar tidak seimbang, kenaikan nilai tambah dapat lebih banyak menjadi margin keuntungan daripada upah atau harga yang diterima produsen kecil. Institusi persaingan, hukum kontrak, organisasi pekerja, dan keterbukaan informasi karena itu memengaruhi distribusi hasil.

Dimensi aset memperlihatkan peran negara sebagai pembentuk distribusi sebelum dan sesudah pasar. Sebelum pasar, negara memengaruhi kualitas pendidikan, kesehatan, infrastruktur, hak atas tanah, dan aturan kompetisi. Setelah pasar, negara menggunakan pajak, transfer, subsidi, dan layanan publik untuk memodifikasi hasil. Perdebatan tentang pemerataan sering terlalu berfokus pada redistribusi setelah pendapatan terbentuk, padahal kebijakan yang membentuk kesempatan awal dapat lebih efektif dan lebih bermartabat dalam jangka panjang.

Selanjutnya, layanan publik menuntut perhatian terhadap waktu. Kelompok yang tidak menikmati manfaat sekarang mungkin dapat memperoleh manfaat di masa depan apabila pertumbuhan menghasilkan investasi, keterampilan, dan pasar baru. Namun janji tersebut hanya kredibel jika terdapat mekanisme nyata yang menghubungkan pertumbuhan hari ini dengan kesempatan esok hari. Tanpa jalur mobilitas, masyarakat akan melihat pertumbuhan sebagai keuntungan bagi kelompok lain. Persepsi semacam itu dapat menurunkan kepercayaan dan dukungan terhadap reformasi.

Dimensi kualitas hidup menekankan bahwa distribusi yang baik tidak sama dengan membagi hasil secara seragam. Pembangunan membutuhkan insentif bagi inovasi, investasi, kewirausahaan, dan pengambilan risiko. Yang perlu dijaga adalah agar keuntungan luar biasa berasal dari penciptaan nilai dan kompetisi, bukan dari rente, monopoli, atau akses politik. Dengan kata lain, ketimpangan yang berasal dari inovasi produktif mempunyai implikasi berbeda dari ketimpangan yang berasal dari privilese kelembagaan.

Pada tingkat rumah tangga, manfaat pertumbuhan seharusnya terlihat melalui kombinasi peningkatan pendapatan riil, stabilitas pekerjaan, akses pelayanan publik, dan kemampuan menabung atau memiliki aset. Jika kenaikan pendapatan nominal habis oleh biaya perumahan, transportasi, pendidikan, atau kesehatan, pengalaman kesejahteraan dapat tertinggal dari statistik makro. Karena itu, ukuran distribusi perlu menggabungkan pendapatan dengan biaya hidup dan kualitas layanan yang diterima.

Pada tingkat perusahaan, pertumbuhan inklusif berarti semakin banyak perusahaan produktif mampu memasuki pasar, tumbuh, dan menghubungkan diri dengan rantai nilai yang lebih besar. Ekonomi yang didominasi sedikit perusahaan sangat produktif dan banyak usaha mikro berproduktivitas rendah akan menghasilkan dualisme. Kebijakan harus memfasilitasi transisi perusahaan dari mikro menuju kecil dan

menengah melalui pembiayaan, manajemen, teknologi, standardisasi, dan akses pasar, bukan hanya memberikan bantuan yang mempertahankan skala kecil.

Pada tingkat daerah, PDB per kapita dan layanan publik harus dianalisis bersama. Daerah yang telah memiliki infrastruktur, tenaga terampil, pasar besar, dan jaringan pemasok cenderung terus menarik investasi sehingga muncul efek aglomerasi. Efisiensi aglomerasi penting, tetapi negara juga perlu mengurangi biaya konektivitas dan membangun kapasitas kota serta kawasan di luar pusat lama. Pemerataan spasial tidak berarti menyebarkan seluruh aktivitas secara sama, melainkan menciptakan cukup banyak pusat pertumbuhan agar penduduk mempunyai pilihan ekonomi tanpa harus selalu berpindah ke metropolitan utama.

Implikasi kebijakan dari pembahasan ini adalah perlunya evaluasi distributif pada setiap kebijakan utama. Pemerintah perlu menilai siapa penerima manfaat langsung dan tidak langsung, siapa menanggung biaya fiskal atau lingkungan, apakah kebijakan memperkuat kompetisi, serta apakah terdapat mekanisme koreksi jika manfaat terlalu terkonsentrasi. Pendekatan ini bukan anti-pertumbuhan. Justru distribusi yang lebih luas dapat memperbesar pasar domestik, memperkuat modal manusia, dan menciptakan dukungan politik bagi reformasi produktivitas.

Karena itu, keberhasilan pada tema ini perlu diuji melalui perubahan yang dapat diamati pada PDB per kapita, pendapatan disposabel, aset, layanan publik, dan kualitas hidup. Pertanyaan yang tepat bukan hanya apakah indikator rata-rata membaik, tetapi apakah kelompok bawah bergerak lebih cepat, apakah kelas menengah menjadi lebih aman, apakah pekerja memperoleh bagian dari produktivitas, dan apakah keuntungan ekonomi semakin bergantung pada inovasi dibanding akses khusus. Inilah perbedaan antara pertumbuhan yang sekadar terjadi dan pembangunan yang memperluas kemampuan masyarakat.

4. Distribusi Fungsional: Upah, Laba, dan Rente

Manfaat pertumbuhan pertama-tama terbagi antara pendapatan tenaga kerja, keuntungan modal, pendapatan tanah, dan berbagai bentuk rente. Dalam ekonomi politik, distribusi manfaat tidak terjadi setelah pertumbuhan selesai; distribusi dibentuk sejak proses produksi, pengaturan pasar, dan penetapan hak atas aset. Dalam konteks ini, labor share, profit share, dan rente ekonomi menjadi jalur penting yang menghubungkan aktivitas ekonomi dengan kesejahteraan. Karena Indonesia sangat beragam dalam struktur wilayah, pendidikan, kepemilikan aset, dan kesempatan kerja, satu angka nasional dapat menggambarkan arah umum tetapi tidak cukup menjelaskan pengalaman masyarakat. Analisis perlu bergerak sampai ke tingkat kelompok pendapatan, pekerjaan, gender, generasi, dan daerah.

Dimensi labor share menunjukkan bahwa posisi awal sangat menentukan. Rumah tangga yang memiliki modal, tanah, pendidikan tinggi, jaringan bisnis, atau pekerjaan formal biasanya lebih mudah menangkap peluang baru. Sebaliknya, kelompok dengan aset terbatas sering harus menggunakan tambahan pendapatan untuk menutup kebutuhan dasar atau membayar utang. Akibatnya, tingkat pertumbuhan yang sama dapat menghasilkan akumulasi kekayaan yang sangat berbeda. Kebijakan publik harus menyadari efek kumulatif ini karena ketimpangan hari ini dapat menjadi ketimpangan kesempatan esok hari.

Dimensi profit share berkaitan dengan kekuatan tawar. Dalam pasar yang ideal, produktivitas dan kompetisi mendorong pembagian manfaat yang relatif efisien. Dalam praktik, informasi tidak sempurna,

pasar dapat terkonsentrasi, dan pekerja atau pemasok kecil sering menghadapi pilihan terbatas. Ketika posisi tawar tidak seimbang, kenaikan nilai tambah dapat lebih banyak menjadi margin keuntungan daripada upah atau harga yang diterima produsen kecil. Institusi persaingan, hukum kontrak, organisasi pekerja, dan keterbukaan informasi karena itu memengaruhi distribusi hasil.

Dimensi rente ekonomi memperlihatkan peran negara sebagai pembentuk distribusi sebelum dan sesudah pasar. Sebelum pasar, negara memengaruhi kualitas pendidikan, kesehatan, infrastruktur, hak atas tanah, dan aturan kompetisi. Setelah pasar, negara menggunakan pajak, transfer, subsidi, dan layanan publik untuk memodifikasi hasil. Perdebatan tentang pemerataan sering terlalu berfokus pada redistribusi setelah pendapatan terbentuk, padahal kebijakan yang membentuk kesempatan awal dapat lebih efektif dan lebih bermartabat dalam jangka panjang.

Selanjutnya, produktivitas menuntut perhatian terhadap waktu. Kelompok yang tidak menikmati manfaat sekarang mungkin dapat memperoleh manfaat di masa depan apabila pertumbuhan menghasilkan investasi, keterampilan, dan pasar baru. Namun janji tersebut hanya kredibel jika terdapat mekanisme nyata yang menghubungkan pertumbuhan hari ini dengan kesempatan esok hari. Tanpa jalur mobilitas, masyarakat akan melihat pertumbuhan sebagai keuntungan bagi kelompok lain. Persepsi semacam itu dapat menurunkan kepercayaan dan dukungan terhadap reformasi.

Dimensi daya tawar menekankan bahwa distribusi yang baik tidak sama dengan membagi hasil secara seragam. Pembangunan membutuhkan insentif bagi inovasi, investasi, kewirausahaan, dan pengambilan risiko. Yang perlu dijaga adalah agar keuntungan luar biasa berasal dari penciptaan nilai dan kompetisi, bukan dari rente, monopoli, atau akses politik. Dengan kata lain, ketimpangan yang berasal dari inovasi produktif mempunyai implikasi berbeda dari ketimpangan yang berasal dari privilese kelembagaan.

Pada tingkat rumah tangga, manfaat pertumbuhan seharusnya terlihat melalui kombinasi peningkatan pendapatan riil, stabilitas pekerjaan, akses pelayanan publik, dan kemampuan menabung atau memiliki aset. Jika kenaikan pendapatan nominal habis oleh biaya perumahan, transportasi, pendidikan, atau kesehatan, pengalaman kesejahteraan dapat tertinggal dari statistik makro. Karena itu, ukuran distribusi perlu menggabungkan pendapatan dengan biaya hidup dan kualitas layanan yang diterima.

Pada tingkat perusahaan, pertumbuhan inklusif berarti semakin banyak perusahaan produktif mampu memasuki pasar, tumbuh, dan menghubungkan diri dengan rantai nilai yang lebih besar. Ekonomi yang didominasi sedikit perusahaan sangat produktif dan banyak usaha mikro berproduktivitas rendah akan menghasilkan dualisme. Kebijakan harus memfasilitasi transisi perusahaan dari mikro menuju kecil dan menengah melalui pembiayaan, manajemen, teknologi, standardisasi, dan akses pasar, bukan hanya memberikan bantuan yang mempertahankan skala kecil.

Pada tingkat daerah, labor share dan produktivitas harus dianalisis bersama. Daerah yang telah memiliki infrastruktur, tenaga terampil, pasar besar, dan jaringan pemasok cenderung terus menarik investasi sehingga muncul efek aglomerasi. Efisiensi aglomerasi penting, tetapi negara juga perlu mengurangi biaya konektivitas dan membangun kapasitas kota serta kawasan di luar pusat lama. Pemerataan spasial tidak berarti menyebarkan seluruh aktivitas secara sama, melainkan menciptakan cukup banyak pusat pertumbuhan agar penduduk mempunyai pilihan ekonomi tanpa harus selalu berpindah ke metropolitan utama.

Implikasi kebijakan dari pembahasan ini adalah perlunya evaluasi distributif pada setiap kebijakan utama. Pemerintah perlu menilai siapa penerima manfaat langsung dan tidak langsung, siapa

menanggung biaya fiskal atau lingkungan, apakah kebijakan memperkuat kompetisi, serta apakah terdapat mekanisme koreksi jika manfaat terlalu terkonsentrasi. Pendekatan ini bukan anti-pertumbuhan. Justru distribusi yang lebih luas dapat memperbesar pasar domestik, memperkuat modal manusia, dan menciptakan dukungan politik bagi reformasi produktivitas.

Karena itu, keberhasilan pada tema ini perlu diuji melalui perubahan yang dapat diamati pada labor share, profit share, rente ekonomi, produktivitas, dan daya tawar. Pertanyaan yang tepat bukan hanya apakah indikator rata-rata membaik, tetapi apakah kelompok bawah bergerak lebih cepat, apakah kelas menengah menjadi lebih aman, apakah pekerja memperoleh bagian dari produktivitas, dan apakah keuntungan ekonomi semakin bergantung pada inovasi dibanding akses khusus. Inilah perbedaan antara pertumbuhan yang sekadar terjadi dan pembangunan yang memperluas kemampuan masyarakat.

5. Ketimpangan Pengeluaran Indonesia 2026

Gini Ratio 0,368 pada Maret 2026 menunjukkan bahwa pertumbuhan perlu dibaca bersama perubahan distribusi pengeluaran dan posisi kelompok bawah. Cara masyarakat menikmati pertumbuhan ditentukan oleh posisi mereka dalam pasar kerja, kepemilikan aset, akses kepada layanan, dan kemampuan memengaruhi aturan. Dalam konteks ini, gini ratio, 40 persen terbawah, dan perkotaan menjadi jalur penting yang menghubungkan aktivitas ekonomi dengan kesejahteraan. Karena Indonesia sangat beragam dalam struktur wilayah, pendidikan, kepemilikan aset, dan kesempatan kerja, satu angka nasional dapat menggambarkan arah umum tetapi tidak cukup menjelaskan pengalaman masyarakat. Analisis perlu bergerak sampai ke tingkat kelompok pendapatan, pekerjaan, gender, generasi, dan daerah.

Dimensi gini ratio menunjukkan bahwa posisi awal sangat menentukan. Rumah tangga yang memiliki modal, tanah, pendidikan tinggi, jaringan bisnis, atau pekerjaan formal biasanya lebih mudah menangkap peluang baru. Sebaliknya, kelompok dengan aset terbatas sering harus menggunakan tambahan pendapatan untuk menutup kebutuhan dasar atau membayar utang. Akibatnya, tingkat pertumbuhan yang sama dapat menghasilkan akumulasi kekayaan yang sangat berbeda. Kebijakan publik harus menyadari efek kumulatif ini karena ketimpangan hari ini dapat menjadi ketimpangan kesempatan esok hari.

Dimensi 40 persen terbawah berkaitan dengan kekuatan tawar. Dalam pasar yang ideal, produktivitas dan kompetisi mendorong pembagian manfaat yang relatif efisien. Dalam praktik, informasi tidak sempurna, pasar dapat terkonsentrasi, dan pekerja atau pemasok kecil sering menghadapi pilihan terbatas. Ketika posisi tawar tidak seimbang, kenaikan nilai tambah dapat lebih banyak menjadi margin keuntungan daripada upah atau harga yang diterima produsen kecil. Institusi persaingan, hukum kontrak, organisasi pekerja, dan keterbukaan informasi karena itu memengaruhi distribusi hasil.

Dimensi perkotaan memperlihatkan peran negara sebagai pembentuk distribusi sebelum dan sesudah pasar. Sebelum pasar, negara memengaruhi kualitas pendidikan, kesehatan, infrastruktur, hak atas tanah, dan aturan kompetisi. Setelah pasar, negara menggunakan pajak, transfer, subsidi, dan layanan publik untuk memodifikasi hasil. Perdebatan tentang pemerataan sering terlalu berfokus pada redistribusi setelah pendapatan terbentuk, padahal kebijakan yang membentuk kesempatan awal dapat lebih efektif dan lebih bermartabat dalam jangka panjang.

Selanjutnya, perdesaan menuntut perhatian terhadap waktu. Kelompok yang tidak menikmati manfaat sekarang mungkin dapat memperoleh manfaat di masa depan apabila pertumbuhan menghasilkan investasi, keterampilan, dan pasar baru. Namun janji tersebut hanya kredibel jika terdapat mekanisme nyata yang menghubungkan pertumbuhan hari ini dengan kesempatan esok hari. Tanpa jalur mobilitas, masyarakat akan melihat pertumbuhan sebagai keuntungan bagi kelompok lain. Persepsi semacam itu dapat menurunkan kepercayaan dan dukungan terhadap reformasi.

Dimensi perubahan tahunan menekankan bahwa distribusi yang baik tidak sama dengan membagi hasil secara seragam. Pembangunan membutuhkan insentif bagi inovasi, investasi, kewirausahaan, dan pengambilan risiko. Yang perlu dijaga adalah agar keuntungan luar biasa berasal dari penciptaan nilai dan kompetisi, bukan dari rente, monopoli, atau akses politik. Dengan kata lain, ketimpangan yang berasal dari inovasi produktif mempunyai implikasi berbeda dari ketimpangan yang berasal dari privilese kelembagaan.

Pada tingkat rumah tangga, manfaat pertumbuhan seharusnya terlihat melalui kombinasi peningkatan pendapatan riil, stabilitas pekerjaan, akses pelayanan publik, dan kemampuan menabung atau memiliki aset. Jika kenaikan pendapatan nominal habis oleh biaya perumahan, transportasi, pendidikan, atau kesehatan, pengalaman kesejahteraan dapat tertinggal dari statistik makro. Karena itu, ukuran distribusi perlu menggabungkan pendapatan dengan biaya hidup dan kualitas layanan yang diterima.

Pada tingkat perusahaan, pertumbuhan inklusif berarti semakin banyak perusahaan produktif mampu memasuki pasar, tumbuh, dan menghubungkan diri dengan rantai nilai yang lebih besar. Ekonomi yang didominasi sedikit perusahaan sangat produktif dan banyak usaha mikro berproduktivitas rendah akan menghasilkan dualisme. Kebijakan harus memfasilitasi transisi perusahaan dari mikro menuju kecil dan menengah melalui pembiayaan, manajemen, teknologi, standardisasi, dan akses pasar, bukan hanya memberikan bantuan yang mempertahankan skala kecil.

Pada tingkat daerah, gini ratio dan perdesaan harus dianalisis bersama. Daerah yang telah memiliki infrastruktur, tenaga terampil, pasar besar, dan jaringan pemasok cenderung terus menarik investasi sehingga muncul efek aglomerasi. Efisiensi aglomerasi penting, tetapi negara juga perlu mengurangi biaya konektivitas dan membangun kapasitas kota serta kawasan di luar pusat lama. Pemerataan spasial tidak berarti menyebarkan seluruh aktivitas secara sama, melainkan menciptakan cukup banyak pusat pertumbuhan agar penduduk mempunyai pilihan ekonomi tanpa harus selalu berpindah ke metropolitan utama.

Implikasi kebijakan dari pembahasan ini adalah perlunya evaluasi distributif pada setiap kebijakan utama. Pemerintah perlu menilai siapa penerima manfaat langsung dan tidak langsung, siapa menanggung biaya fiskal atau lingkungan, apakah kebijakan memperkuat kompetisi, serta apakah terdapat mekanisme koreksi jika manfaat terlalu terkonsentrasi. Pendekatan ini bukan anti-pertumbuhan. Justru distribusi yang lebih luas dapat memperbesar pasar domestik, memperkuat modal manusia, dan menciptakan dukungan politik bagi reformasi produktivitas.

Karena itu, keberhasilan pada tema ini perlu diuji melalui perubahan yang dapat diamati pada gini ratio, 40 persen terbawah, perkotaan, perdesaan, dan perubahan tahunan. Pertanyaan yang tepat bukan hanya apakah indikator rata-rata membaik, tetapi apakah kelompok bawah bergerak lebih cepat, apakah kelas menengah menjadi lebih aman, apakah pekerja memperoleh bagian dari produktivitas, dan apakah

keuntungan ekonomi semakin bergantung pada inovasi dibanding akses khusus. Inilah perbedaan antara pertumbuhan yang sekadar terjadi dan pembangunan yang memperluas kemampuan masyarakat.

6. Kemiskinan Turun, Kerentanan Tetap Besar

Turunnya kemiskinan menjadi 8,07 persen merupakan kemajuan penting, tetapi garis kemiskinan tidak identik dengan batas kehidupan ekonomi yang aman. Pertanyaan distribusional harus memeriksa bukan hanya pendapatan saat ini, tetapi juga keamanan ekonomi dan kemampuan memperoleh peluang di masa depan. Dalam konteks ini, poverty line, near poor, dan shock vulnerability menjadi jalur penting yang menghubungkan aktivitas ekonomi dengan kesejahteraan. Karena Indonesia sangat beragam dalam struktur wilayah, pendidikan, kepemilikan aset, dan kesempatan kerja, satu angka nasional dapat menggambarkan arah umum tetapi tidak cukup menjelaskan pengalaman masyarakat. Analisis perlu bergerak sampai ke tingkat kelompok pendapatan, pekerjaan, gender, generasi, dan daerah.

Dimensi poverty line menunjukkan bahwa posisi awal sangat menentukan. Rumah tangga yang memiliki modal, tanah, pendidikan tinggi, jaringan bisnis, atau pekerjaan formal biasanya lebih mudah menangkap peluang baru. Sebaliknya, kelompok dengan aset terbatas sering harus menggunakan tambahan pendapatan untuk menutup kebutuhan dasar atau membayar utang. Akibatnya, tingkat pertumbuhan yang sama dapat menghasilkan akumulasi kekayaan yang sangat berbeda. Kebijakan publik harus menyadari efek kumulatif ini karena ketimpangan hari ini dapat menjadi ketimpangan kesempatan esok hari.

Dimensi near poor berkaitan dengan kekuatan tawar. Dalam pasar yang ideal, produktivitas dan kompetisi mendorong pembagian manfaat yang relatif efisien. Dalam praktik, informasi tidak sempurna, pasar dapat terkonsentrasi, dan pekerja atau pemasok kecil sering menghadapi pilihan terbatas. Ketika posisi tawar tidak seimbang, kenaikan nilai tambah dapat lebih banyak menjadi margin keuntungan daripada upah atau harga yang diterima produsen kecil. Institusi persaingan, hukum kontrak, organisasi pekerja, dan keterbukaan informasi karena itu memengaruhi distribusi hasil.

Dimensi shock vulnerability memperlihatkan peran negara sebagai pembentuk distribusi sebelum dan sesudah pasar. Sebelum pasar, negara memengaruhi kualitas pendidikan, kesehatan, infrastruktur, hak atas tanah, dan aturan kompetisi. Setelah pasar, negara menggunakan pajak, transfer, subsidi, dan layanan publik untuk memodifikasi hasil. Perdebatan tentang pemerataan sering terlalu berfokus pada redistribusi setelah pendapatan terbentuk, padahal kebijakan yang membentuk kesempatan awal dapat lebih efektif dan lebih bermartabat dalam jangka panjang.

Selanjutnya, desa-kota menuntut perhatian terhadap waktu. Kelompok yang tidak menikmati manfaat sekarang mungkin dapat memperoleh manfaat di masa depan apabila pertumbuhan menghasilkan investasi, keterampilan, dan pasar baru. Namun janji tersebut hanya kredibel jika terdapat mekanisme nyata yang menghubungkan pertumbuhan hari ini dengan kesempatan esok hari. Tanpa jalur mobilitas, masyarakat akan melihat pertumbuhan sebagai keuntungan bagi kelompok lain. Persepsi semacam itu dapat menurunkan kepercayaan dan dukungan terhadap reformasi.

Dimensi jaminan sosial menekankan bahwa distribusi yang baik tidak sama dengan membagi hasil secara seragam. Pembangunan membutuhkan insentif bagi inovasi, investasi, kewirausahaan, dan pengambilan risiko. Yang perlu dijaga adalah agar keuntungan luar biasa berasal dari penciptaan nilai dan kompetisi, bukan dari rente, monopoli, atau akses politik. Dengan kata lain, ketimpangan yang berasal

dari inovasi produktif mempunyai implikasi berbeda dari ketimpangan yang berasal dari privilese kelembagaan.

Pada tingkat rumah tangga, manfaat pertumbuhan seharusnya terlihat melalui kombinasi peningkatan pendapatan riil, stabilitas pekerjaan, akses pelayanan publik, dan kemampuan menabung atau memiliki aset. Jika kenaikan pendapatan nominal habis oleh biaya perumahan, transportasi, pendidikan, atau kesehatan, pengalaman kesejahteraan dapat tertinggal dari statistik makro. Karena itu, ukuran distribusi perlu menggabungkan pendapatan dengan biaya hidup dan kualitas layanan yang diterima.

Pada tingkat perusahaan, pertumbuhan inklusif berarti semakin banyak perusahaan produktif mampu memasuki pasar, tumbuh, dan menghubungkan diri dengan rantai nilai yang lebih besar. Ekonomi yang didominasi sedikit perusahaan sangat produktif dan banyak usaha mikro berproduktivitas rendah akan menghasilkan dualisme. Kebijakan harus memfasilitasi transisi perusahaan dari mikro menuju kecil dan menengah melalui pembiayaan, manajemen, teknologi, standardisasi, dan akses pasar, bukan hanya memberikan bantuan yang mempertahankan skala kecil.

Pada tingkat daerah, poverty line dan desa-kota harus dianalisis bersama. Daerah yang telah memiliki infrastruktur, tenaga terampil, pasar besar, dan jaringan pemasok cenderung terus menarik investasi sehingga muncul efek aglomerasi. Efisiensi aglomerasi penting, tetapi negara juga perlu mengurangi biaya konektivitas dan membangun kapasitas kota serta kawasan di luar pusat lama. Pemerataan spasial tidak berarti menyebarkan seluruh aktivitas secara sama, melainkan menciptakan cukup banyak pusat pertumbuhan agar penduduk mempunyai pilihan ekonomi tanpa harus selalu berpindah ke metropolitan utama.

Implikasi kebijakan dari pembahasan ini adalah perlunya evaluasi distributif pada setiap kebijakan utama. Pemerintah perlu menilai siapa penerima manfaat langsung dan tidak langsung, siapa menanggung biaya fiskal atau lingkungan, apakah kebijakan memperkuat kompetisi, serta apakah terdapat mekanisme koreksi jika manfaat terlalu terkonsentrasi. Pendekatan ini bukan anti-pertumbuhan. Justru distribusi yang lebih luas dapat memperbesar pasar domestik, memperkuat modal manusia, dan menciptakan dukungan politik bagi reformasi produktivitas.

Karena itu, keberhasilan pada tema ini perlu diuji melalui perubahan yang dapat diamati pada poverty line, near poor, shock vulnerability, desa-kota, dan jaminan sosial. Pertanyaan yang tepat bukan hanya apakah indikator rata-rata membaik, tetapi apakah kelompok bawah bergerak lebih cepat, apakah kelas menengah menjadi lebih aman, apakah pekerja memperoleh bagian dari produktivitas, dan apakah keuntungan ekonomi semakin bergantung pada inovasi dibanding akses khusus. Inilah perbedaan antara pertumbuhan yang sekadar terjadi dan pembangunan yang memperluas kemampuan masyarakat.

7. Kelas Menengah: Pemenang atau Kelompok yang Tertekan?

Kelas menengah penting bagi konsumsi, pajak, stabilitas sosial, dan demokrasi, tetapi mudah tertekan oleh biaya perumahan, pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan yang tidak pasti. Perbedaan antara penciptaan nilai dan pembagian nilai merupakan inti analisis karena sektor yang tumbuh cepat belum tentu mempunyai keterkaitan luas dengan rumah tangga. Dalam konteks ini, daya beli, aset rumah tangga, dan utang menjadi jalur penting yang menghubungkan aktivitas ekonomi dengan kesejahteraan. Karena Indonesia sangat beragam dalam struktur wilayah, pendidikan, kepemilikan aset, dan kesempatan kerja, satu angka nasional dapat menggambarkan arah umum tetapi tidak cukup

menjelaskan pengalaman masyarakat. Analisis perlu bergerak sampai ke tingkat kelompok pendapatan, pekerjaan, gender, generasi, dan daerah.

Dimensi daya beli menunjukkan bahwa posisi awal sangat menentukan. Rumah tangga yang memiliki modal, tanah, pendidikan tinggi, jaringan bisnis, atau pekerjaan formal biasanya lebih mudah menangkap peluang baru. Sebaliknya, kelompok dengan aset terbatas sering harus menggunakan tambahan pendapatan untuk menutup kebutuhan dasar atau membayar utang. Akibatnya, tingkat pertumbuhan yang sama dapat menghasilkan akumulasi kekayaan yang sangat berbeda. Kebijakan publik harus menyadari efek kumulatif ini karena ketimpangan hari ini dapat menjadi ketimpangan kesempatan esok hari.

Dimensi aset rumah tangga berkaitan dengan kekuatan tawar. Dalam pasar yang ideal, produktivitas dan kompetisi mendorong pembagian manfaat yang relatif efisien. Dalam praktik, informasi tidak sempurna, pasar dapat terkonsentrasi, dan pekerja atau pemasok kecil sering menghadapi pilihan terbatas. Ketika posisi tawar tidak seimbang, kenaikan nilai tambah dapat lebih banyak menjadi margin keuntungan daripada upah atau harga yang diterima produsen kecil. Institusi persaingan, hukum kontrak, organisasi pekerja, dan keterbukaan informasi karena itu memengaruhi distribusi hasil.

Dimensi utang memperlihatkan peran negara sebagai pembentuk distribusi sebelum dan sesudah pasar. Sebelum pasar, negara memengaruhi kualitas pendidikan, kesehatan, infrastruktur, hak atas tanah, dan aturan kompetisi. Setelah pasar, negara menggunakan pajak, transfer, subsidi, dan layanan publik untuk memodifikasi hasil. Perdebatan tentang pemerataan sering terlalu berfokus pada redistribusi setelah pendapatan terbentuk, padahal kebijakan yang membentuk kesempatan awal dapat lebih efektif dan lebih bermartabat dalam jangka panjang.

Selanjutnya, biaya layanan menuntut perhatian terhadap waktu. Kelompok yang tidak menikmati manfaat sekarang mungkin dapat memperoleh manfaat di masa depan apabila pertumbuhan menghasilkan investasi, keterampilan, dan pasar baru. Namun janji tersebut hanya kredibel jika terdapat mekanisme nyata yang menghubungkan pertumbuhan hari ini dengan kesempatan esok hari. Tanpa jalur mobilitas, masyarakat akan melihat pertumbuhan sebagai keuntungan bagi kelompok lain. Persepsi semacam itu dapat menurunkan kepercayaan dan dukungan terhadap reformasi.

Dimensi mobilitas menekankan bahwa distribusi yang baik tidak sama dengan membagi hasil secara seragam. Pembangunan membutuhkan insentif bagi inovasi, investasi, kewirausahaan, dan pengambilan risiko. Yang perlu dijaga adalah agar keuntungan luar biasa berasal dari penciptaan nilai dan kompetisi, bukan dari rente, monopoli, atau akses politik. Dengan kata lain, ketimpangan yang berasal dari inovasi produktif mempunyai implikasi berbeda dari ketimpangan yang berasal dari privilese kelembagaan.

Pada tingkat rumah tangga, manfaat pertumbuhan seharusnya terlihat melalui kombinasi peningkatan pendapatan riil, stabilitas pekerjaan, akses pelayanan publik, dan kemampuan menabung atau memiliki aset. Jika kenaikan pendapatan nominal habis oleh biaya perumahan, transportasi, pendidikan, atau kesehatan, pengalaman kesejahteraan dapat tertinggal dari statistik makro. Karena itu, ukuran distribusi perlu menggabungkan pendapatan dengan biaya hidup dan kualitas layanan yang diterima.

Pada tingkat perusahaan, pertumbuhan inklusif berarti semakin banyak perusahaan produktif mampu memasuki pasar, tumbuh, dan menghubungkan diri dengan rantai nilai yang lebih besar. Ekonomi yang didominasi sedikit perusahaan sangat produktif dan banyak usaha mikro berproduktivitas rendah akan menghasilkan dualisme. Kebijakan harus memfasilitasi transisi perusahaan dari mikro menuju kecil dan

menengah melalui pembiayaan, manajemen, teknologi, standardisasi, dan akses pasar, bukan hanya memberikan bantuan yang mempertahankan skala kecil.

Pada tingkat daerah, daya beli dan biaya layanan harus dianalisis bersama. Daerah yang telah memiliki infrastruktur, tenaga terampil, pasar besar, dan jaringan pemasok cenderung terus menarik investasi sehingga muncul efek aglomerasi. Efisiensi aglomerasi penting, tetapi negara juga perlu mengurangi biaya konektivitas dan membangun kapasitas kota serta kawasan di luar pusat lama. Pemerataan spasial tidak berarti menyebarkan seluruh aktivitas secara sama, melainkan menciptakan cukup banyak pusat pertumbuhan agar penduduk mempunyai pilihan ekonomi tanpa harus selalu berpindah ke metropolitan utama.

Implikasi kebijakan dari pembahasan ini adalah perlunya evaluasi distributif pada setiap kebijakan utama. Pemerintah perlu menilai siapa penerima manfaat langsung dan tidak langsung, siapa menanggung biaya fiskal atau lingkungan, apakah kebijakan memperkuat kompetisi, serta apakah terdapat mekanisme koreksi jika manfaat terlalu terkonsentrasi. Pendekatan ini bukan anti-pertumbuhan. Justru distribusi yang lebih luas dapat memperbesar pasar domestik, memperkuat modal manusia, dan menciptakan dukungan politik bagi reformasi produktivitas.

Karena itu, keberhasilan pada tema ini perlu diuji melalui perubahan yang dapat diamati pada daya beli, aset rumah tangga, utang, biaya layanan, dan mobilitas. Pertanyaan yang tepat bukan hanya apakah indikator rata-rata membaik, tetapi apakah kelompok bawah bergerak lebih cepat, apakah kelas menengah menjadi lebih aman, apakah pekerja memperoleh bagian dari produktivitas, dan apakah keuntungan ekonomi semakin bergantung pada inovasi dibanding akses khusus. Inilah perbedaan antara pertumbuhan yang sekadar terjadi dan pembangunan yang memperluas kemampuan masyarakat.

8. Dunia Kerja sebagai Kanal Distribusi Utama

Bagi sebagian besar masyarakat, pertumbuhan dinikmati terutama melalui pekerjaan dan upah, bukan melalui kepemilikan saham atau aset finansial. Dalam ekonomi politik, distribusi manfaat tidak terjadi setelah pertumbuhan selesai; distribusi dibentuk sejak proses produksi, pengaturan pasar, dan penetapan hak atas aset. Dalam konteks ini, employment, wages, dan hours menjadi jalur penting yang menghubungkan aktivitas ekonomi dengan kesejahteraan. Karena Indonesia sangat beragam dalam struktur wilayah, pendidikan, kepemilikan aset, dan kesempatan kerja, satu angka nasional dapat menggambarkan arah umum tetapi tidak cukup menjelaskan pengalaman masyarakat. Analisis perlu bergerak sampai ke tingkat kelompok pendapatan, pekerjaan, gender, generasi, dan daerah.

Dimensi employment menunjukkan bahwa posisi awal sangat menentukan. Rumah tangga yang memiliki modal, tanah, pendidikan tinggi, jaringan bisnis, atau pekerjaan formal biasanya lebih mudah menangkap peluang baru. Sebaliknya, kelompok dengan aset terbatas sering harus menggunakan tambahan pendapatan untuk menutup kebutuhan dasar atau membayar utang. Akibatnya, tingkat pertumbuhan yang sama dapat menghasilkan akumulasi kekayaan yang sangat berbeda. Kebijakan publik harus menyadari efek kumulatif ini karena ketimpangan hari ini dapat menjadi ketimpangan kesempatan esok hari.

Dimensi wages berkaitan dengan kekuatan tawar. Dalam pasar yang ideal, produktivitas dan kompetisi mendorong pembagian manfaat yang relatif efisien. Dalam praktik, informasi tidak sempurna, pasar dapat terkonsentrasi, dan pekerja atau pemasok kecil sering menghadapi pilihan terbatas. Ketika posisi

tawar tidak seimbang, kenaikan nilai tambah dapat lebih banyak menjadi margin keuntungan daripada upah atau harga yang diterima produsen kecil. Institusi persaingan, hukum kontrak, organisasi pekerja, dan keterbukaan informasi karena itu memengaruhi distribusi hasil.

Dimensi hours memperlihatkan peran negara sebagai pembentuk distribusi sebelum dan sesudah pasar. Sebelum pasar, negara memengaruhi kualitas pendidikan, kesehatan, infrastruktur, hak atas tanah, dan aturan kompetisi. Setelah pasar, negara menggunakan pajak, transfer, subsidi, dan layanan publik untuk memodifikasi hasil. Perdebatan tentang pemerataan sering terlalu berfokus pada redistribusi setelah pendapatan terbentuk, padahal kebijakan yang membentuk kesempatan awal dapat lebih efektif dan lebih bermartabat dalam jangka panjang.

Selanjutnya, social protection menuntut perhatian terhadap waktu. Kelompok yang tidak menikmati manfaat sekarang mungkin dapat memperoleh manfaat di masa depan apabila pertumbuhan menghasilkan investasi, keterampilan, dan pasar baru. Namun janji tersebut hanya kredibel jika terdapat mekanisme nyata yang menghubungkan pertumbuhan hari ini dengan kesempatan esok hari. Tanpa jalur mobilitas, masyarakat akan melihat pertumbuhan sebagai keuntungan bagi kelompok lain. Persepsi semacam itu dapat menurunkan kepercayaan dan dukungan terhadap reformasi.

Dimensi career mobility menekankan bahwa distribusi yang baik tidak sama dengan membagi hasil secara seragam. Pembangunan membutuhkan insentif bagi inovasi, investasi, kewirausahaan, dan pengambilan risiko. Yang perlu dijaga adalah agar keuntungan luar biasa berasal dari penciptaan nilai dan kompetisi, bukan dari rente, monopoli, atau akses politik. Dengan kata lain, ketimpangan yang berasal dari inovasi produktif mempunyai implikasi berbeda dari ketimpangan yang berasal dari privilese kelembagaan.

Pada tingkat rumah tangga, manfaat pertumbuhan seharusnya terlihat melalui kombinasi peningkatan pendapatan riil, stabilitas pekerjaan, akses pelayanan publik, dan kemampuan menabung atau memiliki aset. Jika kenaikan pendapatan nominal habis oleh biaya perumahan, transportasi, pendidikan, atau kesehatan, pengalaman kesejahteraan dapat tertinggal dari statistik makro. Karena itu, ukuran distribusi perlu menggabungkan pendapatan dengan biaya hidup dan kualitas layanan yang diterima.

Pada tingkat perusahaan, pertumbuhan inklusif berarti semakin banyak perusahaan produktif mampu memasuki pasar, tumbuh, dan menghubungkan diri dengan rantai nilai yang lebih besar. Ekonomi yang didominasi sedikit perusahaan sangat produktif dan banyak usaha mikro berproduktivitas rendah akan menghasilkan dualisme. Kebijakan harus memfasilitasi transisi perusahaan dari mikro menuju kecil dan menengah melalui pembiayaan, manajemen, teknologi, standardisasi, dan akses pasar, bukan hanya memberikan bantuan yang mempertahankan skala kecil.

Pada tingkat daerah, employment dan social protection harus dianalisis bersama. Daerah yang telah memiliki infrastruktur, tenaga terampil, pasar besar, dan jaringan pemasok cenderung terus menarik investasi sehingga muncul efek aglomerasi. Efisiensi aglomerasi penting, tetapi negara juga perlu mengurangi biaya konektivitas dan membangun kapasitas kota serta kawasan di luar pusat lama. Pemerataan spasial tidak berarti menyebarkan seluruh aktivitas secara sama, melainkan menciptakan cukup banyak pusat pertumbuhan agar penduduk mempunyai pilihan ekonomi tanpa harus selalu berpindah ke metropolitan utama.

Implikasi kebijakan dari pembahasan ini adalah perlunya evaluasi distributif pada setiap kebijakan utama. Pemerintah perlu menilai siapa penerima manfaat langsung dan tidak langsung, siapa

menanggung biaya fiskal atau lingkungan, apakah kebijakan memperkuat kompetisi, serta apakah terdapat mekanisme koreksi jika manfaat terlalu terkonsentrasi. Pendekatan ini bukan anti-pertumbuhan. Justru distribusi yang lebih luas dapat memperbesar pasar domestik, memperkuat modal manusia, dan menciptakan dukungan politik bagi reformasi produktivitas.

Karena itu, keberhasilan pada tema ini perlu diuji melalui perubahan yang dapat diamati pada employment, wages, hours, social protection, dan career mobility. Pertanyaan yang tepat bukan hanya apakah indikator rata-rata membaik, tetapi apakah kelompok bawah bergerak lebih cepat, apakah kelas menengah menjadi lebih aman, apakah pekerja memperoleh bagian dari produktivitas, dan apakah keuntungan ekonomi semakin bergantung pada inovasi dibanding akses khusus. Inilah perbedaan antara pertumbuhan yang sekadar terjadi dan pembangunan yang memperluas kemampuan masyarakat.

9. Pengangguran Rendah Belum Berarti Pekerjaan Berkualitas

TPT 4,65 persen perlu dibaca bersama informalitas, jam kerja, kepastian kerja, keselamatan, dan peluang peningkatan kompetensi. Cara masyarakat menikmati pertumbuhan ditentukan oleh posisi mereka dalam pasar kerja, kepemilikan aset, akses kepada layanan, dan kemampuan memengaruhi aturan. Dalam konteks ini, informalitas, underemployment, dan job security menjadi jalur penting yang menghubungkan aktivitas ekonomi dengan kesejahteraan. Karena Indonesia sangat beragam dalam struktur wilayah, pendidikan, kepemilikan aset, dan kesempatan kerja, satu angka nasional dapat menggambarkan arah umum tetapi tidak cukup menjelaskan pengalaman masyarakat. Analisis perlu bergerak sampai ke tingkat kelompok pendapatan, pekerjaan, gender, generasi, dan daerah.

Dimensi informalitas menunjukkan bahwa posisi awal sangat menentukan. Rumah tangga yang memiliki modal, tanah, pendidikan tinggi, jaringan bisnis, atau pekerjaan formal biasanya lebih mudah menangkap peluang baru. Sebaliknya, kelompok dengan aset terbatas sering harus menggunakan tambahan pendapatan untuk menutup kebutuhan dasar atau membayar utang. Akibatnya, tingkat pertumbuhan yang sama dapat menghasilkan akumulasi kekayaan yang sangat berbeda. Kebijakan publik harus menyadari efek kumulatif ini karena ketimpangan hari ini dapat menjadi ketimpangan kesempatan esok hari.

Dimensi underemployment berkaitan dengan kekuatan tawar. Dalam pasar yang ideal, produktivitas dan kompetisi mendorong pembagian manfaat yang relatif efisien. Dalam praktik, informasi tidak sempurna, pasar dapat terkonsentrasi, dan pekerja atau pemasok kecil sering menghadapi pilihan terbatas. Ketika posisi tawar tidak seimbang, kenaikan nilai tambah dapat lebih banyak menjadi margin keuntungan daripada upah atau harga yang diterima produsen kecil. Institusi persaingan, hukum kontrak, organisasi pekerja, dan keterbukaan informasi karena itu memengaruhi distribusi hasil.

Dimensi job security memperlihatkan peran negara sebagai pembentuk distribusi sebelum dan sesudah pasar. Sebelum pasar, negara memengaruhi kualitas pendidikan, kesehatan, infrastruktur, hak atas tanah, dan aturan kompetisi. Setelah pasar, negara menggunakan pajak, transfer, subsidi, dan layanan publik untuk memodifikasi hasil. Perdebatan tentang pemerataan sering terlalu berfokus pada redistribusi setelah pendapatan terbentuk, padahal kebijakan yang membentuk kesempatan awal dapat lebih efektif dan lebih bermartabat dalam jangka panjang.

Selanjutnya, decent work menuntut perhatian terhadap waktu. Kelompok yang tidak menikmati manfaat sekarang mungkin dapat memperoleh manfaat di masa depan apabila pertumbuhan menghasilkan

investasi, keterampilan, dan pasar baru. Namun janji tersebut hanya kredibel jika terdapat mekanisme nyata yang menghubungkan pertumbuhan hari ini dengan kesempatan esok hari. Tanpa jalur mobilitas, masyarakat akan melihat pertumbuhan sebagai keuntungan bagi kelompok lain. Persepsi semacam itu dapat menurunkan kepercayaan dan dukungan terhadap reformasi.

Dimensi skills menekankan bahwa distribusi yang baik tidak sama dengan membagi hasil secara seragam. Pembangunan membutuhkan insentif bagi inovasi, investasi, kewirausahaan, dan pengambilan risiko. Yang perlu dijaga adalah agar keuntungan luar biasa berasal dari penciptaan nilai dan kompetisi, bukan dari rente, monopoli, atau akses politik. Dengan kata lain, ketimpangan yang berasal dari inovasi produktif mempunyai implikasi berbeda dari ketimpangan yang berasal dari privilese kelembagaan.

Pada tingkat rumah tangga, manfaat pertumbuhan seharusnya terlihat melalui kombinasi peningkatan pendapatan riil, stabilitas pekerjaan, akses pelayanan publik, dan kemampuan menabung atau memiliki aset. Jika kenaikan pendapatan nominal habis oleh biaya perumahan, transportasi, pendidikan, atau kesehatan, pengalaman kesejahteraan dapat tertinggal dari statistik makro. Karena itu, ukuran distribusi perlu menggabungkan pendapatan dengan biaya hidup dan kualitas layanan yang diterima.

Pada tingkat perusahaan, pertumbuhan inklusif berarti semakin banyak perusahaan produktif mampu memasuki pasar, tumbuh, dan menghubungkan diri dengan rantai nilai yang lebih besar. Ekonomi yang didominasi sedikit perusahaan sangat produktif dan banyak usaha mikro berproduktivitas rendah akan menghasilkan dualisme. Kebijakan harus memfasilitasi transisi perusahaan dari mikro menuju kecil dan menengah melalui pembiayaan, manajemen, teknologi, standardisasi, dan akses pasar, bukan hanya memberikan bantuan yang mempertahankan skala kecil.

Pada tingkat daerah, informalitas dan decent work harus dianalisis bersama. Daerah yang telah memiliki infrastruktur, tenaga terampil, pasar besar, dan jaringan pemasok cenderung terus menarik investasi sehingga muncul efek aglomerasi. Efisiensi aglomerasi penting, tetapi negara juga perlu mengurangi biaya konektivitas dan membangun kapasitas kota serta kawasan di luar pusat lama. Pemerataan spasial tidak berarti menyebarkan seluruh aktivitas secara sama, melainkan menciptakan cukup banyak pusat pertumbuhan agar penduduk mempunyai pilihan ekonomi tanpa harus selalu berpindah ke metropolitan utama.

Implikasi kebijakan dari pembahasan ini adalah perlunya evaluasi distributif pada setiap kebijakan utama. Pemerintah perlu menilai siapa penerima manfaat langsung dan tidak langsung, siapa menanggung biaya fiskal atau lingkungan, apakah kebijakan memperkuat kompetisi, serta apakah terdapat mekanisme koreksi jika manfaat terlalu terkonsentrasi. Pendekatan ini bukan anti-pertumbuhan. Justru distribusi yang lebih luas dapat memperbesar pasar domestik, memperkuat modal manusia, dan menciptakan dukungan politik bagi reformasi produktivitas.

Karena itu, keberhasilan pada tema ini perlu diuji melalui perubahan yang dapat diamati pada informalitas, underemployment, job security, decent work, dan skills. Pertanyaan yang tepat bukan hanya apakah indikator rata-rata membaik, tetapi apakah kelompok bawah bergerak lebih cepat, apakah kelas menengah menjadi lebih aman, apakah pekerja memperoleh bagian dari produktivitas, dan apakah keuntungan ekonomi semakin bergantung pada inovasi dibanding akses khusus. Inilah perbedaan antara pertumbuhan yang sekadar terjadi dan pembangunan yang memperluas kemampuan masyarakat.

10. Upah dan Produktivitas

Kenaikan upah yang berkelanjutan membutuhkan produktivitas yang meningkat sekaligus institusi pasar kerja yang membuat pekerja memperoleh bagian wajar dari kenaikan tersebut. Pertanyaan distribusional harus memeriksa bukan hanya pendapatan saat ini, tetapi juga keamanan ekonomi dan kemampuan memperoleh peluang di masa depan. Dalam konteks ini, upah riil, produktivitas, dan minimum wage menjadi jalur penting yang menghubungkan aktivitas ekonomi dengan kesejahteraan. Karena Indonesia sangat beragam dalam struktur wilayah, pendidikan, kepemilikan aset, dan kesempatan kerja, satu angka nasional dapat menggambarkan arah umum tetapi tidak cukup menjelaskan pengalaman masyarakat. Analisis perlu bergerak sampai ke tingkat kelompok pendapatan, pekerjaan, gender, generasi, dan daerah.

Dimensi upah riil menunjukkan bahwa posisi awal sangat menentukan. Rumah tangga yang memiliki modal, tanah, pendidikan tinggi, jaringan bisnis, atau pekerjaan formal biasanya lebih mudah menangkap peluang baru. Sebaliknya, kelompok dengan aset terbatas sering harus menggunakan tambahan pendapatan untuk menutup kebutuhan dasar atau membayar utang. Akibatnya, tingkat pertumbuhan yang sama dapat menghasilkan akumulasi kekayaan yang sangat berbeda. Kebijakan publik harus menyadari efek kumulatif ini karena ketimpangan hari ini dapat menjadi ketimpangan kesempatan esok hari.

Dimensi produktivitas berkaitan dengan kekuatan tawar. Dalam pasar yang ideal, produktivitas dan kompetisi mendorong pembagian manfaat yang relatif efisien. Dalam praktik, informasi tidak sempurna, pasar dapat terkonsentrasi, dan pekerja atau pemasok kecil sering menghadapi pilihan terbatas. Ketika posisi tawar tidak seimbang, kenaikan nilai tambah dapat lebih banyak menjadi margin keuntungan daripada upah atau harga yang diterima produsen kecil. Institusi persaingan, hukum kontrak, organisasi pekerja, dan keterbukaan informasi karena itu memengaruhi distribusi hasil.

Dimensi minimum wage memperlihatkan peran negara sebagai pembentuk distribusi sebelum dan sesudah pasar. Sebelum pasar, negara memengaruhi kualitas pendidikan, kesehatan, infrastruktur, hak atas tanah, dan aturan kompetisi. Setelah pasar, negara menggunakan pajak, transfer, subsidi, dan layanan publik untuk memodifikasi hasil. Perdebatan tentang pemerataan sering terlalu berfokus pada redistribusi setelah pendapatan terbentuk, padahal kebijakan yang membentuk kesempatan awal dapat lebih efektif dan lebih bermartabat dalam jangka panjang.

Selanjutnya, bargaining menuntut perhatian terhadap waktu. Kelompok yang tidak menikmati manfaat sekarang mungkin dapat memperoleh manfaat di masa depan apabila pertumbuhan menghasilkan investasi, keterampilan, dan pasar baru. Namun janji tersebut hanya kredibel jika terdapat mekanisme nyata yang menghubungkan pertumbuhan hari ini dengan kesempatan esok hari. Tanpa jalur mobilitas, masyarakat akan melihat pertumbuhan sebagai keuntungan bagi kelompok lain. Persepsi semacam itu dapat menurunkan kepercayaan dan dukungan terhadap reformasi.

Dimensi profitability menekankan bahwa distribusi yang baik tidak sama dengan membagi hasil secara seragam. Pembangunan membutuhkan insentif bagi inovasi, investasi, kewirausahaan, dan pengambilan risiko. Yang perlu dijaga adalah agar keuntungan luar biasa berasal dari penciptaan nilai dan kompetisi, bukan dari rente, monopoli, atau akses politik. Dengan kata lain, ketimpangan yang berasal dari inovasi produktif mempunyai implikasi berbeda dari ketimpangan yang berasal dari privilese kelembagaan.

Pada tingkat rumah tangga, manfaat pertumbuhan seharusnya terlihat melalui kombinasi peningkatan pendapatan riil, stabilitas pekerjaan, akses pelayanan publik, dan kemampuan menabung atau memiliki aset. Jika kenaikan pendapatan nominal habis oleh biaya perumahan, transportasi, pendidikan, atau kesehatan, pengalaman kesejahteraan dapat tertinggal dari statistik makro. Karena itu, ukuran distribusi perlu menggabungkan pendapatan dengan biaya hidup dan kualitas layanan yang diterima.

Pada tingkat perusahaan, pertumbuhan inklusif berarti semakin banyak perusahaan produktif mampu memasuki pasar, tumbuh, dan menghubungkan diri dengan rantai nilai yang lebih besar. Ekonomi yang didominasi sedikit perusahaan sangat produktif dan banyak usaha mikro berproduktivitas rendah akan menghasilkan dualisme. Kebijakan harus memfasilitasi transisi perusahaan dari mikro menuju kecil dan menengah melalui pembiayaan, manajemen, teknologi, standardisasi, dan akses pasar, bukan hanya memberikan bantuan yang mempertahankan skala kecil.

Pada tingkat daerah, upah riil dan bargaining harus dianalisis bersama. Daerah yang telah memiliki infrastruktur, tenaga terampil, pasar besar, dan jaringan pemasok cenderung terus menarik investasi sehingga muncul efek aglomerasi. Efisiensi aglomerasi penting, tetapi negara juga perlu mengurangi biaya konektivitas dan membangun kapasitas kota serta kawasan di luar pusat lama. Pemerataan spasial tidak berarti menyebarkan seluruh aktivitas secara sama, melainkan menciptakan cukup banyak pusat pertumbuhan agar penduduk mempunyai pilihan ekonomi tanpa harus selalu berpindah ke metropolitan utama.

Implikasi kebijakan dari pembahasan ini adalah perlunya evaluasi distributif pada setiap kebijakan utama. Pemerintah perlu menilai siapa penerima manfaat langsung dan tidak langsung, siapa menanggung biaya fiskal atau lingkungan, apakah kebijakan memperkuat kompetisi, serta apakah terdapat mekanisme koreksi jika manfaat terlalu terkonsentrasi. Pendekatan ini bukan anti-pertumbuhan. Justru distribusi yang lebih luas dapat memperbesar pasar domestik, memperkuat modal manusia, dan menciptakan dukungan politik bagi reformasi produktivitas.

Karena itu, keberhasilan pada tema ini perlu diuji melalui perubahan yang dapat diamati pada upah riil, produktivitas, minimum wage, bargaining, dan profitability. Pertanyaan yang tepat bukan hanya apakah indikator rata-rata membaik, tetapi apakah kelompok bawah bergerak lebih cepat, apakah kelas menengah menjadi lebih aman, apakah pekerja memperoleh bagian dari produktivitas, dan apakah keuntungan ekonomi semakin bergantung pada inovasi dibanding akses khusus. Inilah perbedaan antara pertumbuhan yang sekadar terjadi dan pembangunan yang memperluas kemampuan masyarakat.

11. Pekerja Informal dan Ekonomi Dua Kecepatan

Pekerja informal sering menjadi bantalan penyerapan tenaga kerja, tetapi menghadapi pendapatan volatil, perlindungan rendah, dan akses pembiayaan terbatas. Perbedaan antara penciptaan nilai dan pembagian nilai merupakan inti analisis karena sektor yang tumbuh cepat belum tentu mempunyai keterkaitan luas dengan rumah tangga. Dalam konteks ini, self-employment, micro firms, dan insurance menjadi jalur penting yang menghubungkan aktivitas ekonomi dengan kesejahteraan. Karena Indonesia sangat beragam dalam struktur wilayah, pendidikan, kepemilikan aset, dan kesempatan kerja, satu angka nasional dapat menggambarkan arah umum tetapi tidak cukup menjelaskan pengalaman masyarakat. Analisis perlu bergerak sampai ke tingkat kelompok pendapatan, pekerjaan, gender, generasi, dan daerah.

Dimensi self-employment menunjukkan bahwa posisi awal sangat menentukan. Rumah tangga yang memiliki modal, tanah, pendidikan tinggi, jaringan bisnis, atau pekerjaan formal biasanya lebih mudah menangkap peluang baru. Sebaliknya, kelompok dengan aset terbatas sering harus menggunakan tambahan pendapatan untuk menutup kebutuhan dasar atau membayar utang. Akibatnya, tingkat pertumbuhan yang sama dapat menghasilkan akumulasi kekayaan yang sangat berbeda. Kebijakan publik harus menyadari efek kumulatif ini karena ketimpangan hari ini dapat menjadi ketimpangan kesempatan esok hari.

Dimensi micro firms berkaitan dengan kekuatan tawar. Dalam pasar yang ideal, produktivitas dan kompetisi mendorong pembagian manfaat yang relatif efisien. Dalam praktik, informasi tidak sempurna, pasar dapat terkonsentrasi, dan pekerja atau pemasok kecil sering menghadapi pilihan terbatas. Ketika posisi tawar tidak seimbang, kenaikan nilai tambah dapat lebih banyak menjadi margin keuntungan daripada upah atau harga yang diterima produsen kecil. Institusi persaingan, hukum kontrak, organisasi pekerja, dan keterbukaan informasi karena itu memengaruhi distribusi hasil.

Dimensi insurance memperlihatkan peran negara sebagai pembentuk distribusi sebelum dan sesudah pasar. Sebelum pasar, negara memengaruhi kualitas pendidikan, kesehatan, infrastruktur, hak atas tanah, dan aturan kompetisi. Setelah pasar, negara menggunakan pajak, transfer, subsidi, dan layanan publik untuk memodifikasi hasil. Perdebatan tentang pemerataan sering terlalu berfokus pada redistribusi setelah pendapatan terbentuk, padahal kebijakan yang membentuk kesempatan awal dapat lebih efektif dan lebih bermartabat dalam jangka panjang.

Selanjutnya, credit menuntut perhatian terhadap waktu. Kelompok yang tidak menikmati manfaat sekarang mungkin dapat memperoleh manfaat di masa depan apabila pertumbuhan menghasilkan investasi, keterampilan, dan pasar baru. Namun janji tersebut hanya kredibel jika terdapat mekanisme nyata yang menghubungkan pertumbuhan hari ini dengan kesempatan esok hari. Tanpa jalur mobilitas, masyarakat akan melihat pertumbuhan sebagai keuntungan bagi kelompok lain. Persepsi semacam itu dapat menurunkan kepercayaan dan dukungan terhadap reformasi.

Dimensi formalization menekankan bahwa distribusi yang baik tidak sama dengan membagi hasil secara seragam. Pembangunan membutuhkan insentif bagi inovasi, investasi, kewirausahaan, dan pengambilan risiko. Yang perlu dijaga adalah agar keuntungan luar biasa berasal dari penciptaan nilai dan kompetisi, bukan dari rente, monopoli, atau akses politik. Dengan kata lain, ketimpangan yang berasal dari inovasi produktif mempunyai implikasi berbeda dari ketimpangan yang berasal dari privilese kelembagaan.

Pada tingkat rumah tangga, manfaat pertumbuhan seharusnya terlihat melalui kombinasi peningkatan pendapatan riil, stabilitas pekerjaan, akses pelayanan publik, dan kemampuan menabung atau memiliki aset. Jika kenaikan pendapatan nominal habis oleh biaya perumahan, transportasi, pendidikan, atau kesehatan, pengalaman kesejahteraan dapat tertinggal dari statistik makro. Karena itu, ukuran distribusi perlu menggabungkan pendapatan dengan biaya hidup dan kualitas layanan yang diterima.

Pada tingkat perusahaan, pertumbuhan inklusif berarti semakin banyak perusahaan produktif mampu memasuki pasar, tumbuh, dan menghubungkan diri dengan rantai nilai yang lebih besar. Ekonomi yang didominasi sedikit perusahaan sangat produktif dan banyak usaha mikro berproduktivitas rendah akan menghasilkan dualisme. Kebijakan harus memfasilitasi transisi perusahaan dari mikro menuju kecil dan menengah melalui pembiayaan, manajemen, teknologi, standardisasi, dan akses pasar, bukan hanya memberikan bantuan yang mempertahankan skala kecil.

Pada tingkat daerah, self-employment dan credit harus dianalisis bersama. Daerah yang telah memiliki infrastruktur, tenaga terampil, pasar besar, dan jaringan pemasok cenderung terus menarik investasi sehingga muncul efek aglomerasi. Efisiensi aglomerasi penting, tetapi negara juga perlu mengurangi biaya konektivitas dan membangun kapasitas kota serta kawasan di luar pusat lama. Pemerataan spasial tidak berarti menyebarkan seluruh aktivitas secara sama, melainkan menciptakan cukup banyak pusat pertumbuhan agar penduduk mempunyai pilihan ekonomi tanpa harus selalu berpindah ke metropolitan utama.

Implikasi kebijakan dari pembahasan ini adalah perlunya evaluasi distributif pada setiap kebijakan utama. Pemerintah perlu menilai siapa penerima manfaat langsung dan tidak langsung, siapa menanggung biaya fiskal atau lingkungan, apakah kebijakan memperkuat kompetisi, serta apakah terdapat mekanisme koreksi jika manfaat terlalu terkonsentrasi. Pendekatan ini bukan anti-pertumbuhan. Justru distribusi yang lebih luas dapat memperbesar pasar domestik, memperkuat modal manusia, dan menciptakan dukungan politik bagi reformasi produktivitas.

Karena itu, keberhasilan pada tema ini perlu diuji melalui perubahan yang dapat diamati pada self-employment, micro firms, insurance, credit, dan formalization. Pertanyaan yang tepat bukan hanya apakah indikator rata-rata membaik, tetapi apakah kelompok bawah bergerak lebih cepat, apakah kelas menengah menjadi lebih aman, apakah pekerja memperoleh bagian dari produktivitas, dan apakah keuntungan ekonomi semakin bergantung pada inovasi dibanding akses khusus. Inilah perbedaan antara pertumbuhan yang sekadar terjadi dan pembangunan yang memperluas kemampuan masyarakat.

12. Petani dan Pertumbuhan yang Tidak Simetris

Pertanian menyerap lebih dari seperempat tenaga kerja Indonesia, sehingga distribusi pertumbuhan sangat dipengaruhi produktivitas pertanian, kepemilikan lahan, harga input, dan rantai pemasaran. Dalam ekonomi politik, distribusi manfaat tidak terjadi setelah pertumbuhan selesai; distribusi dibentuk sejak proses produksi, pengaturan pasar, dan penetapan hak atas aset. Dalam konteks ini, petani kecil, lahan, dan harga pangan menjadi jalur penting yang menghubungkan aktivitas ekonomi dengan kesejahteraan. Karena Indonesia sangat beragam dalam struktur wilayah, pendidikan, kepemilikan aset, dan kesempatan kerja, satu angka nasional dapat menggambarkan arah umum tetapi tidak cukup menjelaskan pengalaman masyarakat. Analisis perlu bergerak sampai ke tingkat kelompok pendapatan, pekerjaan, gender, generasi, dan daerah.

Dimensi petani kecil menunjukkan bahwa posisi awal sangat menentukan. Rumah tangga yang memiliki modal, tanah, pendidikan tinggi, jaringan bisnis, atau pekerjaan formal biasanya lebih mudah menangkap peluang baru. Sebaliknya, kelompok dengan aset terbatas sering harus menggunakan tambahan pendapatan untuk menutup kebutuhan dasar atau membayar utang. Akibatnya, tingkat pertumbuhan yang sama dapat menghasilkan akumulasi kekayaan yang sangat berbeda. Kebijakan publik harus menyadari efek kumulatif ini karena ketimpangan hari ini dapat menjadi ketimpangan kesempatan esok hari.

Dimensi lahan berkaitan dengan kekuatan tawar. Dalam pasar yang ideal, produktivitas dan kompetisi mendorong pembagian manfaat yang relatif efisien. Dalam praktik, informasi tidak sempurna, pasar dapat terkonsentrasi, dan pekerja atau pemasok kecil sering menghadapi pilihan terbatas. Ketika posisi tawar tidak seimbang, kenaikan nilai tambah dapat lebih banyak menjadi margin keuntungan daripada

upah atau harga yang diterima produsen kecil. Institusi persaingan, hukum kontrak, organisasi pekerja, dan keterbukaan informasi karena itu memengaruhi distribusi hasil.

Dimensi harga pangan memperlihatkan peran negara sebagai pembentuk distribusi sebelum dan sesudah pasar. Sebelum pasar, negara memengaruhi kualitas pendidikan, kesehatan, infrastruktur, hak atas tanah, dan aturan kompetisi. Setelah pasar, negara menggunakan pajak, transfer, subsidi, dan layanan publik untuk memodifikasi hasil. Perdebatan tentang pemerataan sering terlalu berfokus pada redistribusi setelah pendapatan terbentuk, padahal kebijakan yang membentuk kesempatan awal dapat lebih efektif dan lebih bermartabat dalam jangka panjang.

Selanjutnya, middlemen menuntut perhatian terhadap waktu. Kelompok yang tidak menikmati manfaat sekarang mungkin dapat memperoleh manfaat di masa depan apabila pertumbuhan menghasilkan investasi, keterampilan, dan pasar baru. Namun janji tersebut hanya kredibel jika terdapat mekanisme nyata yang menghubungkan pertumbuhan hari ini dengan kesempatan esok hari. Tanpa jalur mobilitas, masyarakat akan melihat pertumbuhan sebagai keuntungan bagi kelompok lain. Persepsi semacam itu dapat menurunkan kepercayaan dan dukungan terhadap reformasi.

Dimensi agritech menekankan bahwa distribusi yang baik tidak sama dengan membagi hasil secara seragam. Pembangunan membutuhkan insentif bagi inovasi, investasi, kewirausahaan, dan pengambilan risiko. Yang perlu dijaga adalah agar keuntungan luar biasa berasal dari penciptaan nilai dan kompetisi, bukan dari rente, monopoli, atau akses politik. Dengan kata lain, ketimpangan yang berasal dari inovasi produktif mempunyai implikasi berbeda dari ketimpangan yang berasal dari privilese kelembagaan.

Pada tingkat rumah tangga, manfaat pertumbuhan seharusnya terlihat melalui kombinasi peningkatan pendapatan riil, stabilitas pekerjaan, akses pelayanan publik, dan kemampuan menabung atau memiliki aset. Jika kenaikan pendapatan nominal habis oleh biaya perumahan, transportasi, pendidikan, atau kesehatan, pengalaman kesejahteraan dapat tertinggal dari statistik makro. Karena itu, ukuran distribusi perlu menggabungkan pendapatan dengan biaya hidup dan kualitas layanan yang diterima.

Pada tingkat perusahaan, pertumbuhan inklusif berarti semakin banyak perusahaan produktif mampu memasuki pasar, tumbuh, dan menghubungkan diri dengan rantai nilai yang lebih besar. Ekonomi yang didominasi sedikit perusahaan sangat produktif dan banyak usaha mikro berproduktivitas rendah akan menghasilkan dualisme. Kebijakan harus memfasilitasi transisi perusahaan dari mikro menuju kecil dan menengah melalui pembiayaan, manajemen, teknologi, standardisasi, dan akses pasar, bukan hanya memberikan bantuan yang mempertahankan skala kecil.

Pada tingkat daerah, petani kecil dan middlemen harus dianalisis bersama. Daerah yang telah memiliki infrastruktur, tenaga terampil, pasar besar, dan jaringan pemasok cenderung terus menarik investasi sehingga muncul efek aglomerasi. Efisiensi aglomerasi penting, tetapi negara juga perlu mengurangi biaya konektivitas dan membangun kapasitas kota serta kawasan di luar pusat lama. Pemerataan spasial tidak berarti menyebarkan seluruh aktivitas secara sama, melainkan menciptakan cukup banyak pusat pertumbuhan agar penduduk mempunyai pilihan ekonomi tanpa harus selalu berpindah ke metropolitan utama.

Implikasi kebijakan dari pembahasan ini adalah perlunya evaluasi distributif pada setiap kebijakan utama. Pemerintah perlu menilai siapa penerima manfaat langsung dan tidak langsung, siapa menanggung biaya fiskal atau lingkungan, apakah kebijakan memperkuat kompetisi, serta apakah terdapat mekanisme koreksi jika manfaat terlalu terkonsentrasi. Pendekatan ini bukan anti-

pertumbuhan. Justru distribusi yang lebih luas dapat memperbesar pasar domestik, memperkuat modal manusia, dan menciptakan dukungan politik bagi reformasi produktivitas.

Karena itu, keberhasilan pada tema ini perlu diuji melalui perubahan yang dapat diamati pada petani kecil, lahan, harga pangan, middlemen, dan agritech. Pertanyaan yang tepat bukan hanya apakah indikator rata-rata membaik, tetapi apakah kelompok bawah bergerak lebih cepat, apakah kelas menengah menjadi lebih aman, apakah pekerja memperoleh bagian dari produktivitas, dan apakah keuntungan ekonomi semakin bergantung pada inovasi dibanding akses khusus. Inilah perbedaan antara pertumbuhan yang sekadar terjadi dan pembangunan yang memperluas kemampuan masyarakat.

13. Nelayan dan Ekonomi Maritim

Kelompok pesisir dapat berada dekat dengan sumber daya ekonomi besar namun tetap memiliki posisi tawar lemah dalam rantai nilai. Cara masyarakat menikmati pertumbuhan ditentukan oleh posisi mereka dalam pasar kerja, kepemilikan aset, akses kepada layanan, dan kemampuan memengaruhi aturan. Dalam konteks ini, akses laut, cold chain, dan pelabuhan menjadi jalur penting yang menghubungkan aktivitas ekonomi dengan kesejahteraan. Karena Indonesia sangat beragam dalam struktur wilayah, pendidikan, kepemilikan aset, dan kesempatan kerja, satu angka nasional dapat menggambarkan arah umum tetapi tidak cukup menjelaskan pengalaman masyarakat. Analisis perlu bergerak sampai ke tingkat kelompok pendapatan, pekerjaan, gender, generasi, dan daerah.

Dimensi akses laut menunjukkan bahwa posisi awal sangat menentukan. Rumah tangga yang memiliki modal, tanah, pendidikan tinggi, jaringan bisnis, atau pekerjaan formal biasanya lebih mudah menangkap peluang baru. Sebaliknya, kelompok dengan aset terbatas sering harus menggunakan tambahan pendapatan untuk menutup kebutuhan dasar atau membayar utang. Akibatnya, tingkat pertumbuhan yang sama dapat menghasilkan akumulasi kekayaan yang sangat berbeda. Kebijakan publik harus menyadari efek kumulatif ini karena ketimpangan hari ini dapat menjadi ketimpangan kesempatan esok hari.

Dimensi cold chain berkaitan dengan kekuatan tawar. Dalam pasar yang ideal, produktivitas dan kompetisi mendorong pembagian manfaat yang relatif efisien. Dalam praktik, informasi tidak sempurna, pasar dapat terkonsentrasi, dan pekerja atau pemasok kecil sering menghadapi pilihan terbatas. Ketika posisi tawar tidak seimbang, kenaikan nilai tambah dapat lebih banyak menjadi margin keuntungan daripada upah atau harga yang diterima produsen kecil. Institusi persaingan, hukum kontrak, organisasi pekerja, dan keterbukaan informasi karena itu memengaruhi distribusi hasil.

Dimensi pelabuhan memperlihatkan peran negara sebagai pembentuk distribusi sebelum dan sesudah pasar. Sebelum pasar, negara memengaruhi kualitas pendidikan, kesehatan, infrastruktur, hak atas tanah, dan aturan kompetisi. Setelah pasar, negara menggunakan pajak, transfer, subsidi, dan layanan publik untuk memodifikasi hasil. Perdebatan tentang pemerataan sering terlalu berfokus pada redistribusi setelah pendapatan terbentuk, padahal kebijakan yang membentuk kesempatan awal dapat lebih efektif dan lebih bermartabat dalam jangka panjang.

Selanjutnya, modal menuntut perhatian terhadap waktu. Kelompok yang tidak menikmati manfaat sekarang mungkin dapat memperoleh manfaat di masa depan apabila pertumbuhan menghasilkan investasi, keterampilan, dan pasar baru. Namun janji tersebut hanya kredibel jika terdapat mekanisme nyata yang menghubungkan pertumbuhan hari ini dengan kesempatan esok hari. Tanpa jalur mobilitas,

masyarakat akan melihat pertumbuhan sebagai keuntungan bagi kelompok lain. Persepsi semacam itu dapat menurunkan kepercayaan dan dukungan terhadap reformasi.

Dimensi blue economy menekankan bahwa distribusi yang baik tidak sama dengan membagi hasil secara seragam. Pembangunan membutuhkan insentif bagi inovasi, investasi, kewirausahaan, dan pengambilan risiko. Yang perlu dijaga adalah agar keuntungan luar biasa berasal dari penciptaan nilai dan kompetisi, bukan dari rente, monopoli, atau akses politik. Dengan kata lain, ketimpangan yang berasal dari inovasi produktif mempunyai implikasi berbeda dari ketimpangan yang berasal dari privilese kelembagaan.

Pada tingkat rumah tangga, manfaat pertumbuhan seharusnya terlihat melalui kombinasi peningkatan pendapatan riil, stabilitas pekerjaan, akses pelayanan publik, dan kemampuan menabung atau memiliki aset. Jika kenaikan pendapatan nominal habis oleh biaya perumahan, transportasi, pendidikan, atau kesehatan, pengalaman kesejahteraan dapat tertinggal dari statistik makro. Karena itu, ukuran distribusi perlu menggabungkan pendapatan dengan biaya hidup dan kualitas layanan yang diterima.

Pada tingkat perusahaan, pertumbuhan inklusif berarti semakin banyak perusahaan produktif mampu memasuki pasar, tumbuh, dan menghubungkan diri dengan rantai nilai yang lebih besar. Ekonomi yang didominasi sedikit perusahaan sangat produktif dan banyak usaha mikro berproduktivitas rendah akan menghasilkan dualisme. Kebijakan harus memfasilitasi transisi perusahaan dari mikro menuju kecil dan menengah melalui pembiayaan, manajemen, teknologi, standardisasi, dan akses pasar, bukan hanya memberikan bantuan yang mempertahankan skala kecil.

Pada tingkat daerah, akses laut dan modal harus dianalisis bersama. Daerah yang telah memiliki infrastruktur, tenaga terampil, pasar besar, dan jaringan pemasok cenderung terus menarik investasi sehingga muncul efek aglomerasi. Efisiensi aglomerasi penting, tetapi negara juga perlu mengurangi biaya konektivitas dan membangun kapasitas kota serta kawasan di luar pusat lama. Pemerataan spasial tidak berarti menyebarkan seluruh aktivitas secara sama, melainkan menciptakan cukup banyak pusat pertumbuhan agar penduduk mempunyai pilihan ekonomi tanpa harus selalu berpindah ke metropolitan utama.

Implikasi kebijakan dari pembahasan ini adalah perlunya evaluasi distributif pada setiap kebijakan utama. Pemerintah perlu menilai siapa penerima manfaat langsung dan tidak langsung, siapa menanggung biaya fiskal atau lingkungan, apakah kebijakan memperkuat kompetisi, serta apakah terdapat mekanisme koreksi jika manfaat terlalu terkonsentrasi. Pendekatan ini bukan anti-pertumbuhan. Justru distribusi yang lebih luas dapat memperbesar pasar domestik, memperkuat modal manusia, dan menciptakan dukungan politik bagi reformasi produktivitas.

Karena itu, keberhasilan pada tema ini perlu diuji melalui perubahan yang dapat diamati pada akses laut, cold chain, pelabuhan, modal, dan blue economy. Pertanyaan yang tepat bukan hanya apakah indikator rata-rata membaik, tetapi apakah kelompok bawah bergerak lebih cepat, apakah kelas menengah menjadi lebih aman, apakah pekerja memperoleh bagian dari produktivitas, dan apakah keuntungan ekonomi semakin bergantung pada inovasi dibanding akses khusus. Inilah perbedaan antara pertumbuhan yang sekadar terjadi dan pembangunan yang memperluas kemampuan masyarakat.

14. UMKM: Banyak Pelaku, Sedikit Nilai Tambah?

UMKM menyerap tenaga kerja dan menopang ekonomi lokal, tetapi pertumbuhan manfaat memerlukan produktivitas, skala, teknologi, dan integrasi rantai pasok. Pertanyaan distribusional harus memeriksa bukan hanya pendapatan saat ini, tetapi juga keamanan ekonomi dan kemampuan memperoleh peluang di masa depan. Dalam konteks ini, productivity, digitalization, dan finance menjadi jalur penting yang menghubungkan aktivitas ekonomi dengan kesejahteraan. Karena Indonesia sangat beragam dalam struktur wilayah, pendidikan, kepemilikan aset, dan kesempatan kerja, satu angka nasional dapat menggambarkan arah umum tetapi tidak cukup menjelaskan pengalaman masyarakat. Analisis perlu bergerak sampai ke tingkat kelompok pendapatan, pekerjaan, gender, generasi, dan daerah.

Dimensi productivity menunjukkan bahwa posisi awal sangat menentukan. Rumah tangga yang memiliki modal, tanah, pendidikan tinggi, jaringan bisnis, atau pekerjaan formal biasanya lebih mudah menangkap peluang baru. Sebaliknya, kelompok dengan aset terbatas sering harus menggunakan tambahan pendapatan untuk menutup kebutuhan dasar atau membayar utang. Akibatnya, tingkat pertumbuhan yang sama dapat menghasilkan akumulasi kekayaan yang sangat berbeda. Kebijakan publik harus menyadari efek kumulatif ini karena ketimpangan hari ini dapat menjadi ketimpangan kesempatan esok hari.

Dimensi digitalization berkaitan dengan kekuatan tawar. Dalam pasar yang ideal, produktivitas dan kompetisi mendorong pembagian manfaat yang relatif efisien. Dalam praktik, informasi tidak sempurna, pasar dapat terkonsentrasi, dan pekerja atau pemasok kecil sering menghadapi pilihan terbatas. Ketika posisi tawar tidak seimbang, kenaikan nilai tambah dapat lebih banyak menjadi margin keuntungan daripada upah atau harga yang diterima produsen kecil. Institusi persaingan, hukum kontrak, organisasi pekerja, dan keterbukaan informasi karena itu memengaruhi distribusi hasil.

Dimensi finance memperlihatkan peran negara sebagai pembentuk distribusi sebelum dan sesudah pasar. Sebelum pasar, negara memengaruhi kualitas pendidikan, kesehatan, infrastruktur, hak atas tanah, dan aturan kompetisi. Setelah pasar, negara menggunakan pajak, transfer, subsidi, dan layanan publik untuk memodifikasi hasil. Perdebatan tentang pemerataan sering terlalu berfokus pada redistribusi setelah pendapatan terbentuk, padahal kebijakan yang membentuk kesempatan awal dapat lebih efektif dan lebih bermartabat dalam jangka panjang.

Selanjutnya, standards menuntut perhatian terhadap waktu. Kelompok yang tidak menikmati manfaat sekarang mungkin dapat memperoleh manfaat di masa depan apabila pertumbuhan menghasilkan investasi, keterampilan, dan pasar baru. Namun janji tersebut hanya kredibel jika terdapat mekanisme nyata yang menghubungkan pertumbuhan hari ini dengan kesempatan esok hari. Tanpa jalur mobilitas, masyarakat akan melihat pertumbuhan sebagai keuntungan bagi kelompok lain. Persepsi semacam itu dapat menurunkan kepercayaan dan dukungan terhadap reformasi.

Dimensi market access menekankan bahwa distribusi yang baik tidak sama dengan membagi hasil secara seragam. Pembangunan membutuhkan insentif bagi inovasi, investasi, kewirausahaan, dan pengambilan risiko. Yang perlu dijaga adalah agar keuntungan luar biasa berasal dari penciptaan nilai dan kompetisi, bukan dari rente, monopoli, atau akses politik. Dengan kata lain, ketimpangan yang berasal dari inovasi produktif mempunyai implikasi berbeda dari ketimpangan yang berasal dari privilese kelembagaan.

Pada tingkat rumah tangga, manfaat pertumbuhan seharusnya terlihat melalui kombinasi peningkatan pendapatan riil, stabilitas pekerjaan, akses pelayanan publik, dan kemampuan menabung atau memiliki aset. Jika kenaikan pendapatan nominal habis oleh biaya perumahan, transportasi, pendidikan, atau kesehatan, pengalaman kesejahteraan dapat tertinggal dari statistik makro. Karena itu, ukuran distribusi perlu menggabungkan pendapatan dengan biaya hidup dan kualitas layanan yang diterima.

Pada tingkat perusahaan, pertumbuhan inklusif berarti semakin banyak perusahaan produktif mampu memasuki pasar, tumbuh, dan menghubungkan diri dengan rantai nilai yang lebih besar. Ekonomi yang didominasi sedikit perusahaan sangat produktif dan banyak usaha mikro berproduktivitas rendah akan menghasilkan dualisme. Kebijakan harus memfasilitasi transisi perusahaan dari mikro menuju kecil dan menengah melalui pembiayaan, manajemen, teknologi, standardisasi, dan akses pasar, bukan hanya memberikan bantuan yang mempertahankan skala kecil.

Pada tingkat daerah, productivity dan standards harus dianalisis bersama. Daerah yang telah memiliki infrastruktur, tenaga terampil, pasar besar, dan jaringan pemasok cenderung terus menarik investasi sehingga muncul efek aglomerasi. Efisiensi aglomerasi penting, tetapi negara juga perlu mengurangi biaya konektivitas dan membangun kapasitas kota serta kawasan di luar pusat lama. Pemerataan spasial tidak berarti menyebarkan seluruh aktivitas secara sama, melainkan menciptakan cukup banyak pusat pertumbuhan agar penduduk mempunyai pilihan ekonomi tanpa harus selalu berpindah ke metropolitan utama.

Implikasi kebijakan dari pembahasan ini adalah perlunya evaluasi distributif pada setiap kebijakan utama. Pemerintah perlu menilai siapa penerima manfaat langsung dan tidak langsung, siapa menanggung biaya fiskal atau lingkungan, apakah kebijakan memperkuat kompetisi, serta apakah terdapat mekanisme koreksi jika manfaat terlalu terkonsentrasi. Pendekatan ini bukan anti-pertumbuhan. Justru distribusi yang lebih luas dapat memperbesar pasar domestik, memperkuat modal manusia, dan menciptakan dukungan politik bagi reformasi produktivitas.

Karena itu, keberhasilan pada tema ini perlu diuji melalui perubahan yang dapat diamati pada productivity, digitalization, finance, standards, dan market access. Pertanyaan yang tepat bukan hanya apakah indikator rata-rata membaik, tetapi apakah kelompok bawah bergerak lebih cepat, apakah kelas menengah menjadi lebih aman, apakah pekerja memperoleh bagian dari produktivitas, dan apakah keuntungan ekonomi semakin bergantung pada inovasi dibanding akses khusus. Inilah perbedaan antara pertumbuhan yang sekadar terjadi dan pembangunan yang memperluas kemampuan masyarakat.

15. Perusahaan Besar dan Konsentrasi Keuntungan

Perusahaan besar memperoleh manfaat dari skala, teknologi, akses modal, dan jaringan, tetapi konsentrasi pasar yang berlebihan dapat mengurangi kompetisi dan menyempitkan distribusi keuntungan. Perbedaan antara penciptaan nilai dan pembagian nilai merupakan inti analisis karena sektor yang tumbuh cepat belum tentu mempunyai keterkaitan luas dengan rumah tangga. Dalam konteks ini, market concentration, entry barriers, dan competition menjadi jalur penting yang menghubungkan aktivitas ekonomi dengan kesejahteraan. Karena Indonesia sangat beragam dalam struktur wilayah, pendidikan, kepemilikan aset, dan kesempatan kerja, satu angka nasional dapat menggambarkan arah umum tetapi tidak cukup menjelaskan pengalaman masyarakat. Analisis perlu bergerak sampai ke tingkat kelompok pendapatan, pekerjaan, gender, generasi, dan daerah.

Dimensi market concentration menunjukkan bahwa posisi awal sangat menentukan. Rumah tangga yang memiliki modal, tanah, pendidikan tinggi, jaringan bisnis, atau pekerjaan formal biasanya lebih mudah menangkap peluang baru. Sebaliknya, kelompok dengan aset terbatas sering harus menggunakan tambahan pendapatan untuk menutup kebutuhan dasar atau membayar utang. Akibatnya, tingkat pertumbuhan yang sama dapat menghasilkan akumulasi kekayaan yang sangat berbeda. Kebijakan publik harus menyadari efek kumulatif ini karena ketimpangan hari ini dapat menjadi ketimpangan kesempatan esok hari.

Dimensi entry barriers berkaitan dengan kekuatan tawar. Dalam pasar yang ideal, produktivitas dan kompetisi mendorong pembagian manfaat yang relatif efisien. Dalam praktik, informasi tidak sempurna, pasar dapat terkonsentrasi, dan pekerja atau pemasok kecil sering menghadapi pilihan terbatas. Ketika posisi tawar tidak seimbang, kenaikan nilai tambah dapat lebih banyak menjadi margin keuntungan daripada upah atau harga yang diterima produsen kecil. Institusi persaingan, hukum kontrak, organisasi pekerja, dan keterbukaan informasi karena itu memengaruhi distribusi hasil.

Dimensi competition memperlihatkan peran negara sebagai pembentuk distribusi sebelum dan sesudah pasar. Sebelum pasar, negara memengaruhi kualitas pendidikan, kesehatan, infrastruktur, hak atas tanah, dan aturan kompetisi. Setelah pasar, negara menggunakan pajak, transfer, subsidi, dan layanan publik untuk memodifikasi hasil. Perdebatan tentang pemerataan sering terlalu berfokus pada redistribusi setelah pendapatan terbentuk, padahal kebijakan yang membentuk kesempatan awal dapat lebih efektif dan lebih bermartabat dalam jangka panjang.

Selanjutnya, capital access menuntut perhatian terhadap waktu. Kelompok yang tidak menikmati manfaat sekarang mungkin dapat memperoleh manfaat di masa depan apabila pertumbuhan menghasilkan investasi, keterampilan, dan pasar baru. Namun janji tersebut hanya kredibel jika terdapat mekanisme nyata yang menghubungkan pertumbuhan hari ini dengan kesempatan esok hari. Tanpa jalur mobilitas, masyarakat akan melihat pertumbuhan sebagai keuntungan bagi kelompok lain. Persepsi semacam itu dapat menurunkan kepercayaan dan dukungan terhadap reformasi.

Dimensi corporate power menekankan bahwa distribusi yang baik tidak sama dengan membagi hasil secara seragam. Pembangunan membutuhkan insentif bagi inovasi, investasi, kewirausahaan, dan pengambilan risiko. Yang perlu dijaga adalah agar keuntungan luar biasa berasal dari penciptaan nilai dan kompetisi, bukan dari rente, monopoli, atau akses politik. Dengan kata lain, ketimpangan yang berasal dari inovasi produktif mempunyai implikasi berbeda dari ketimpangan yang berasal dari privilese kelembagaan.

Pada tingkat rumah tangga, manfaat pertumbuhan seharusnya terlihat melalui kombinasi peningkatan pendapatan riil, stabilitas pekerjaan, akses pelayanan publik, dan kemampuan menabung atau memiliki aset. Jika kenaikan pendapatan nominal habis oleh biaya perumahan, transportasi, pendidikan, atau kesehatan, pengalaman kesejahteraan dapat tertinggal dari statistik makro. Karena itu, ukuran distribusi perlu menggabungkan pendapatan dengan biaya hidup dan kualitas layanan yang diterima.

Pada tingkat perusahaan, pertumbuhan inklusif berarti semakin banyak perusahaan produktif mampu memasuki pasar, tumbuh, dan menghubungkan diri dengan rantai nilai yang lebih besar. Ekonomi yang didominasi sedikit perusahaan sangat produktif dan banyak usaha mikro berproduktivitas rendah akan menghasilkan dualisme. Kebijakan harus memfasilitasi transisi perusahaan dari mikro menuju kecil dan

menengah melalui pembiayaan, manajemen, teknologi, standardisasi, dan akses pasar, bukan hanya memberikan bantuan yang mempertahankan skala kecil.

Pada tingkat daerah, market concentration dan capital access harus dianalisis bersama. Daerah yang telah memiliki infrastruktur, tenaga terampil, pasar besar, dan jaringan pemasok cenderung terus menarik investasi sehingga muncul efek aglomerasi. Efisiensi aglomerasi penting, tetapi negara juga perlu mengurangi biaya konektivitas dan membangun kapasitas kota serta kawasan di luar pusat lama. Pemerataan spasial tidak berarti menyebarkan seluruh aktivitas secara sama, melainkan menciptakan cukup banyak pusat pertumbuhan agar penduduk mempunyai pilihan ekonomi tanpa harus selalu berpindah ke metropolitan utama.

Implikasi kebijakan dari pembahasan ini adalah perlunya evaluasi distributif pada setiap kebijakan utama. Pemerintah perlu menilai siapa penerima manfaat langsung dan tidak langsung, siapa menanggung biaya fiskal atau lingkungan, apakah kebijakan memperkuat kompetisi, serta apakah terdapat mekanisme koreksi jika manfaat terlalu terkonsentrasi. Pendekatan ini bukan anti-pertumbuhan. Justru distribusi yang lebih luas dapat memperbesar pasar domestik, memperkuat modal manusia, dan menciptakan dukungan politik bagi reformasi produktivitas.

Karena itu, keberhasilan pada tema ini perlu diuji melalui perubahan yang dapat diamati pada market concentration, entry barriers, competition, capital access, dan corporate power. Pertanyaan yang tepat bukan hanya apakah indikator rata-rata membaik, tetapi apakah kelompok bawah bergerak lebih cepat, apakah kelas menengah menjadi lebih aman, apakah pekerja memperoleh bagian dari produktivitas, dan apakah keuntungan ekonomi semakin bergantung pada inovasi dibanding akses khusus. Inilah perbedaan antara pertumbuhan yang sekadar terjadi dan pembangunan yang memperluas kemampuan masyarakat.

16. Pemilik Modal dan Pertumbuhan Aset

Pertumbuhan ekonomi dapat lebih cepat meningkatkan kekayaan pemilik aset daripada pendapatan pekerja apabila harga tanah, properti, saham, dan instrumen keuangan naik. Dalam ekonomi politik, distribusi manfaat tidak terjadi setelah pertumbuhan selesai; distribusi dibentuk sejak proses produksi, pengaturan pasar, dan penetapan hak atas aset. Dalam konteks ini, wealth inequality, property, dan equities menjadi jalur penting yang menghubungkan aktivitas ekonomi dengan kesejahteraan. Karena Indonesia sangat beragam dalam struktur wilayah, pendidikan, kepemilikan aset, dan kesempatan kerja, satu angka nasional dapat menggambarkan arah umum tetapi tidak cukup menjelaskan pengalaman masyarakat. Analisis perlu bergerak sampai ke tingkat kelompok pendapatan, pekerjaan, gender, generasi, dan daerah.

Dimensi wealth inequality menunjukkan bahwa posisi awal sangat menentukan. Rumah tangga yang memiliki modal, tanah, pendidikan tinggi, jaringan bisnis, atau pekerjaan formal biasanya lebih mudah menangkap peluang baru. Sebaliknya, kelompok dengan aset terbatas sering harus menggunakan tambahan pendapatan untuk menutup kebutuhan dasar atau membayar utang. Akibatnya, tingkat pertumbuhan yang sama dapat menghasilkan akumulasi kekayaan yang sangat berbeda. Kebijakan publik harus menyadari efek kumulatif ini karena ketimpangan hari ini dapat menjadi ketimpangan kesempatan esok hari.

Dimensi property berkaitan dengan kekuatan tawar. Dalam pasar yang ideal, produktivitas dan kompetisi mendorong pembagian manfaat yang relatif efisien. Dalam praktik, informasi tidak sempurna, pasar dapat terkonsentrasi, dan pekerja atau pemasok kecil sering menghadapi pilihan terbatas. Ketika posisi tawar tidak seimbang, kenaikan nilai tambah dapat lebih banyak menjadi margin keuntungan daripada upah atau harga yang diterima produsen kecil. Institusi persaingan, hukum kontrak, organisasi pekerja, dan keterbukaan informasi karena itu memengaruhi distribusi hasil.

Dimensi equities memperlihatkan peran negara sebagai pembentuk distribusi sebelum dan sesudah pasar. Sebelum pasar, negara memengaruhi kualitas pendidikan, kesehatan, infrastruktur, hak atas tanah, dan aturan kompetisi. Setelah pasar, negara menggunakan pajak, transfer, subsidi, dan layanan publik untuk memodifikasi hasil. Perdebatan tentang pemerataan sering terlalu berfokus pada redistribusi setelah pendapatan terbentuk, padahal kebijakan yang membentuk kesempatan awal dapat lebih efektif dan lebih bermartabat dalam jangka panjang.

Selanjutnya, capital gains menuntut perhatian terhadap waktu. Kelompok yang tidak menikmati manfaat sekarang mungkin dapat memperoleh manfaat di masa depan apabila pertumbuhan menghasilkan investasi, keterampilan, dan pasar baru. Namun janji tersebut hanya kredibel jika terdapat mekanisme nyata yang menghubungkan pertumbuhan hari ini dengan kesempatan esok hari. Tanpa jalur mobilitas, masyarakat akan melihat pertumbuhan sebagai keuntungan bagi kelompok lain. Persepsi semacam itu dapat menurunkan kepercayaan dan dukungan terhadap reformasi.

Dimensi inheritance menekankan bahwa distribusi yang baik tidak sama dengan membagi hasil secara seragam. Pembangunan membutuhkan insentif bagi inovasi, investasi, kewirausahaan, dan pengambilan risiko. Yang perlu dijaga adalah agar keuntungan luar biasa berasal dari penciptaan nilai dan kompetisi, bukan dari rente, monopoli, atau akses politik. Dengan kata lain, ketimpangan yang berasal dari inovasi produktif mempunyai implikasi berbeda dari ketimpangan yang berasal dari privilese kelembagaan.

Pada tingkat rumah tangga, manfaat pertumbuhan seharusnya terlihat melalui kombinasi peningkatan pendapatan riil, stabilitas pekerjaan, akses pelayanan publik, dan kemampuan menabung atau memiliki aset. Jika kenaikan pendapatan nominal habis oleh biaya perumahan, transportasi, pendidikan, atau kesehatan, pengalaman kesejahteraan dapat tertinggal dari statistik makro. Karena itu, ukuran distribusi perlu menggabungkan pendapatan dengan biaya hidup dan kualitas layanan yang diterima.

Pada tingkat perusahaan, pertumbuhan inklusif berarti semakin banyak perusahaan produktif mampu memasuki pasar, tumbuh, dan menghubungkan diri dengan rantai nilai yang lebih besar. Ekonomi yang didominasi sedikit perusahaan sangat produktif dan banyak usaha mikro berproduktivitas rendah akan menghasilkan dualisme. Kebijakan harus memfasilitasi transisi perusahaan dari mikro menuju kecil dan menengah melalui pembiayaan, manajemen, teknologi, standardisasi, dan akses pasar, bukan hanya memberikan bantuan yang mempertahankan skala kecil.

Pada tingkat daerah, wealth inequality dan capital gains harus dianalisis bersama. Daerah yang telah memiliki infrastruktur, tenaga terampil, pasar besar, dan jaringan pemasok cenderung terus menarik investasi sehingga muncul efek aglomerasi. Efisiensi aglomerasi penting, tetapi negara juga perlu mengurangi biaya konektivitas dan membangun kapasitas kota serta kawasan di luar pusat lama. Pemerataan spasial tidak berarti menyebarkan seluruh aktivitas secara sama, melainkan menciptakan cukup banyak pusat pertumbuhan agar penduduk mempunyai pilihan ekonomi tanpa harus selalu berpindah ke metropolitan utama.

Implikasi kebijakan dari pembahasan ini adalah perlunya evaluasi distributif pada setiap kebijakan utama. Pemerintah perlu menilai siapa penerima manfaat langsung dan tidak langsung, siapa menanggung biaya fiskal atau lingkungan, apakah kebijakan memperkuat kompetisi, serta apakah terdapat mekanisme koreksi jika manfaat terlalu terkonsentrasi. Pendekatan ini bukan anti-pertumbuhan. Justru distribusi yang lebih luas dapat memperbesar pasar domestik, memperkuat modal manusia, dan menciptakan dukungan politik bagi reformasi produktivitas.

Karena itu, keberhasilan pada tema ini perlu diuji melalui perubahan yang dapat diamati pada wealth inequality, property, equities, capital gains, dan inheritance. Pertanyaan yang tepat bukan hanya apakah indikator rata-rata membaik, tetapi apakah kelompok bawah bergerak lebih cepat, apakah kelas menengah menjadi lebih aman, apakah pekerja memperoleh bagian dari produktivitas, dan apakah keuntungan ekonomi semakin bergantung pada inovasi dibanding akses khusus. Inilah perbedaan antara pertumbuhan yang sekadar terjadi dan pembangunan yang memperluas kemampuan masyarakat.

17. Sektor Keuangan: Pengganda atau Penyaring Pertumbuhan

Sistem keuangan dapat memperluas kesempatan melalui kredit produktif, tetapi juga dapat memperbesar ketimpangan ketika akses modal terkonsentrasi. Cara masyarakat menikmati pertumbuhan ditentukan oleh posisi mereka dalam pasar kerja, kepemilikan aset, akses kepada layanan, dan kemampuan memengaruhi aturan. Dalam konteks ini, bank credit, SME finance, dan mortgage menjadi jalur penting yang menghubungkan aktivitas ekonomi dengan kesejahteraan. Karena Indonesia sangat beragam dalam struktur wilayah, pendidikan, kepemilikan aset, dan kesempatan kerja, satu angka nasional dapat menggambarkan arah umum tetapi tidak cukup menjelaskan pengalaman masyarakat. Analisis perlu bergerak sampai ke tingkat kelompok pendapatan, pekerjaan, gender, generasi, dan daerah.

Dimensi bank credit menunjukkan bahwa posisi awal sangat menentukan. Rumah tangga yang memiliki modal, tanah, pendidikan tinggi, jaringan bisnis, atau pekerjaan formal biasanya lebih mudah menangkap peluang baru. Sebaliknya, kelompok dengan aset terbatas sering harus menggunakan tambahan pendapatan untuk menutup kebutuhan dasar atau membayar utang. Akibatnya, tingkat pertumbuhan yang sama dapat menghasilkan akumulasi kekayaan yang sangat berbeda. Kebijakan publik harus menyadari efek kumulatif ini karena ketimpangan hari ini dapat menjadi ketimpangan kesempatan esok hari.

Dimensi SME finance berkaitan dengan kekuatan tawar. Dalam pasar yang ideal, produktivitas dan kompetisi mendorong pembagian manfaat yang relatif efisien. Dalam praktik, informasi tidak sempurna, pasar dapat terkonsentrasi, dan pekerja atau pemasok kecil sering menghadapi pilihan terbatas. Ketika posisi tawar tidak seimbang, kenaikan nilai tambah dapat lebih banyak menjadi margin keuntungan daripada upah atau harga yang diterima produsen kecil. Institusi persaingan, hukum kontrak, organisasi pekerja, dan keterbukaan informasi karena itu memengaruhi distribusi hasil.

Dimensi mortgage memperlihatkan peran negara sebagai pembentuk distribusi sebelum dan sesudah pasar. Sebelum pasar, negara memengaruhi kualitas pendidikan, kesehatan, infrastruktur, hak atas tanah, dan aturan kompetisi. Setelah pasar, negara menggunakan pajak, transfer, subsidi, dan layanan publik untuk memodifikasi hasil. Perdebatan tentang pemerataan sering terlalu berfokus pada

redistribusi setelah pendapatan terbentuk, padahal kebijakan yang membentuk kesempatan awal dapat lebih efektif dan lebih bermartabat dalam jangka panjang.

Selanjutnya, fintech menuntut perhatian terhadap waktu. Kelompok yang tidak menikmati manfaat sekarang mungkin dapat memperoleh manfaat di masa depan apabila pertumbuhan menghasilkan investasi, keterampilan, dan pasar baru. Namun janji tersebut hanya kredibel jika terdapat mekanisme nyata yang menghubungkan pertumbuhan hari ini dengan kesempatan esok hari. Tanpa jalur mobilitas, masyarakat akan melihat pertumbuhan sebagai keuntungan bagi kelompok lain. Persepsi semacam itu dapat menurunkan kepercayaan dan dukungan terhadap reformasi.

Dimensi financial inclusion menekankan bahwa distribusi yang baik tidak sama dengan membagi hasil secara seragam. Pembangunan membutuhkan insentif bagi inovasi, investasi, kewirausahaan, dan pengambilan risiko. Yang perlu dijaga adalah agar keuntungan luar biasa berasal dari penciptaan nilai dan kompetisi, bukan dari rente, monopoli, atau akses politik. Dengan kata lain, ketimpangan yang berasal dari inovasi produktif mempunyai implikasi berbeda dari ketimpangan yang berasal dari privilese kelembagaan.

Pada tingkat rumah tangga, manfaat pertumbuhan seharusnya terlihat melalui kombinasi peningkatan pendapatan riil, stabilitas pekerjaan, akses pelayanan publik, dan kemampuan menabung atau memiliki aset. Jika kenaikan pendapatan nominal habis oleh biaya perumahan, transportasi, pendidikan, atau kesehatan, pengalaman kesejahteraan dapat tertinggal dari statistik makro. Karena itu, ukuran distribusi perlu menggabungkan pendapatan dengan biaya hidup dan kualitas layanan yang diterima.

Pada tingkat perusahaan, pertumbuhan inklusif berarti semakin banyak perusahaan produktif mampu memasuki pasar, tumbuh, dan menghubungkan diri dengan rantai nilai yang lebih besar. Ekonomi yang didominasi sedikit perusahaan sangat produktif dan banyak usaha mikro berproduktivitas rendah akan menghasilkan dualisme. Kebijakan harus memfasilitasi transisi perusahaan dari mikro menuju kecil dan menengah melalui pembiayaan, manajemen, teknologi, standardisasi, dan akses pasar, bukan hanya memberikan bantuan yang mempertahankan skala kecil.

Pada tingkat daerah, bank credit dan fintech harus dianalisis bersama. Daerah yang telah memiliki infrastruktur, tenaga terampil, pasar besar, dan jaringan pemasok cenderung terus menarik investasi sehingga muncul efek aglomerasi. Efisiensi aglomerasi penting, tetapi negara juga perlu mengurangi biaya konektivitas dan membangun kapasitas kota serta kawasan di luar pusat lama. Pemerataan spasial tidak berarti menyebarkan seluruh aktivitas secara sama, melainkan menciptakan cukup banyak pusat pertumbuhan agar penduduk mempunyai pilihan ekonomi tanpa harus selalu berpindah ke metropolitan utama.

Implikasi kebijakan dari pembahasan ini adalah perlunya evaluasi distributif pada setiap kebijakan utama. Pemerintah perlu menilai siapa penerima manfaat langsung dan tidak langsung, siapa menanggung biaya fiskal atau lingkungan, apakah kebijakan memperkuat kompetisi, serta apakah terdapat mekanisme koreksi jika manfaat terlalu terkonsentrasi. Pendekatan ini bukan anti-pertumbuhan. Justru distribusi yang lebih luas dapat memperbesar pasar domestik, memperkuat modal manusia, dan menciptakan dukungan politik bagi reformasi produktivitas.

Karena itu, keberhasilan pada tema ini perlu diuji melalui perubahan yang dapat diamati pada bank credit, SME finance, mortgage, fintech, dan financial inclusion. Pertanyaan yang tepat bukan hanya apakah indikator rata-rata membaik, tetapi apakah kelompok bawah bergerak lebih cepat, apakah kelas

menengah menjadi lebih aman, apakah pekerja memperoleh bagian dari produktivitas, dan apakah keuntungan ekonomi semakin bergantung pada inovasi dibanding akses khusus. Inilah perbedaan antara pertumbuhan yang sekadar terjadi dan pembangunan yang memperluas kemampuan masyarakat.

18. Investasi Asing dan Pembagian Nilai Tambah

FDI membawa modal, teknologi, dan akses pasar, tetapi manfaat domestiknya bergantung pada keterkaitan pemasok, tenaga kerja lokal, pajak, dan transfer teknologi. Pertanyaan distribusional harus memeriksa bukan hanya pendapatan saat ini, tetapi juga keamanan ekonomi dan kemampuan memperoleh peluang di masa depan. Dalam konteks ini, FDI, spillover, dan local suppliers menjadi jalur penting yang menghubungkan aktivitas ekonomi dengan kesejahteraan. Karena Indonesia sangat beragam dalam struktur wilayah, pendidikan, kepemilikan aset, dan kesempatan kerja, satu angka nasional dapat menggambarkan arah umum tetapi tidak cukup menjelaskan pengalaman masyarakat. Analisis perlu bergerak sampai ke tingkat kelompok pendapatan, pekerjaan, gender, generasi, dan daerah.

Dimensi FDI menunjukkan bahwa posisi awal sangat menentukan. Rumah tangga yang memiliki modal, tanah, pendidikan tinggi, jaringan bisnis, atau pekerjaan formal biasanya lebih mudah menangkap peluang baru. Sebaliknya, kelompok dengan aset terbatas sering harus menggunakan tambahan pendapatan untuk menutup kebutuhan dasar atau membayar utang. Akibatnya, tingkat pertumbuhan yang sama dapat menghasilkan akumulasi kekayaan yang sangat berbeda. Kebijakan publik harus menyadari efek kumulatif ini karena ketimpangan hari ini dapat menjadi ketimpangan kesempatan esok hari.

Dimensi spillover berkaitan dengan kekuatan tawar. Dalam pasar yang ideal, produktivitas dan kompetisi mendorong pembagian manfaat yang relatif efisien. Dalam praktik, informasi tidak sempurna, pasar dapat terkonsentrasi, dan pekerja atau pemasok kecil sering menghadapi pilihan terbatas. Ketika posisi tawar tidak seimbang, kenaikan nilai tambah dapat lebih banyak menjadi margin keuntungan daripada upah atau harga yang diterima produsen kecil. Institusi persaingan, hukum kontrak, organisasi pekerja, dan keterbukaan informasi karena itu memengaruhi distribusi hasil.

Dimensi local suppliers memperlihatkan peran negara sebagai pembentuk distribusi sebelum dan sesudah pasar. Sebelum pasar, negara memengaruhi kualitas pendidikan, kesehatan, infrastruktur, hak atas tanah, dan aturan kompetisi. Setelah pasar, negara menggunakan pajak, transfer, subsidi, dan layanan publik untuk memodifikasi hasil. Perdebatan tentang pemerataan sering terlalu berfokus pada redistribusi setelah pendapatan terbentuk, padahal kebijakan yang membentuk kesempatan awal dapat lebih efektif dan lebih bermartabat dalam jangka panjang.

Selanjutnya, tax base menuntut perhatian terhadap waktu. Kelompok yang tidak menikmati manfaat sekarang mungkin dapat memperoleh manfaat di masa depan apabila pertumbuhan menghasilkan investasi, keterampilan, dan pasar baru. Namun janji tersebut hanya kredibel jika terdapat mekanisme nyata yang menghubungkan pertumbuhan hari ini dengan kesempatan esok hari. Tanpa jalur mobilitas, masyarakat akan melihat pertumbuhan sebagai keuntungan bagi kelompok lain. Persepsi semacam itu dapat menurunkan kepercayaan dan dukungan terhadap reformasi.

Dimensi technology transfer menekankan bahwa distribusi yang baik tidak sama dengan membagi hasil secara seragam. Pembangunan membutuhkan insentif bagi inovasi, investasi, kewirausahaan, dan

pengambilan risiko. Yang perlu dijaga adalah agar keuntungan luar biasa berasal dari penciptaan nilai dan kompetisi, bukan dari rente, monopoli, atau akses politik. Dengan kata lain, ketimpangan yang berasal dari inovasi produktif mempunyai implikasi berbeda dari ketimpangan yang berasal dari privilese kelembagaan.

Pada tingkat rumah tangga, manfaat pertumbuhan seharusnya terlihat melalui kombinasi peningkatan pendapatan riil, stabilitas pekerjaan, akses pelayanan publik, dan kemampuan menabung atau memiliki aset. Jika kenaikan pendapatan nominal habis oleh biaya perumahan, transportasi, pendidikan, atau kesehatan, pengalaman kesejahteraan dapat tertinggal dari statistik makro. Karena itu, ukuran distribusi perlu menggabungkan pendapatan dengan biaya hidup dan kualitas layanan yang diterima.

Pada tingkat perusahaan, pertumbuhan inklusif berarti semakin banyak perusahaan produktif mampu memasuki pasar, tumbuh, dan menghubungkan diri dengan rantai nilai yang lebih besar. Ekonomi yang didominasi sedikit perusahaan sangat produktif dan banyak usaha mikro berproduktivitas rendah akan menghasilkan dualisme. Kebijakan harus memfasilitasi transisi perusahaan dari mikro menuju kecil dan menengah melalui pembiayaan, manajemen, teknologi, standardisasi, dan akses pasar, bukan hanya memberikan bantuan yang mempertahankan skala kecil.

Pada tingkat daerah, FDI dan tax base harus dianalisis bersama. Daerah yang telah memiliki infrastruktur, tenaga terampil, pasar besar, dan jaringan pemasok cenderung terus menarik investasi sehingga muncul efek aglomerasi. Efisiensi aglomerasi penting, tetapi negara juga perlu mengurangi biaya konektivitas dan membangun kapasitas kota serta kawasan di luar pusat lama. Pemerataan spasial tidak berarti menyebarkan seluruh aktivitas secara sama, melainkan menciptakan cukup banyak pusat pertumbuhan agar penduduk mempunyai pilihan ekonomi tanpa harus selalu berpindah ke metropolitan utama.

Implikasi kebijakan dari pembahasan ini adalah perlunya evaluasi distributif pada setiap kebijakan utama. Pemerintah perlu menilai siapa penerima manfaat langsung dan tidak langsung, siapa menanggung biaya fiskal atau lingkungan, apakah kebijakan memperkuat kompetisi, serta apakah terdapat mekanisme koreksi jika manfaat terlalu terkonsentrasi. Pendekatan ini bukan anti-pertumbuhan. Justru distribusi yang lebih luas dapat memperbesar pasar domestik, memperkuat modal manusia, dan menciptakan dukungan politik bagi reformasi produktivitas.

Karena itu, keberhasilan pada tema ini perlu diuji melalui perubahan yang dapat diamati pada FDI, spillover, local suppliers, tax base, dan technology transfer. Pertanyaan yang tepat bukan hanya apakah indikator rata-rata membaik, tetapi apakah kelompok bawah bergerak lebih cepat, apakah kelas menengah menjadi lebih aman, apakah pekerja memperoleh bagian dari produktivitas, dan apakah keuntungan ekonomi semakin bergantung pada inovasi dibanding akses khusus. Inilah perbedaan antara pertumbuhan yang sekadar terjadi dan pembangunan yang memperluas kemampuan masyarakat.

19. Hilirisasi: Siapa Memperoleh Rente dan Nilai Tambah?

Hilirisasi akan inklusif jika tidak berhenti pada peningkatan ekspor olahan, tetapi membangun kemampuan industri, pemasok domestik, pekerjaan berkualitas, dan manfaat daerah. Perbedaan antara penciptaan nilai dan pembagian nilai merupakan inti analisis karena sektor yang tumbuh cepat belum tentu mempunyai keterkaitan luas dengan rumah tangga. Dalam konteks ini, mineral rents, smelter, dan local content menjadi jalur penting yang menghubungkan aktivitas ekonomi dengan kesejahteraan. Karena Indonesia sangat beragam dalam struktur wilayah, pendidikan, kepemilikan aset, dan

kesempatan kerja, satu angka nasional dapat menggambarkan arah umum tetapi tidak cukup menjelaskan pengalaman masyarakat. Analisis perlu bergerak sampai ke tingkat kelompok pendapatan, pekerjaan, gender, generasi, dan daerah.

Dimensi mineral rents menunjukkan bahwa posisi awal sangat menentukan. Rumah tangga yang memiliki modal, tanah, pendidikan tinggi, jaringan bisnis, atau pekerjaan formal biasanya lebih mudah menangkap peluang baru. Sebaliknya, kelompok dengan aset terbatas sering harus menggunakan tambahan pendapatan untuk menutup kebutuhan dasar atau membayar utang. Akibatnya, tingkat pertumbuhan yang sama dapat menghasilkan akumulasi kekayaan yang sangat berbeda. Kebijakan publik harus menyadari efek kumulatif ini karena ketimpangan hari ini dapat menjadi ketimpangan kesempatan esok hari.

Dimensi smelter berkaitan dengan kekuatan tawar. Dalam pasar yang ideal, produktivitas dan kompetisi mendorong pembagian manfaat yang relatif efisien. Dalam praktik, informasi tidak sempurna, pasar dapat terkonsentrasi, dan pekerja atau pemasok kecil sering menghadapi pilihan terbatas. Ketika posisi tawar tidak seimbang, kenaikan nilai tambah dapat lebih banyak menjadi margin keuntungan daripada upah atau harga yang diterima produsen kecil. Institusi persaingan, hukum kontrak, organisasi pekerja, dan keterbukaan informasi karena itu memengaruhi distribusi hasil.

Dimensi local content memperlihatkan peran negara sebagai pembentuk distribusi sebelum dan sesudah pasar. Sebelum pasar, negara memengaruhi kualitas pendidikan, kesehatan, infrastruktur, hak atas tanah, dan aturan kompetisi. Setelah pasar, negara menggunakan pajak, transfer, subsidi, dan layanan publik untuk memodifikasi hasil. Perdebatan tentang pemerataan sering terlalu berfokus pada redistribusi setelah pendapatan terbentuk, padahal kebijakan yang membentuk kesempatan awal dapat lebih efektif dan lebih bermartabat dalam jangka panjang.

Selanjutnya, regions menuntut perhatian terhadap waktu. Kelompok yang tidak menikmati manfaat sekarang mungkin dapat memperoleh manfaat di masa depan apabila pertumbuhan menghasilkan investasi, keterampilan, dan pasar baru. Namun janji tersebut hanya kredibel jika terdapat mekanisme nyata yang menghubungkan pertumbuhan hari ini dengan kesempatan esok hari. Tanpa jalur mobilitas, masyarakat akan melihat pertumbuhan sebagai keuntungan bagi kelompok lain. Persepsi semacam itu dapat menurunkan kepercayaan dan dukungan terhadap reformasi.

Dimensi environment menekankan bahwa distribusi yang baik tidak sama dengan membagi hasil secara seragam. Pembangunan membutuhkan insentif bagi inovasi, investasi, kewirausahaan, dan pengambilan risiko. Yang perlu dijaga adalah agar keuntungan luar biasa berasal dari penciptaan nilai dan kompetisi, bukan dari rente, monopoli, atau akses politik. Dengan kata lain, ketimpangan yang berasal dari inovasi produktif mempunyai implikasi berbeda dari ketimpangan yang berasal dari privilese kelembagaan.

Pada tingkat rumah tangga, manfaat pertumbuhan seharusnya terlihat melalui kombinasi peningkatan pendapatan riil, stabilitas pekerjaan, akses pelayanan publik, dan kemampuan menabung atau memiliki aset. Jika kenaikan pendapatan nominal habis oleh biaya perumahan, transportasi, pendidikan, atau kesehatan, pengalaman kesejahteraan dapat tertinggal dari statistik makro. Karena itu, ukuran distribusi perlu menggabungkan pendapatan dengan biaya hidup dan kualitas layanan yang diterima.

Pada tingkat perusahaan, pertumbuhan inklusif berarti semakin banyak perusahaan produktif mampu memasuki pasar, tumbuh, dan menghubungkan diri dengan rantai nilai yang lebih besar. Ekonomi yang didominasi sedikit perusahaan sangat produktif dan banyak usaha mikro berproduktivitas rendah akan

menghasilkan dualisme. Kebijakan harus memfasilitasi transisi perusahaan dari mikro menuju kecil dan menengah melalui pembiayaan, manajemen, teknologi, standardisasi, dan akses pasar, bukan hanya memberikan bantuan yang mempertahankan skala kecil.

Pada tingkat daerah, mineral rents dan regions harus dianalisis bersama. Daerah yang telah memiliki infrastruktur, tenaga terampil, pasar besar, dan jaringan pemasok cenderung terus menarik investasi sehingga muncul efek aglomerasi. Efisiensi aglomerasi penting, tetapi negara juga perlu mengurangi biaya konektivitas dan membangun kapasitas kota serta kawasan di luar pusat lama. Pemerataan spasial tidak berarti menyebarkan seluruh aktivitas secara sama, melainkan menciptakan cukup banyak pusat pertumbuhan agar penduduk mempunyai pilihan ekonomi tanpa harus selalu berpindah ke metropolitan utama.

Implikasi kebijakan dari pembahasan ini adalah perlunya evaluasi distributif pada setiap kebijakan utama. Pemerintah perlu menilai siapa penerima manfaat langsung dan tidak langsung, siapa menanggung biaya fiskal atau lingkungan, apakah kebijakan memperkuat kompetisi, serta apakah terdapat mekanisme koreksi jika manfaat terlalu terkonsentrasi. Pendekatan ini bukan anti-pertumbuhan. Justru distribusi yang lebih luas dapat memperbesar pasar domestik, memperkuat modal manusia, dan menciptakan dukungan politik bagi reformasi produktivitas.

Karena itu, keberhasilan pada tema ini perlu diuji melalui perubahan yang dapat diamati pada mineral rents, smelter, local content, regions, dan environment. Pertanyaan yang tepat bukan hanya apakah indikator rata-rata membaik, tetapi apakah kelompok bawah bergerak lebih cepat, apakah kelas menengah menjadi lebih aman, apakah pekerja memperoleh bagian dari produktivitas, dan apakah keuntungan ekonomi semakin bergantung pada inovasi dibanding akses khusus. Inilah perbedaan antara pertumbuhan yang sekadar terjadi dan pembangunan yang memperluas kemampuan masyarakat.

20. BUMN dan Distribusi Manfaat Publik

BUMN berada pada posisi unik karena keuntungan komersialnya dapat menjadi sumber penerimaan negara, tetapi mandat publik memerlukan tata kelola yang transparan. Dalam ekonomi politik, distribusi manfaat tidak terjadi setelah pertumbuhan selesai; distribusi dibentuk sejak proses produksi, pengaturan pasar, dan penetapan hak atas aset. Dalam konteks ini, dividend, public service, dan governance menjadi jalur penting yang menghubungkan aktivitas ekonomi dengan kesejahteraan. Karena Indonesia sangat beragam dalam struktur wilayah, pendidikan, kepemilikan aset, dan kesempatan kerja, satu angka nasional dapat menggambarkan arah umum tetapi tidak cukup menjelaskan pengalaman masyarakat. Analisis perlu bergerak sampai ke tingkat kelompok pendapatan, pekerjaan, gender, generasi, dan daerah.

Dimensi dividend menunjukkan bahwa posisi awal sangat menentukan. Rumah tangga yang memiliki modal, tanah, pendidikan tinggi, jaringan bisnis, atau pekerjaan formal biasanya lebih mudah menangkap peluang baru. Sebaliknya, kelompok dengan aset terbatas sering harus menggunakan tambahan pendapatan untuk menutup kebutuhan dasar atau membayar utang. Akibatnya, tingkat pertumbuhan yang sama dapat menghasilkan akumulasi kekayaan yang sangat berbeda. Kebijakan publik harus menyadari efek kumulatif ini karena ketimpangan hari ini dapat menjadi ketimpangan kesempatan esok hari.

Dimensi public service berkaitan dengan kekuatan tawar. Dalam pasar yang ideal, produktivitas dan kompetisi mendorong pembagian manfaat yang relatif efisien. Dalam praktik, informasi tidak sempurna, pasar dapat terkonsentrasi, dan pekerja atau pemasok kecil sering menghadapi pilihan terbatas. Ketika posisi tawar tidak seimbang, kenaikan nilai tambah dapat lebih banyak menjadi margin keuntungan daripada upah atau harga yang diterima produsen kecil. Institusi persaingan, hukum kontrak, organisasi pekerja, dan keterbukaan informasi karena itu memengaruhi distribusi hasil.

Dimensi governance memperlihatkan peran negara sebagai pembentuk distribusi sebelum dan sesudah pasar. Sebelum pasar, negara memengaruhi kualitas pendidikan, kesehatan, infrastruktur, hak atas tanah, dan aturan kompetisi. Setelah pasar, negara menggunakan pajak, transfer, subsidi, dan layanan publik untuk memodifikasi hasil. Perdebatan tentang pemerataan sering terlalu berfokus pada redistribusi setelah pendapatan terbentuk, padahal kebijakan yang membentuk kesempatan awal dapat lebih efektif dan lebih bermartabat dalam jangka panjang.

Selanjutnya, cross-subsidy menuntut perhatian terhadap waktu. Kelompok yang tidak menikmati manfaat sekarang mungkin dapat memperoleh manfaat di masa depan apabila pertumbuhan menghasilkan investasi, keterampilan, dan pasar baru. Namun janji tersebut hanya kredibel jika terdapat mekanisme nyata yang menghubungkan pertumbuhan hari ini dengan kesempatan esok hari. Tanpa jalur mobilitas, masyarakat akan melihat pertumbuhan sebagai keuntungan bagi kelompok lain. Persepsi semacam itu dapat menurunkan kepercayaan dan dukungan terhadap reformasi.

Dimensi competition menekankan bahwa distribusi yang baik tidak sama dengan membagi hasil secara seragam. Pembangunan membutuhkan insentif bagi inovasi, investasi, kewirausahaan, dan pengambilan risiko. Yang perlu dijaga adalah agar keuntungan luar biasa berasal dari penciptaan nilai dan kompetisi, bukan dari rente, monopoli, atau akses politik. Dengan kata lain, ketimpangan yang berasal dari inovasi produktif mempunyai implikasi berbeda dari ketimpangan yang berasal dari privilese kelembagaan.

Pada tingkat rumah tangga, manfaat pertumbuhan seharusnya terlihat melalui kombinasi peningkatan pendapatan riil, stabilitas pekerjaan, akses pelayanan publik, dan kemampuan menabung atau memiliki aset. Jika kenaikan pendapatan nominal habis oleh biaya perumahan, transportasi, pendidikan, atau kesehatan, pengalaman kesejahteraan dapat tertinggal dari statistik makro. Karena itu, ukuran distribusi perlu menggabungkan pendapatan dengan biaya hidup dan kualitas layanan yang diterima.

Pada tingkat perusahaan, pertumbuhan inklusif berarti semakin banyak perusahaan produktif mampu memasuki pasar, tumbuh, dan menghubungkan diri dengan rantai nilai yang lebih besar. Ekonomi yang didominasi sedikit perusahaan sangat produktif dan banyak usaha mikro berproduktivitas rendah akan menghasilkan dualisme. Kebijakan harus memfasilitasi transisi perusahaan dari mikro menuju kecil dan menengah melalui pembiayaan, manajemen, teknologi, standardisasi, dan akses pasar, bukan hanya memberikan bantuan yang mempertahankan skala kecil.

Pada tingkat daerah, dividend dan cross-subsidy harus dianalisis bersama. Daerah yang telah memiliki infrastruktur, tenaga terampil, pasar besar, dan jaringan pemasok cenderung terus menarik investasi sehingga muncul efek aglomerasi. Efisiensi aglomerasi penting, tetapi negara juga perlu mengurangi biaya konektivitas dan membangun kapasitas kota serta kawasan di luar pusat lama. Pemerataan spasial tidak berarti menyebarkan seluruh aktivitas secara sama, melainkan menciptakan cukup banyak pusat pertumbuhan agar penduduk mempunyai pilihan ekonomi tanpa harus selalu berpindah ke metropolitan utama.

Implikasi kebijakan dari pembahasan ini adalah perlunya evaluasi distributif pada setiap kebijakan utama. Pemerintah perlu menilai siapa penerima manfaat langsung dan tidak langsung, siapa menanggung biaya fiskal atau lingkungan, apakah kebijakan memperkuat kompetisi, serta apakah terdapat mekanisme koreksi jika manfaat terlalu terkonsentrasi. Pendekatan ini bukan anti-pertumbuhan. Justru distribusi yang lebih luas dapat memperbesar pasar domestik, memperkuat modal manusia, dan menciptakan dukungan politik bagi reformasi produktivitas.

Karena itu, keberhasilan pada tema ini perlu diuji melalui perubahan yang dapat diamati pada dividend, public service, governance, cross-subsidy, dan competition. Pertanyaan yang tepat bukan hanya apakah indikator rata-rata membaik, tetapi apakah kelompok bawah bergerak lebih cepat, apakah kelas menengah menjadi lebih aman, apakah pekerja memperoleh bagian dari produktivitas, dan apakah keuntungan ekonomi semakin bergantung pada inovasi dibanding akses khusus. Inilah perbedaan antara pertumbuhan yang sekadar terjadi dan pembangunan yang memperluas kemampuan masyarakat.

21. Pajak: Siapa Membayar Pertumbuhan?

Sistem pajak menentukan siapa yang membiayai negara dan seberapa jauh beban pembangunan dibagi menurut kemampuan ekonomi. Cara masyarakat menikmati pertumbuhan ditentukan oleh posisi mereka dalam pasar kerja, kepemilikan aset, akses kepada layanan, dan kemampuan memengaruhi aturan. Dalam konteks ini, income tax, VAT, dan wealth menjadi jalur penting yang menghubungkan aktivitas ekonomi dengan kesejahteraan. Karena Indonesia sangat beragam dalam struktur wilayah, pendidikan, kepemilikan aset, dan kesempatan kerja, satu angka nasional dapat menggambarkan arah umum tetapi tidak cukup menjelaskan pengalaman masyarakat. Analisis perlu bergerak sampai ke tingkat kelompok pendapatan, pekerjaan, gender, generasi, dan daerah.

Dimensi income tax menunjukkan bahwa posisi awal sangat menentukan. Rumah tangga yang memiliki modal, tanah, pendidikan tinggi, jaringan bisnis, atau pekerjaan formal biasanya lebih mudah menangkap peluang baru. Sebaliknya, kelompok dengan aset terbatas sering harus menggunakan tambahan pendapatan untuk menutup kebutuhan dasar atau membayar utang. Akibatnya, tingkat pertumbuhan yang sama dapat menghasilkan akumulasi kekayaan yang sangat berbeda. Kebijakan publik harus menyadari efek kumulatif ini karena ketimpangan hari ini dapat menjadi ketimpangan kesempatan esok hari.

Dimensi VAT berkaitan dengan kekuatan tawar. Dalam pasar yang ideal, produktivitas dan kompetisi mendorong pembagian manfaat yang relatif efisien. Dalam praktik, informasi tidak sempurna, pasar dapat terkonsentrasi, dan pekerja atau pemasok kecil sering menghadapi pilihan terbatas. Ketika posisi tawar tidak seimbang, kenaikan nilai tambah dapat lebih banyak menjadi margin keuntungan daripada upah atau harga yang diterima produsen kecil. Institusi persaingan, hukum kontrak, organisasi pekerja, dan keterbukaan informasi karena itu memengaruhi distribusi hasil.

Dimensi wealth memperlihatkan peran negara sebagai pembentuk distribusi sebelum dan sesudah pasar. Sebelum pasar, negara memengaruhi kualitas pendidikan, kesehatan, infrastruktur, hak atas tanah, dan aturan kompetisi. Setelah pasar, negara menggunakan pajak, transfer, subsidi, dan layanan publik untuk memodifikasi hasil. Perdebatan tentang pemerataan sering terlalu berfokus pada redistribusi setelah pendapatan terbentuk, padahal kebijakan yang membentuk kesempatan awal dapat lebih efektif dan lebih bermartabat dalam jangka panjang.

Selanjutnya, compliance menuntut perhatian terhadap waktu. Kelompok yang tidak menikmati manfaat sekarang mungkin dapat memperoleh manfaat di masa depan apabila pertumbuhan menghasilkan investasi, keterampilan, dan pasar baru. Namun janji tersebut hanya kredibel jika terdapat mekanisme nyata yang menghubungkan pertumbuhan hari ini dengan kesempatan esok hari. Tanpa jalur mobilitas, masyarakat akan melihat pertumbuhan sebagai keuntungan bagi kelompok lain. Persepsi semacam itu dapat menurunkan kepercayaan dan dukungan terhadap reformasi.

Dimensi progressivity menekankan bahwa distribusi yang baik tidak sama dengan membagi hasil secara seragam. Pembangunan membutuhkan insentif bagi inovasi, investasi, kewirausahaan, dan pengambilan risiko. Yang perlu dijaga adalah agar keuntungan luar biasa berasal dari penciptaan nilai dan kompetisi, bukan dari rente, monopoli, atau akses politik. Dengan kata lain, ketimpangan yang berasal dari inovasi produktif mempunyai implikasi berbeda dari ketimpangan yang berasal dari privilese kelembagaan.

Pada tingkat rumah tangga, manfaat pertumbuhan seharusnya terlihat melalui kombinasi peningkatan pendapatan riil, stabilitas pekerjaan, akses pelayanan publik, dan kemampuan menabung atau memiliki aset. Jika kenaikan pendapatan nominal habis oleh biaya perumahan, transportasi, pendidikan, atau kesehatan, pengalaman kesejahteraan dapat tertinggal dari statistik makro. Karena itu, ukuran distribusi perlu menggabungkan pendapatan dengan biaya hidup dan kualitas layanan yang diterima.

Pada tingkat perusahaan, pertumbuhan inklusif berarti semakin banyak perusahaan produktif mampu memasuki pasar, tumbuh, dan menghubungkan diri dengan rantai nilai yang lebih besar. Ekonomi yang didominasi sedikit perusahaan sangat produktif dan banyak usaha mikro berproduktivitas rendah akan menghasilkan dualisme. Kebijakan harus memfasilitasi transisi perusahaan dari mikro menuju kecil dan menengah melalui pembiayaan, manajemen, teknologi, standardisasi, dan akses pasar, bukan hanya memberikan bantuan yang mempertahankan skala kecil.

Pada tingkat daerah, income tax dan compliance harus dianalisis bersama. Daerah yang telah memiliki infrastruktur, tenaga terampil, pasar besar, dan jaringan pemasok cenderung terus menarik investasi sehingga muncul efek aglomerasi. Efisiensi aglomerasi penting, tetapi negara juga perlu mengurangi biaya konektivitas dan membangun kapasitas kota serta kawasan di luar pusat lama. Pemerataan spasial tidak berarti menyebarkan seluruh aktivitas secara sama, melainkan menciptakan cukup banyak pusat pertumbuhan agar penduduk mempunyai pilihan ekonomi tanpa harus selalu berpindah ke metropolitan utama.

Implikasi kebijakan dari pembahasan ini adalah perlunya evaluasi distributif pada setiap kebijakan utama. Pemerintah perlu menilai siapa penerima manfaat langsung dan tidak langsung, siapa menanggung biaya fiskal atau lingkungan, apakah kebijakan memperkuat kompetisi, serta apakah terdapat mekanisme koreksi jika manfaat terlalu terkonsentrasi. Pendekatan ini bukan anti-pertumbuhan. Justru distribusi yang lebih luas dapat memperbesar pasar domestik, memperkuat modal manusia, dan menciptakan dukungan politik bagi reformasi produktivitas.

Karena itu, keberhasilan pada tema ini perlu diuji melalui perubahan yang dapat diamati pada income tax, VAT, wealth, compliance, dan progressivity. Pertanyaan yang tepat bukan hanya apakah indikator rata-rata membaik, tetapi apakah kelompok bawah bergerak lebih cepat, apakah kelas menengah menjadi lebih aman, apakah pekerja memperoleh bagian dari produktivitas, dan apakah keuntungan ekonomi semakin bergantung pada inovasi dibanding akses khusus. Inilah perbedaan antara pertumbuhan yang sekadar terjadi dan pembangunan yang memperluas kemampuan masyarakat.

22. Subsidi: Siapa yang Paling Banyak Menerima?

Subsidi dapat melindungi daya beli tetapi desain yang tidak tepat sasaran dapat membuat manfaat nominal besar justru dinikmati kelompok konsumsi tinggi. Pertanyaan distribusional harus memeriksa bukan hanya pendapatan saat ini, tetapi juga keamanan ekonomi dan kemampuan memperoleh peluang di masa depan. Dalam konteks ini, energy subsidy, food subsidy, dan targeting menjadi jalur penting yang menghubungkan aktivitas ekonomi dengan kesejahteraan. Karena Indonesia sangat beragam dalam struktur wilayah, pendidikan, kepemilikan aset, dan kesempatan kerja, satu angka nasional dapat menggambarkan arah umum tetapi tidak cukup menjelaskan pengalaman masyarakat. Analisis perlu bergerak sampai ke tingkat kelompok pendapatan, pekerjaan, gender, generasi, dan daerah.

Dimensi energy subsidy menunjukkan bahwa posisi awal sangat menentukan. Rumah tangga yang memiliki modal, tanah, pendidikan tinggi, jaringan bisnis, atau pekerjaan formal biasanya lebih mudah menangkap peluang baru. Sebaliknya, kelompok dengan aset terbatas sering harus menggunakan tambahan pendapatan untuk menutup kebutuhan dasar atau membayar utang. Akibatnya, tingkat pertumbuhan yang sama dapat menghasilkan akumulasi kekayaan yang sangat berbeda. Kebijakan publik harus menyadari efek kumulatif ini karena ketimpangan hari ini dapat menjadi ketimpangan kesempatan esok hari.

Dimensi food subsidy berkaitan dengan kekuatan tawar. Dalam pasar yang ideal, produktivitas dan kompetisi mendorong pembagian manfaat yang relatif efisien. Dalam praktik, informasi tidak sempurna, pasar dapat terkonsentrasi, dan pekerja atau pemasok kecil sering menghadapi pilihan terbatas. Ketika posisi tawar tidak seimbang, kenaikan nilai tambah dapat lebih banyak menjadi margin keuntungan daripada upah atau harga yang diterima produsen kecil. Institusi persaingan, hukum kontrak, organisasi pekerja, dan keterbukaan informasi karena itu memengaruhi distribusi hasil.

Dimensi targeting memperlihatkan peran negara sebagai pembentuk distribusi sebelum dan sesudah pasar. Sebelum pasar, negara memengaruhi kualitas pendidikan, kesehatan, infrastruktur, hak atas tanah, dan aturan kompetisi. Setelah pasar, negara menggunakan pajak, transfer, subsidi, dan layanan publik untuk memodifikasi hasil. Perdebatan tentang pemerataan sering terlalu berfokus pada redistribusi setelah pendapatan terbentuk, padahal kebijakan yang membentuk kesempatan awal dapat lebih efektif dan lebih bermartabat dalam jangka panjang.

Selanjutnya, leakage menuntut perhatian terhadap waktu. Kelompok yang tidak menikmati manfaat sekarang mungkin dapat memperoleh manfaat di masa depan apabila pertumbuhan menghasilkan investasi, keterampilan, dan pasar baru. Namun janji tersebut hanya kredibel jika terdapat mekanisme nyata yang menghubungkan pertumbuhan hari ini dengan kesempatan esok hari. Tanpa jalur mobilitas, masyarakat akan melihat pertumbuhan sebagai keuntungan bagi kelompok lain. Persepsi semacam itu dapat menurunkan kepercayaan dan dukungan terhadap reformasi.

Dimensi fiscal cost menekankan bahwa distribusi yang baik tidak sama dengan membagi hasil secara seragam. Pembangunan membutuhkan insentif bagi inovasi, investasi, kewirausahaan, dan pengambilan risiko. Yang perlu dijaga adalah agar keuntungan luar biasa berasal dari penciptaan nilai dan kompetisi, bukan dari rente, monopoli, atau akses politik. Dengan kata lain, ketimpangan yang berasal dari inovasi produktif mempunyai implikasi berbeda dari ketimpangan yang berasal dari privilese kelembagaan.

Pada tingkat rumah tangga, manfaat pertumbuhan seharusnya terlihat melalui kombinasi peningkatan pendapatan riil, stabilitas pekerjaan, akses pelayanan publik, dan kemampuan menabung atau memiliki

aset. Jika kenaikan pendapatan nominal habis oleh biaya perumahan, transportasi, pendidikan, atau kesehatan, pengalaman kesejahteraan dapat tertinggal dari statistik makro. Karena itu, ukuran distribusi perlu menggabungkan pendapatan dengan biaya hidup dan kualitas layanan yang diterima.

Pada tingkat perusahaan, pertumbuhan inklusif berarti semakin banyak perusahaan produktif mampu memasuki pasar, tumbuh, dan menghubungkan diri dengan rantai nilai yang lebih besar. Ekonomi yang didominasi sedikit perusahaan sangat produktif dan banyak usaha mikro berproduktivitas rendah akan menghasilkan dualisme. Kebijakan harus memfasilitasi transisi perusahaan dari mikro menuju kecil dan menengah melalui pembiayaan, manajemen, teknologi, standardisasi, dan akses pasar, bukan hanya memberikan bantuan yang mempertahankan skala kecil.

Pada tingkat daerah, energy subsidy dan leakage harus dianalisis bersama. Daerah yang telah memiliki infrastruktur, tenaga terampil, pasar besar, dan jaringan pemasok cenderung terus menarik investasi sehingga muncul efek aglomerasi. Efisiensi aglomerasi penting, tetapi negara juga perlu mengurangi biaya konektivitas dan membangun kapasitas kota serta kawasan di luar pusat lama. Pemerataan spasial tidak berarti menyebarkan seluruh aktivitas secara sama, melainkan menciptakan cukup banyak pusat pertumbuhan agar penduduk mempunyai pilihan ekonomi tanpa harus selalu berpindah ke metropolitan utama.

Implikasi kebijakan dari pembahasan ini adalah perlunya evaluasi distributif pada setiap kebijakan utama. Pemerintah perlu menilai siapa penerima manfaat langsung dan tidak langsung, siapa menanggung biaya fiskal atau lingkungan, apakah kebijakan memperkuat kompetisi, serta apakah terdapat mekanisme koreksi jika manfaat terlalu terkonsentrasi. Pendekatan ini bukan anti-pertumbuhan. Justru distribusi yang lebih luas dapat memperbesar pasar domestik, memperkuat modal manusia, dan menciptakan dukungan politik bagi reformasi produktivitas.

Karena itu, keberhasilan pada tema ini perlu diuji melalui perubahan yang dapat diamati pada energy subsidy, food subsidy, targeting, leakage, dan fiscal cost. Pertanyaan yang tepat bukan hanya apakah indikator rata-rata membaik, tetapi apakah kelompok bawah bergerak lebih cepat, apakah kelas menengah menjadi lebih aman, apakah pekerja memperoleh bagian dari produktivitas, dan apakah keuntungan ekonomi semakin bergantung pada inovasi dibanding akses khusus. Inilah perbedaan antara pertumbuhan yang sekadar terjadi dan pembangunan yang memperluas kemampuan masyarakat.

23. Perlindungan Sosial sebagai Redistribusi

Transfer sosial mengubah pendapatan pasar menjadi pendapatan setelah kebijakan dan menjadi instrumen utama untuk mengurangi kerentanan. Perbedaan antara penciptaan nilai dan pembagian nilai merupakan inti analisis karena sektor yang tumbuh cepat belum tentu mempunyai keterkaitan luas dengan rumah tangga. Dalam konteks ini, cash transfer, social insurance, dan coverage menjadi jalur penting yang menghubungkan aktivitas ekonomi dengan kesejahteraan. Karena Indonesia sangat beragam dalam struktur wilayah, pendidikan, kepemilikan aset, dan kesempatan kerja, satu angka nasional dapat menggambarkan arah umum tetapi tidak cukup menjelaskan pengalaman masyarakat. Analisis perlu bergerak sampai ke tingkat kelompok pendapatan, pekerjaan, gender, generasi, dan daerah.

Dimensi cash transfer menunjukkan bahwa posisi awal sangat menentukan. Rumah tangga yang memiliki modal, tanah, pendidikan tinggi, jaringan bisnis, atau pekerjaan formal biasanya lebih mudah menangkap

peluang baru. Sebaliknya, kelompok dengan aset terbatas sering harus menggunakan tambahan pendapatan untuk menutup kebutuhan dasar atau membayar utang. Akibatnya, tingkat pertumbuhan yang sama dapat menghasilkan akumulasi kekayaan yang sangat berbeda. Kebijakan publik harus menyadari efek kumulatif ini karena ketimpangan hari ini dapat menjadi ketimpangan kesempatan esok hari.

Dimensi social insurance berkaitan dengan kekuatan tawar. Dalam pasar yang ideal, produktivitas dan kompetisi mendorong pembagian manfaat yang relatif efisien. Dalam praktik, informasi tidak sempurna, pasar dapat terkonsentrasi, dan pekerja atau pemasok kecil sering menghadapi pilihan terbatas. Ketika posisi tawar tidak seimbang, kenaikan nilai tambah dapat lebih banyak menjadi margin keuntungan daripada upah atau harga yang diterima produsen kecil. Institusi persaingan, hukum kontrak, organisasi pekerja, dan keterbukaan informasi karena itu memengaruhi distribusi hasil.

Dimensi coverage memperlihatkan peran negara sebagai pembentuk distribusi sebelum dan sesudah pasar. Sebelum pasar, negara memengaruhi kualitas pendidikan, kesehatan, infrastruktur, hak atas tanah, dan aturan kompetisi. Setelah pasar, negara menggunakan pajak, transfer, subsidi, dan layanan publik untuk memodifikasi hasil. Perdebatan tentang pemerataan sering terlalu berfokus pada redistribusi setelah pendapatan terbentuk, padahal kebijakan yang membentuk kesempatan awal dapat lebih efektif dan lebih bermartabat dalam jangka panjang.

Selanjutnya, targeting menuntut perhatian terhadap waktu. Kelompok yang tidak menikmati manfaat sekarang mungkin dapat memperoleh manfaat di masa depan apabila pertumbuhan menghasilkan investasi, keterampilan, dan pasar baru. Namun janji tersebut hanya kredibel jika terdapat mekanisme nyata yang menghubungkan pertumbuhan hari ini dengan kesempatan esok hari. Tanpa jalur mobilitas, masyarakat akan melihat pertumbuhan sebagai keuntungan bagi kelompok lain. Persepsi semacam itu dapat menurunkan kepercayaan dan dukungan terhadap reformasi.

Dimensi graduation menekankan bahwa distribusi yang baik tidak sama dengan membagi hasil secara seragam. Pembangunan membutuhkan insentif bagi inovasi, investasi, kewirausahaan, dan pengambilan risiko. Yang perlu dijaga adalah agar keuntungan luar biasa berasal dari penciptaan nilai dan kompetisi, bukan dari rente, monopoli, atau akses politik. Dengan kata lain, ketimpangan yang berasal dari inovasi produktif mempunyai implikasi berbeda dari ketimpangan yang berasal dari privilese kelembagaan.

Pada tingkat rumah tangga, manfaat pertumbuhan seharusnya terlihat melalui kombinasi peningkatan pendapatan riil, stabilitas pekerjaan, akses pelayanan publik, dan kemampuan menabung atau memiliki aset. Jika kenaikan pendapatan nominal habis oleh biaya perumahan, transportasi, pendidikan, atau kesehatan, pengalaman kesejahteraan dapat tertinggal dari statistik makro. Karena itu, ukuran distribusi perlu menggabungkan pendapatan dengan biaya hidup dan kualitas layanan yang diterima.

Pada tingkat perusahaan, pertumbuhan inklusif berarti semakin banyak perusahaan produktif mampu memasuki pasar, tumbuh, dan menghubungkan diri dengan rantai nilai yang lebih besar. Ekonomi yang didominasi sedikit perusahaan sangat produktif dan banyak usaha mikro berproduktivitas rendah akan menghasilkan dualisme. Kebijakan harus memfasilitasi transisi perusahaan dari mikro menuju kecil dan menengah melalui pembiayaan, manajemen, teknologi, standardisasi, dan akses pasar, bukan hanya memberikan bantuan yang mempertahankan skala kecil.

Pada tingkat daerah, cash transfer dan targeting harus dianalisis bersama. Daerah yang telah memiliki infrastruktur, tenaga terampil, pasar besar, dan jaringan pemasok cenderung terus menarik investasi

sehingga muncul efek aglomerasi. Efisiensi aglomerasi penting, tetapi negara juga perlu mengurangi biaya konektivitas dan membangun kapasitas kota serta kawasan di luar pusat lama. Pemerataan spasial tidak berarti menyebarkan seluruh aktivitas secara sama, melainkan menciptakan cukup banyak pusat pertumbuhan agar penduduk mempunyai pilihan ekonomi tanpa harus selalu berpindah ke metropolitan utama.

Implikasi kebijakan dari pembahasan ini adalah perlunya evaluasi distributif pada setiap kebijakan utama. Pemerintah perlu menilai siapa penerima manfaat langsung dan tidak langsung, siapa menanggung biaya fiskal atau lingkungan, apakah kebijakan memperkuat kompetisi, serta apakah terdapat mekanisme koreksi jika manfaat terlalu terkonsentrasi. Pendekatan ini bukan anti-pertumbuhan. Justru distribusi yang lebih luas dapat memperbesar pasar domestik, memperkuat modal manusia, dan menciptakan dukungan politik bagi reformasi produktivitas.

Karena itu, keberhasilan pada tema ini perlu diuji melalui perubahan yang dapat diamati pada cash transfer, social insurance, coverage, targeting, dan graduation. Pertanyaan yang tepat bukan hanya apakah indikator rata-rata membaik, tetapi apakah kelompok bawah bergerak lebih cepat, apakah kelas menengah menjadi lebih aman, apakah pekerja memperoleh bagian dari produktivitas, dan apakah keuntungan ekonomi semakin bergantung pada inovasi dibanding akses khusus. Inilah perbedaan antara pertumbuhan yang sekadar terjadi dan pembangunan yang memperluas kemampuan masyarakat.

24. Pendidikan dan Distribusi Kesempatan

Pendidikan merupakan mekanisme mobilitas jika kualitasnya cukup merata; jika tidak, sistem pendidikan dapat mereproduksi ketimpangan sosial. Dalam ekonomi politik, distribusi manfaat tidak terjadi setelah pertumbuhan selesai; distribusi dibentuk sejak proses produksi, pengaturan pasar, dan penetapan hak atas aset. Dalam konteks ini, school quality, higher education, dan vocational skills menjadi jalur penting yang menghubungkan aktivitas ekonomi dengan kesejahteraan. Karena Indonesia sangat beragam dalam struktur wilayah, pendidikan, kepemilikan aset, dan kesempatan kerja, satu angka nasional dapat menggambarkan arah umum tetapi tidak cukup menjelaskan pengalaman masyarakat. Analisis perlu bergerak sampai ke tingkat kelompok pendapatan, pekerjaan, gender, generasi, dan daerah.

Dimensi school quality menunjukkan bahwa posisi awal sangat menentukan. Rumah tangga yang memiliki modal, tanah, pendidikan tinggi, jaringan bisnis, atau pekerjaan formal biasanya lebih mudah menangkap peluang baru. Sebaliknya, kelompok dengan aset terbatas sering harus menggunakan tambahan pendapatan untuk menutup kebutuhan dasar atau membayar utang. Akibatnya, tingkat pertumbuhan yang sama dapat menghasilkan akumulasi kekayaan yang sangat berbeda. Kebijakan publik harus menyadari efek kumulatif ini karena ketimpangan hari ini dapat menjadi ketimpangan kesempatan esok hari.

Dimensi higher education berkaitan dengan kekuatan tawar. Dalam pasar yang ideal, produktivitas dan kompetisi mendorong pembagian manfaat yang relatif efisien. Dalam praktik, informasi tidak sempurna, pasar dapat terkonsentrasi, dan pekerja atau pemasok kecil sering menghadapi pilihan terbatas. Ketika posisi tawar tidak seimbang, kenaikan nilai tambah dapat lebih banyak menjadi margin keuntungan daripada upah atau harga yang diterima produsen kecil. Institusi persaingan, hukum kontrak, organisasi pekerja, dan keterbukaan informasi karena itu memengaruhi distribusi hasil.

Dimensi vocational skills memperlihatkan peran negara sebagai pembentuk distribusi sebelum dan sesudah pasar. Sebelum pasar, negara memengaruhi kualitas pendidikan, kesehatan, infrastruktur, hak atas tanah, dan aturan kompetisi. Setelah pasar, negara menggunakan pajak, transfer, subsidi, dan layanan publik untuk memodifikasi hasil. Perdebatan tentang pemerataan sering terlalu berfokus pada redistribusi setelah pendapatan terbentuk, padahal kebijakan yang membentuk kesempatan awal dapat lebih efektif dan lebih bermartabat dalam jangka panjang.

Selanjutnya, digital divide menuntut perhatian terhadap waktu. Kelompok yang tidak menikmati manfaat sekarang mungkin dapat memperoleh manfaat di masa depan apabila pertumbuhan menghasilkan investasi, keterampilan, dan pasar baru. Namun janji tersebut hanya kredibel jika terdapat mekanisme nyata yang menghubungkan pertumbuhan hari ini dengan kesempatan esok hari. Tanpa jalur mobilitas, masyarakat akan melihat pertumbuhan sebagai keuntungan bagi kelompok lain. Persepsi semacam itu dapat menurunkan kepercayaan dan dukungan terhadap reformasi.

Dimensi returns to education menekankan bahwa distribusi yang baik tidak sama dengan membagi hasil secara seragam. Pembangunan membutuhkan insentif bagi inovasi, investasi, kewirausahaan, dan pengambilan risiko. Yang perlu dijaga adalah agar keuntungan luar biasa berasal dari penciptaan nilai dan kompetisi, bukan dari rente, monopoli, atau akses politik. Dengan kata lain, ketimpangan yang berasal dari inovasi produktif mempunyai implikasi berbeda dari ketimpangan yang berasal dari privilese kelembagaan.

Pada tingkat rumah tangga, manfaat pertumbuhan seharusnya terlihat melalui kombinasi peningkatan pendapatan riil, stabilitas pekerjaan, akses pelayanan publik, dan kemampuan menabung atau memiliki aset. Jika kenaikan pendapatan nominal habis oleh biaya perumahan, transportasi, pendidikan, atau kesehatan, pengalaman kesejahteraan dapat tertinggal dari statistik makro. Karena itu, ukuran distribusi perlu menggabungkan pendapatan dengan biaya hidup dan kualitas layanan yang diterima.

Pada tingkat perusahaan, pertumbuhan inklusif berarti semakin banyak perusahaan produktif mampu memasuki pasar, tumbuh, dan menghubungkan diri dengan rantai nilai yang lebih besar. Ekonomi yang didominasi sedikit perusahaan sangat produktif dan banyak usaha mikro berproduktivitas rendah akan menghasilkan dualisme. Kebijakan harus memfasilitasi transisi perusahaan dari mikro menuju kecil dan menengah melalui pembiayaan, manajemen, teknologi, standardisasi, dan akses pasar, bukan hanya memberikan bantuan yang mempertahankan skala kecil.

Pada tingkat daerah, school quality dan digital divide harus dianalisis bersama. Daerah yang telah memiliki infrastruktur, tenaga terampil, pasar besar, dan jaringan pemasok cenderung terus menarik investasi sehingga muncul efek aglomerasi. Efisiensi aglomerasi penting, tetapi negara juga perlu mengurangi biaya konektivitas dan membangun kapasitas kota serta kawasan di luar pusat lama. Pemerataan spasial tidak berarti menyebarkan seluruh aktivitas secara sama, melainkan menciptakan cukup banyak pusat pertumbuhan agar penduduk mempunyai pilihan ekonomi tanpa harus selalu berpindah ke metropolitan utama.

Implikasi kebijakan dari pembahasan ini adalah perlunya evaluasi distributif pada setiap kebijakan utama. Pemerintah perlu menilai siapa penerima manfaat langsung dan tidak langsung, siapa menanggung biaya fiskal atau lingkungan, apakah kebijakan memperkuat kompetisi, serta apakah terdapat mekanisme koreksi jika manfaat terlalu terkonsentrasi. Pendekatan ini bukan anti-

pertumbuhan. Justru distribusi yang lebih luas dapat memperbesar pasar domestik, memperkuat modal manusia, dan menciptakan dukungan politik bagi reformasi produktivitas.

Karena itu, keberhasilan pada tema ini perlu diuji melalui perubahan yang dapat diamati pada school quality, higher education, vocational skills, digital divide, dan returns to education. Pertanyaan yang tepat bukan hanya apakah indikator rata-rata membaik, tetapi apakah kelompok bawah bergerak lebih cepat, apakah kelas menengah menjadi lebih aman, apakah pekerja memperoleh bagian dari produktivitas, dan apakah keuntungan ekonomi semakin bergantung pada inovasi dibanding akses khusus. Inilah perbedaan antara pertumbuhan yang sekadar terjadi dan pembangunan yang memperluas kemampuan masyarakat.

25. Kesehatan dan Ketimpangan Kapabilitas

Kesehatan menentukan kemampuan bekerja, belajar, dan membangun aset, sehingga layanan kesehatan yang tidak merata menjadi sumber ketimpangan ekonomi jangka panjang. Cara masyarakat menikmati pertumbuhan ditentukan oleh posisi mereka dalam pasar kerja, kepemilikan aset, akses kepada layanan, dan kemampuan memengaruhi aturan. Dalam konteks ini, preventive care, insurance, dan regional access menjadi jalur penting yang menghubungkan aktivitas ekonomi dengan kesejahteraan. Karena Indonesia sangat beragam dalam struktur wilayah, pendidikan, kepemilikan aset, dan kesempatan kerja, satu angka nasional dapat menggambarkan arah umum tetapi tidak cukup menjelaskan pengalaman masyarakat. Analisis perlu bergerak sampai ke tingkat kelompok pendapatan, pekerjaan, gender, generasi, dan daerah.

Dimensi preventive care menunjukkan bahwa posisi awal sangat menentukan. Rumah tangga yang memiliki modal, tanah, pendidikan tinggi, jaringan bisnis, atau pekerjaan formal biasanya lebih mudah menangkap peluang baru. Sebaliknya, kelompok dengan aset terbatas sering harus menggunakan tambahan pendapatan untuk menutup kebutuhan dasar atau membayar utang. Akibatnya, tingkat pertumbuhan yang sama dapat menghasilkan akumulasi kekayaan yang sangat berbeda. Kebijakan publik harus menyadari efek kumulatif ini karena ketimpangan hari ini dapat menjadi ketimpangan kesempatan esok hari.

Dimensi insurance berkaitan dengan kekuatan tawar. Dalam pasar yang ideal, produktivitas dan kompetisi mendorong pembagian manfaat yang relatif efisien. Dalam praktik, informasi tidak sempurna, pasar dapat terkonsentrasi, dan pekerja atau pemasok kecil sering menghadapi pilihan terbatas. Ketika posisi tawar tidak seimbang, kenaikan nilai tambah dapat lebih banyak menjadi margin keuntungan daripada upah atau harga yang diterima produsen kecil. Institusi persaingan, hukum kontrak, organisasi pekerja, dan keterbukaan informasi karena itu memengaruhi distribusi hasil.

Dimensi regional access memperlihatkan peran negara sebagai pembentuk distribusi sebelum dan sesudah pasar. Sebelum pasar, negara memengaruhi kualitas pendidikan, kesehatan, infrastruktur, hak atas tanah, dan aturan kompetisi. Setelah pasar, negara menggunakan pajak, transfer, subsidi, dan layanan publik untuk memodifikasi hasil. Perdebatan tentang pemerataan sering terlalu berfokus pada redistribusi setelah pendapatan terbentuk, padahal kebijakan yang membentuk kesempatan awal dapat lebih efektif dan lebih bermartabat dalam jangka panjang.

Selanjutnya, catastrophic spending menuntut perhatian terhadap waktu. Kelompok yang tidak menikmati manfaat sekarang mungkin dapat memperoleh manfaat di masa depan apabila pertumbuhan

menghasilkan investasi, keterampilan, dan pasar baru. Namun janji tersebut hanya kredibel jika terdapat mekanisme nyata yang menghubungkan pertumbuhan hari ini dengan kesempatan esok hari. Tanpa jalur mobilitas, masyarakat akan melihat pertumbuhan sebagai keuntungan bagi kelompok lain. Persepsi semacam itu dapat menurunkan kepercayaan dan dukungan terhadap reformasi.

Dimensi productivity menekankan bahwa distribusi yang baik tidak sama dengan membagi hasil secara seragam. Pembangunan membutuhkan insentif bagi inovasi, investasi, kewirausahaan, dan pengambilan risiko. Yang perlu dijaga adalah agar keuntungan luar biasa berasal dari penciptaan nilai dan kompetisi, bukan dari rente, monopoli, atau akses politik. Dengan kata lain, ketimpangan yang berasal dari inovasi produktif mempunyai implikasi berbeda dari ketimpangan yang berasal dari privilese kelembagaan.

Pada tingkat rumah tangga, manfaat pertumbuhan seharusnya terlihat melalui kombinasi peningkatan pendapatan riil, stabilitas pekerjaan, akses pelayanan publik, dan kemampuan menabung atau memiliki aset. Jika kenaikan pendapatan nominal habis oleh biaya perumahan, transportasi, pendidikan, atau kesehatan, pengalaman kesejahteraan dapat tertinggal dari statistik makro. Karena itu, ukuran distribusi perlu menggabungkan pendapatan dengan biaya hidup dan kualitas layanan yang diterima.

Pada tingkat perusahaan, pertumbuhan inklusif berarti semakin banyak perusahaan produktif mampu memasuki pasar, tumbuh, dan menghubungkan diri dengan rantai nilai yang lebih besar. Ekonomi yang didominasi sedikit perusahaan sangat produktif dan banyak usaha mikro berproduktivitas rendah akan menghasilkan dualisme. Kebijakan harus memfasilitasi transisi perusahaan dari mikro menuju kecil dan menengah melalui pembiayaan, manajemen, teknologi, standardisasi, dan akses pasar, bukan hanya memberikan bantuan yang mempertahankan skala kecil.

Pada tingkat daerah, preventive care dan catastrophic spending harus dianalisis bersama. Daerah yang telah memiliki infrastruktur, tenaga terampil, pasar besar, dan jaringan pemasok cenderung terus menarik investasi sehingga muncul efek aglomerasi. Efisiensi aglomerasi penting, tetapi negara juga perlu mengurangi biaya konektivitas dan membangun kapasitas kota serta kawasan di luar pusat lama. Pemerataan spasial tidak berarti menyebarkan seluruh aktivitas secara sama, melainkan menciptakan cukup banyak pusat pertumbuhan agar penduduk mempunyai pilihan ekonomi tanpa harus selalu berpindah ke metropolitan utama.

Implikasi kebijakan dari pembahasan ini adalah perlunya evaluasi distributif pada setiap kebijakan utama. Pemerintah perlu menilai siapa penerima manfaat langsung dan tidak langsung, siapa menanggung biaya fiskal atau lingkungan, apakah kebijakan memperkuat kompetisi, serta apakah terdapat mekanisme koreksi jika manfaat terlalu terkonsentrasi. Pendekatan ini bukan anti-pertumbuhan. Justru distribusi yang lebih luas dapat memperbesar pasar domestik, memperkuat modal manusia, dan menciptakan dukungan politik bagi reformasi produktivitas.

Karena itu, keberhasilan pada tema ini perlu diuji melalui perubahan yang dapat diamati pada preventive care, insurance, regional access, catastrophic spending, dan productivity. Pertanyaan yang tepat bukan hanya apakah indikator rata-rata membaik, tetapi apakah kelompok bawah bergerak lebih cepat, apakah kelas menengah menjadi lebih aman, apakah pekerja memperoleh bagian dari produktivitas, dan apakah keuntungan ekonomi semakin bergantung pada inovasi dibanding akses khusus. Inilah perbedaan antara pertumbuhan yang sekadar terjadi dan pembangunan yang memperluas kemampuan masyarakat.

26. Perumahan, Tanah, dan Kekayaan

Harga tanah dan rumah membentuk pola kekayaan antargenerasi dan menentukan seberapa banyak pendapatan kelas pekerja tersisa untuk tabungan dan konsumsi produktif. Pertanyaan distribusional harus memeriksa bukan hanya pendapatan saat ini, tetapi juga keamanan ekonomi dan kemampuan memperoleh peluang di masa depan. Dalam konteks ini, housing affordability, land value, dan rent menjadi jalur penting yang menghubungkan aktivitas ekonomi dengan kesejahteraan. Karena Indonesia sangat beragam dalam struktur wilayah, pendidikan, kepemilikan aset, dan kesempatan kerja, satu angka nasional dapat menggambarkan arah umum tetapi tidak cukup menjelaskan pengalaman masyarakat. Analisis perlu bergerak sampai ke tingkat kelompok pendapatan, pekerjaan, gender, generasi, dan daerah.

Dimensi housing affordability menunjukkan bahwa posisi awal sangat menentukan. Rumah tangga yang memiliki modal, tanah, pendidikan tinggi, jaringan bisnis, atau pekerjaan formal biasanya lebih mudah menangkap peluang baru. Sebaliknya, kelompok dengan aset terbatas sering harus menggunakan tambahan pendapatan untuk menutup kebutuhan dasar atau membayar utang. Akibatnya, tingkat pertumbuhan yang sama dapat menghasilkan akumulasi kekayaan yang sangat berbeda. Kebijakan publik harus menyadari efek kumulatif ini karena ketimpangan hari ini dapat menjadi ketimpangan kesempatan esok hari.

Dimensi land value berkaitan dengan kekuatan tawar. Dalam pasar yang ideal, produktivitas dan kompetisi mendorong pembagian manfaat yang relatif efisien. Dalam praktik, informasi tidak sempurna, pasar dapat terkonsentrasi, dan pekerja atau pemasok kecil sering menghadapi pilihan terbatas. Ketika posisi tawar tidak seimbang, kenaikan nilai tambah dapat lebih banyak menjadi margin keuntungan daripada upah atau harga yang diterima produsen kecil. Institusi persaingan, hukum kontrak, organisasi pekerja, dan keterbukaan informasi karena itu memengaruhi distribusi hasil.

Dimensi rent memperlihatkan peran negara sebagai pembentuk distribusi sebelum dan sesudah pasar. Sebelum pasar, negara memengaruhi kualitas pendidikan, kesehatan, infrastruktur, hak atas tanah, dan aturan kompetisi. Setelah pasar, negara menggunakan pajak, transfer, subsidi, dan layanan publik untuk memodifikasi hasil. Perdebatan tentang pemerataan sering terlalu berfokus pada redistribusi setelah pendapatan terbentuk, padahal kebijakan yang membentuk kesempatan awal dapat lebih efektif dan lebih bermartabat dalam jangka panjang.

Selanjutnya, mortgage menuntut perhatian terhadap waktu. Kelompok yang tidak menikmati manfaat sekarang mungkin dapat memperoleh manfaat di masa depan apabila pertumbuhan menghasilkan investasi, keterampilan, dan pasar baru. Namun janji tersebut hanya kredibel jika terdapat mekanisme nyata yang menghubungkan pertumbuhan hari ini dengan kesempatan esok hari. Tanpa jalur mobilitas, masyarakat akan melihat pertumbuhan sebagai keuntungan bagi kelompok lain. Persepsi semacam itu dapat menurunkan kepercayaan dan dukungan terhadap reformasi.

Dimensi urban planning menekankan bahwa distribusi yang baik tidak sama dengan membagi hasil secara seragam. Pembangunan membutuhkan insentif bagi inovasi, investasi, kewirausahaan, dan pengambilan risiko. Yang perlu dijaga adalah agar keuntungan luar biasa berasal dari penciptaan nilai dan kompetisi, bukan dari rente, monopoli, atau akses politik. Dengan kata lain, ketimpangan yang berasal dari inovasi produktif mempunyai implikasi berbeda dari ketimpangan yang berasal dari privilese kelembagaan.

Pada tingkat rumah tangga, manfaat pertumbuhan seharusnya terlihat melalui kombinasi peningkatan pendapatan riil, stabilitas pekerjaan, akses pelayanan publik, dan kemampuan menabung atau memiliki aset. Jika kenaikan pendapatan nominal habis oleh biaya perumahan, transportasi, pendidikan, atau kesehatan, pengalaman kesejahteraan dapat tertinggal dari statistik makro. Karena itu, ukuran distribusi perlu menggabungkan pendapatan dengan biaya hidup dan kualitas layanan yang diterima.

Pada tingkat perusahaan, pertumbuhan inklusif berarti semakin banyak perusahaan produktif mampu memasuki pasar, tumbuh, dan menghubungkan diri dengan rantai nilai yang lebih besar. Ekonomi yang didominasi sedikit perusahaan sangat produktif dan banyak usaha mikro berproduktivitas rendah akan menghasilkan dualisme. Kebijakan harus memfasilitasi transisi perusahaan dari mikro menuju kecil dan menengah melalui pembiayaan, manajemen, teknologi, standardisasi, dan akses pasar, bukan hanya memberikan bantuan yang mempertahankan skala kecil.

Pada tingkat daerah, housing affordability dan mortgage harus dianalisis bersama. Daerah yang telah memiliki infrastruktur, tenaga terampil, pasar besar, dan jaringan pemasok cenderung terus menarik investasi sehingga muncul efek aglomerasi. Efisiensi aglomerasi penting, tetapi negara juga perlu mengurangi biaya konektivitas dan membangun kapasitas kota serta kawasan di luar pusat lama. Pemerataan spasial tidak berarti menyebarkan seluruh aktivitas secara sama, melainkan menciptakan cukup banyak pusat pertumbuhan agar penduduk mempunyai pilihan ekonomi tanpa harus selalu berpindah ke metropolitan utama.

Implikasi kebijakan dari pembahasan ini adalah perlunya evaluasi distributif pada setiap kebijakan utama. Pemerintah perlu menilai siapa penerima manfaat langsung dan tidak langsung, siapa menanggung biaya fiskal atau lingkungan, apakah kebijakan memperkuat kompetisi, serta apakah terdapat mekanisme koreksi jika manfaat terlalu terkonsentrasi. Pendekatan ini bukan anti-pertumbuhan. Justru distribusi yang lebih luas dapat memperbesar pasar domestik, memperkuat modal manusia, dan menciptakan dukungan politik bagi reformasi produktivitas.

Karena itu, keberhasilan pada tema ini perlu diuji melalui perubahan yang dapat diamati pada housing affordability, land value, rent, mortgage, dan urban planning. Pertanyaan yang tepat bukan hanya apakah indikator rata-rata membaik, tetapi apakah kelompok bawah bergerak lebih cepat, apakah kelas menengah menjadi lebih aman, apakah pekerja memperoleh bagian dari produktivitas, dan apakah keuntungan ekonomi semakin bergantung pada inovasi dibanding akses khusus. Inilah perbedaan antara pertumbuhan yang sekadar terjadi dan pembangunan yang memperluas kemampuan masyarakat.

27. Perempuan dan Distribusi Pertumbuhan

Pertumbuhan dapat memiliki dampak berbeda menurut gender karena perempuan menghadapi beban pengasuhan, diskriminasi upah, dan akses kerja formal yang berbeda. Perbedaan antara penciptaan nilai dan pembagian nilai merupakan inti analisis karena sektor yang tumbuh cepat belum tentu mempunyai keterkaitan luas dengan rumah tangga. Dalam konteks ini, labor participation, care economy, dan wage gap menjadi jalur penting yang menghubungkan aktivitas ekonomi dengan kesejahteraan. Karena Indonesia sangat beragam dalam struktur wilayah, pendidikan, kepemilikan aset, dan kesempatan kerja, satu angka nasional dapat menggambarkan arah umum tetapi tidak cukup menjelaskan pengalaman masyarakat. Analisis perlu bergerak sampai ke tingkat kelompok pendapatan, pekerjaan, gender, generasi, dan daerah.

Dimensi labor participation menunjukkan bahwa posisi awal sangat menentukan. Rumah tangga yang memiliki modal, tanah, pendidikan tinggi, jaringan bisnis, atau pekerjaan formal biasanya lebih mudah menangkap peluang baru. Sebaliknya, kelompok dengan aset terbatas sering harus menggunakan tambahan pendapatan untuk menutup kebutuhan dasar atau membayar utang. Akibatnya, tingkat pertumbuhan yang sama dapat menghasilkan akumulasi kekayaan yang sangat berbeda. Kebijakan publik harus menyadari efek kumulatif ini karena ketimpangan hari ini dapat menjadi ketimpangan kesempatan esok hari.

Dimensi care economy berkaitan dengan kekuatan tawar. Dalam pasar yang ideal, produktivitas dan kompetisi mendorong pembagian manfaat yang relatif efisien. Dalam praktik, informasi tidak sempurna, pasar dapat terkonsentrasi, dan pekerja atau pemasok kecil sering menghadapi pilihan terbatas. Ketika posisi tawar tidak seimbang, kenaikan nilai tambah dapat lebih banyak menjadi margin keuntungan daripada upah atau harga yang diterima produsen kecil. Institusi persaingan, hukum kontrak, organisasi pekerja, dan keterbukaan informasi karena itu memengaruhi distribusi hasil.

Dimensi wage gap memperlihatkan peran negara sebagai pembentuk distribusi sebelum dan sesudah pasar. Sebelum pasar, negara memengaruhi kualitas pendidikan, kesehatan, infrastruktur, hak atas tanah, dan aturan kompetisi. Setelah pasar, negara menggunakan pajak, transfer, subsidi, dan layanan publik untuk memodifikasi hasil. Perdebatan tentang pemerataan sering terlalu berfokus pada redistribusi setelah pendapatan terbentuk, padahal kebijakan yang membentuk kesempatan awal dapat lebih efektif dan lebih bermartabat dalam jangka panjang.

Selanjutnya, entrepreneurship menuntut perhatian terhadap waktu. Kelompok yang tidak menikmati manfaat sekarang mungkin dapat memperoleh manfaat di masa depan apabila pertumbuhan menghasilkan investasi, keterampilan, dan pasar baru. Namun janji tersebut hanya kredibel jika terdapat mekanisme nyata yang menghubungkan pertumbuhan hari ini dengan kesempatan esok hari. Tanpa jalur mobilitas, masyarakat akan melihat pertumbuhan sebagai keuntungan bagi kelompok lain. Persepsi semacam itu dapat menurunkan kepercayaan dan dukungan terhadap reformasi.

Dimensi social norms menekankan bahwa distribusi yang baik tidak sama dengan membagi hasil secara seragam. Pembangunan membutuhkan insentif bagi inovasi, investasi, kewirausahaan, dan pengambilan risiko. Yang perlu dijaga adalah agar keuntungan luar biasa berasal dari penciptaan nilai dan kompetisi, bukan dari rente, monopoli, atau akses politik. Dengan kata lain, ketimpangan yang berasal dari inovasi produktif mempunyai implikasi berbeda dari ketimpangan yang berasal dari privilese kelembagaan.

Pada tingkat rumah tangga, manfaat pertumbuhan seharusnya terlihat melalui kombinasi peningkatan pendapatan riil, stabilitas pekerjaan, akses pelayanan publik, dan kemampuan menabung atau memiliki aset. Jika kenaikan pendapatan nominal habis oleh biaya perumahan, transportasi, pendidikan, atau kesehatan, pengalaman kesejahteraan dapat tertinggal dari statistik makro. Karena itu, ukuran distribusi perlu menggabungkan pendapatan dengan biaya hidup dan kualitas layanan yang diterima.

Pada tingkat perusahaan, pertumbuhan inklusif berarti semakin banyak perusahaan produktif mampu memasuki pasar, tumbuh, dan menghubungkan diri dengan rantai nilai yang lebih besar. Ekonomi yang didominasi sedikit perusahaan sangat produktif dan banyak usaha mikro berproduktivitas rendah akan menghasilkan dualisme. Kebijakan harus memfasilitasi transisi perusahaan dari mikro menuju kecil dan menengah melalui pembiayaan, manajemen, teknologi, standardisasi, dan akses pasar, bukan hanya memberikan bantuan yang mempertahankan skala kecil.

Pada tingkat daerah, labor participation dan entrepreneurship harus dianalisis bersama. Daerah yang telah memiliki infrastruktur, tenaga terampil, pasar besar, dan jaringan pemasok cenderung terus menarik investasi sehingga muncul efek aglomerasi. Efisiensi aglomerasi penting, tetapi negara juga perlu mengurangi biaya konektivitas dan membangun kapasitas kota serta kawasan di luar pusat lama. Pemerataan spasial tidak berarti menyebarkan seluruh aktivitas secara sama, melainkan menciptakan cukup banyak pusat pertumbuhan agar penduduk mempunyai pilihan ekonomi tanpa harus selalu berpindah ke metropolitan utama.

Implikasi kebijakan dari pembahasan ini adalah perlunya evaluasi distributif pada setiap kebijakan utama. Pemerintah perlu menilai siapa penerima manfaat langsung dan tidak langsung, siapa menanggung biaya fiskal atau lingkungan, apakah kebijakan memperkuat kompetisi, serta apakah terdapat mekanisme koreksi jika manfaat terlalu terkonsentrasi. Pendekatan ini bukan anti-pertumbuhan. Justru distribusi yang lebih luas dapat memperbesar pasar domestik, memperkuat modal manusia, dan menciptakan dukungan politik bagi reformasi produktivitas.

Karena itu, keberhasilan pada tema ini perlu diuji melalui perubahan yang dapat diamati pada labor participation, care economy, wage gap, entrepreneurship, dan social norms. Pertanyaan yang tepat bukan hanya apakah indikator rata-rata membaik, tetapi apakah kelompok bawah bergerak lebih cepat, apakah kelas menengah menjadi lebih aman, apakah pekerja memperoleh bagian dari produktivitas, dan apakah keuntungan ekonomi semakin bergantung pada inovasi dibanding akses khusus. Inilah perbedaan antara pertumbuhan yang sekadar terjadi dan pembangunan yang memperluas kemampuan masyarakat.

28. Generasi Muda dan Janji Mobilitas Sosial

Pemuda menilai keberhasilan ekonomi melalui peluang kerja, rumah, pendidikan, dan prospek naik kelas, bukan hanya angka pertumbuhan nasional. Dalam ekonomi politik, distribusi manfaat tidak terjadi setelah pertumbuhan selesai; distribusi dibentuk sejak proses produksi, pengaturan pasar, dan penetapan hak atas aset. Dalam konteks ini, youth employment, skills mismatch, dan housing menjadi jalur penting yang menghubungkan aktivitas ekonomi dengan kesejahteraan. Karena Indonesia sangat beragam dalam struktur wilayah, pendidikan, kepemilikan aset, dan kesempatan kerja, satu angka nasional dapat menggambarkan arah umum tetapi tidak cukup menjelaskan pengalaman masyarakat. Analisis perlu bergerak sampai ke tingkat kelompok pendapatan, pekerjaan, gender, generasi, dan daerah.

Dimensi youth employment menunjukkan bahwa posisi awal sangat menentukan. Rumah tangga yang memiliki modal, tanah, pendidikan tinggi, jaringan bisnis, atau pekerjaan formal biasanya lebih mudah menangkap peluang baru. Sebaliknya, kelompok dengan aset terbatas sering harus menggunakan tambahan pendapatan untuk menutup kebutuhan dasar atau membayar utang. Akibatnya, tingkat pertumbuhan yang sama dapat menghasilkan akumulasi kekayaan yang sangat berbeda. Kebijakan publik harus menyadari efek kumulatif ini karena ketimpangan hari ini dapat menjadi ketimpangan kesempatan esok hari.

Dimensi skills mismatch berkaitan dengan kekuatan tawar. Dalam pasar yang ideal, produktivitas dan kompetisi mendorong pembagian manfaat yang relatif efisien. Dalam praktik, informasi tidak sempurna, pasar dapat terkonsentrasi, dan pekerja atau pemasok kecil sering menghadapi pilihan terbatas. Ketika

posisi tawar tidak seimbang, kenaikan nilai tambah dapat lebih banyak menjadi margin keuntungan daripada upah atau harga yang diterima produsen kecil. Institusi persaingan, hukum kontrak, organisasi pekerja, dan keterbukaan informasi karena itu memengaruhi distribusi hasil.

Dimensi housing memperlihatkan peran negara sebagai pembentuk distribusi sebelum dan sesudah pasar. Sebelum pasar, negara memengaruhi kualitas pendidikan, kesehatan, infrastruktur, hak atas tanah, dan aturan kompetisi. Setelah pasar, negara menggunakan pajak, transfer, subsidi, dan layanan publik untuk memodifikasi hasil. Perdebatan tentang pemerataan sering terlalu berfokus pada redistribusi setelah pendapatan terbentuk, padahal kebijakan yang membentuk kesempatan awal dapat lebih efektif dan lebih bermartabat dalam jangka panjang.

Selanjutnya, digital work menuntut perhatian terhadap waktu. Kelompok yang tidak menikmati manfaat sekarang mungkin dapat memperoleh manfaat di masa depan apabila pertumbuhan menghasilkan investasi, keterampilan, dan pasar baru. Namun janji tersebut hanya kredibel jika terdapat mekanisme nyata yang menghubungkan pertumbuhan hari ini dengan kesempatan esok hari. Tanpa jalur mobilitas, masyarakat akan melihat pertumbuhan sebagai keuntungan bagi kelompok lain. Persepsi semacam itu dapat menurunkan kepercayaan dan dukungan terhadap reformasi.

Dimensi intergenerational mobility menekankan bahwa distribusi yang baik tidak sama dengan membagi hasil secara seragam. Pembangunan membutuhkan insentif bagi inovasi, investasi, kewirausahaan, dan pengambilan risiko. Yang perlu dijaga adalah agar keuntungan luar biasa berasal dari penciptaan nilai dan kompetisi, bukan dari rente, monopoli, atau akses politik. Dengan kata lain, ketimpangan yang berasal dari inovasi produktif mempunyai implikasi berbeda dari ketimpangan yang berasal dari privilese kelembagaan.

Pada tingkat rumah tangga, manfaat pertumbuhan seharusnya terlihat melalui kombinasi peningkatan pendapatan riil, stabilitas pekerjaan, akses pelayanan publik, dan kemampuan menabung atau memiliki aset. Jika kenaikan pendapatan nominal habis oleh biaya perumahan, transportasi, pendidikan, atau kesehatan, pengalaman kesejahteraan dapat tertinggal dari statistik makro. Karena itu, ukuran distribusi perlu menggabungkan pendapatan dengan biaya hidup dan kualitas layanan yang diterima.

Pada tingkat perusahaan, pertumbuhan inklusif berarti semakin banyak perusahaan produktif mampu memasuki pasar, tumbuh, dan menghubungkan diri dengan rantai nilai yang lebih besar. Ekonomi yang didominasi sedikit perusahaan sangat produktif dan banyak usaha mikro berproduktivitas rendah akan menghasilkan dualisme. Kebijakan harus memfasilitasi transisi perusahaan dari mikro menuju kecil dan menengah melalui pembiayaan, manajemen, teknologi, standardisasi, dan akses pasar, bukan hanya memberikan bantuan yang mempertahankan skala kecil.

Pada tingkat daerah, youth employment dan digital work harus dianalisis bersama. Daerah yang telah memiliki infrastruktur, tenaga terampil, pasar besar, dan jaringan pemasok cenderung terus menarik investasi sehingga muncul efek aglomerasi. Efisiensi aglomerasi penting, tetapi negara juga perlu mengurangi biaya konektivitas dan membangun kapasitas kota serta kawasan di luar pusat lama. Pemerataan spasial tidak berarti menyebarkan seluruh aktivitas secara sama, melainkan menciptakan cukup banyak pusat pertumbuhan agar penduduk mempunyai pilihan ekonomi tanpa harus selalu berpindah ke metropolitan utama.

Implikasi kebijakan dari pembahasan ini adalah perlunya evaluasi distributif pada setiap kebijakan utama. Pemerintah perlu menilai siapa penerima manfaat langsung dan tidak langsung, siapa

menanggung biaya fiskal atau lingkungan, apakah kebijakan memperkuat kompetisi, serta apakah terdapat mekanisme koreksi jika manfaat terlalu terkonsentrasi. Pendekatan ini bukan anti-pertumbuhan. Justru distribusi yang lebih luas dapat memperbesar pasar domestik, memperkuat modal manusia, dan menciptakan dukungan politik bagi reformasi produktivitas.

Karena itu, keberhasilan pada tema ini perlu diuji melalui perubahan yang dapat diamati pada youth employment, skills mismatch, housing, digital work, dan intergenerational mobility. Pertanyaan yang tepat bukan hanya apakah indikator rata-rata membaik, tetapi apakah kelompok bawah bergerak lebih cepat, apakah kelas menengah menjadi lebih aman, apakah pekerja memperoleh bagian dari produktivitas, dan apakah keuntungan ekonomi semakin bergantung pada inovasi dibanding akses khusus. Inilah perbedaan antara pertumbuhan yang sekadar terjadi dan pembangunan yang memperluas kemampuan masyarakat.

29. Daerah dan Geografi Pertumbuhan

Kontribusi Jawa 56,47 persen terhadap PDB triwulan II-2026 menunjukkan bahwa geografi ekonomi masih terkonsentrasi. Cara masyarakat menikmati pertumbuhan ditentukan oleh posisi mereka dalam pasar kerja, kepemilikan aset, akses kepada layanan, dan kemampuan memengaruhi aturan. Dalam konteks ini, Jawa, luar Jawa, dan urbanization menjadi jalur penting yang menghubungkan aktivitas ekonomi dengan kesejahteraan. Karena Indonesia sangat beragam dalam struktur wilayah, pendidikan, kepemilikan aset, dan kesempatan kerja, satu angka nasional dapat menggambarkan arah umum tetapi tidak cukup menjelaskan pengalaman masyarakat. Analisis perlu bergerak sampai ke tingkat kelompok pendapatan, pekerjaan, gender, generasi, dan daerah.

Dimensi Jawa menunjukkan bahwa posisi awal sangat menentukan. Rumah tangga yang memiliki modal, tanah, pendidikan tinggi, jaringan bisnis, atau pekerjaan formal biasanya lebih mudah menangkap peluang baru. Sebaliknya, kelompok dengan aset terbatas sering harus menggunakan tambahan pendapatan untuk menutup kebutuhan dasar atau membayar utang. Akibatnya, tingkat pertumbuhan yang sama dapat menghasilkan akumulasi kekayaan yang sangat berbeda. Kebijakan publik harus menyadari efek kumulatif ini karena ketimpangan hari ini dapat menjadi ketimpangan kesempatan esok hari.

Dimensi luar Jawa berkaitan dengan kekuatan tawar. Dalam pasar yang ideal, produktivitas dan kompetisi mendorong pembagian manfaat yang relatif efisien. Dalam praktik, informasi tidak sempurna, pasar dapat terkonsentrasi, dan pekerja atau pemasok kecil sering menghadapi pilihan terbatas. Ketika posisi tawar tidak seimbang, kenaikan nilai tambah dapat lebih banyak menjadi margin keuntungan daripada upah atau harga yang diterima produsen kecil. Institusi persaingan, hukum kontrak, organisasi pekerja, dan keterbukaan informasi karena itu memengaruhi distribusi hasil.

Dimensi urbanization memperlihatkan peran negara sebagai pembentuk distribusi sebelum dan sesudah pasar. Sebelum pasar, negara memengaruhi kualitas pendidikan, kesehatan, infrastruktur, hak atas tanah, dan aturan kompetisi. Setelah pasar, negara menggunakan pajak, transfer, subsidi, dan layanan publik untuk memodifikasi hasil. Perdebatan tentang pemerataan sering terlalu berfokus pada redistribusi setelah pendapatan terbentuk, padahal kebijakan yang membentuk kesempatan awal dapat lebih efektif dan lebih bermartabat dalam jangka panjang.

Selanjutnya, infrastructure menuntut perhatian terhadap waktu. Kelompok yang tidak menikmati manfaat sekarang mungkin dapat memperoleh manfaat di masa depan apabila pertumbuhan menghasilkan investasi, keterampilan, dan pasar baru. Namun janji tersebut hanya kredibel jika terdapat mekanisme nyata yang menghubungkan pertumbuhan hari ini dengan kesempatan esok hari. Tanpa jalur mobilitas, masyarakat akan melihat pertumbuhan sebagai keuntungan bagi kelompok lain. Persepsi semacam itu dapat menurunkan kepercayaan dan dukungan terhadap reformasi.

Dimensi fiscal transfers menekankan bahwa distribusi yang baik tidak sama dengan membagi hasil secara seragam. Pembangunan membutuhkan insentif bagi inovasi, investasi, kewirausahaan, dan pengambilan risiko. Yang perlu dijaga adalah agar keuntungan luar biasa berasal dari penciptaan nilai dan kompetisi, bukan dari rente, monopoli, atau akses politik. Dengan kata lain, ketimpangan yang berasal dari inovasi produktif mempunyai implikasi berbeda dari ketimpangan yang berasal dari privilese kelembagaan.

Pada tingkat rumah tangga, manfaat pertumbuhan seharusnya terlihat melalui kombinasi peningkatan pendapatan riil, stabilitas pekerjaan, akses pelayanan publik, dan kemampuan menabung atau memiliki aset. Jika kenaikan pendapatan nominal habis oleh biaya perumahan, transportasi, pendidikan, atau kesehatan, pengalaman kesejahteraan dapat tertinggal dari statistik makro. Karena itu, ukuran distribusi perlu menggabungkan pendapatan dengan biaya hidup dan kualitas layanan yang diterima.

Pada tingkat perusahaan, pertumbuhan inklusif berarti semakin banyak perusahaan produktif mampu memasuki pasar, tumbuh, dan menghubungkan diri dengan rantai nilai yang lebih besar. Ekonomi yang didominasi sedikit perusahaan sangat produktif dan banyak usaha mikro berproduktivitas rendah akan menghasilkan dualisme. Kebijakan harus memfasilitasi transisi perusahaan dari mikro menuju kecil dan menengah melalui pembiayaan, manajemen, teknologi, standardisasi, dan akses pasar, bukan hanya memberikan bantuan yang mempertahankan skala kecil.

Pada tingkat daerah, Jawa dan infrastructure harus dianalisis bersama. Daerah yang telah memiliki infrastruktur, tenaga terampil, pasar besar, dan jaringan pemasok cenderung terus menarik investasi sehingga muncul efek aglomerasi. Efisiensi aglomerasi penting, tetapi negara juga perlu mengurangi biaya konektivitas dan membangun kapasitas kota serta kawasan di luar pusat lama. Pemerataan spasial tidak berarti menyebarkan seluruh aktivitas secara sama, melainkan menciptakan cukup banyak pusat pertumbuhan agar penduduk mempunyai pilihan ekonomi tanpa harus selalu berpindah ke metropolitan utama.

Implikasi kebijakan dari pembahasan ini adalah perlunya evaluasi distributif pada setiap kebijakan utama. Pemerintah perlu menilai siapa penerima manfaat langsung dan tidak langsung, siapa menanggung biaya fiskal atau lingkungan, apakah kebijakan memperkuat kompetisi, serta apakah terdapat mekanisme koreksi jika manfaat terlalu terkonsentrasi. Pendekatan ini bukan anti-pertumbuhan. Justru distribusi yang lebih luas dapat memperbesar pasar domestik, memperkuat modal manusia, dan menciptakan dukungan politik bagi reformasi produktivitas.

Karena itu, keberhasilan pada tema ini perlu diuji melalui perubahan yang dapat diamati pada Jawa, luar Jawa, urbanization, infrastructure, dan fiscal transfers. Pertanyaan yang tepat bukan hanya apakah indikator rata-rata membaik, tetapi apakah kelompok bawah bergerak lebih cepat, apakah kelas menengah menjadi lebih aman, apakah pekerja memperoleh bagian dari produktivitas, dan apakah

keuntungan ekonomi semakin bergantung pada inovasi dibanding akses khusus. Inilah perbedaan antara pertumbuhan yang sekadar terjadi dan pembangunan yang memperluas kemampuan masyarakat.

30. Kota Besar dan Ekonomi Aglomerasi

Kota menciptakan produktivitas melalui aglomerasi, tetapi manfaatnya dapat dikurangi oleh kemacetan, biaya rumah, polusi, dan segregasi spasial. Pertanyaan distribusional harus memeriksa bukan hanya pendapatan saat ini, tetapi juga keamanan ekonomi dan kemampuan memperoleh peluang di masa depan. Dalam konteks ini, agglomeration, commuting, dan housing menjadi jalur penting yang menghubungkan aktivitas ekonomi dengan kesejahteraan. Karena Indonesia sangat beragam dalam struktur wilayah, pendidikan, kepemilikan aset, dan kesempatan kerja, satu angka nasional dapat menggambarkan arah umum tetapi tidak cukup menjelaskan pengalaman masyarakat. Analisis perlu bergerak sampai ke tingkat kelompok pendapatan, pekerjaan, gender, generasi, dan daerah.

Dimensi agglomeration menunjukkan bahwa posisi awal sangat menentukan. Rumah tangga yang memiliki modal, tanah, pendidikan tinggi, jaringan bisnis, atau pekerjaan formal biasanya lebih mudah menangkap peluang baru. Sebaliknya, kelompok dengan aset terbatas sering harus menggunakan tambahan pendapatan untuk menutup kebutuhan dasar atau membayar utang. Akibatnya, tingkat pertumbuhan yang sama dapat menghasilkan akumulasi kekayaan yang sangat berbeda. Kebijakan publik harus menyadari efek kumulatif ini karena ketimpangan hari ini dapat menjadi ketimpangan kesempatan esok hari.

Dimensi commuting berkaitan dengan kekuatan tawar. Dalam pasar yang ideal, produktivitas dan kompetisi mendorong pembagian manfaat yang relatif efisien. Dalam praktik, informasi tidak sempurna, pasar dapat terkonsentrasi, dan pekerja atau pemasok kecil sering menghadapi pilihan terbatas. Ketika posisi tawar tidak seimbang, kenaikan nilai tambah dapat lebih banyak menjadi margin keuntungan daripada upah atau harga yang diterima produsen kecil. Institusi persaingan, hukum kontrak, organisasi pekerja, dan keterbukaan informasi karena itu memengaruhi distribusi hasil.

Dimensi housing memperlihatkan peran negara sebagai pembentuk distribusi sebelum dan sesudah pasar. Sebelum pasar, negara memengaruhi kualitas pendidikan, kesehatan, infrastruktur, hak atas tanah, dan aturan kompetisi. Setelah pasar, negara menggunakan pajak, transfer, subsidi, dan layanan publik untuk memodifikasi hasil. Perdebatan tentang pemerataan sering terlalu berfokus pada redistribusi setelah pendapatan terbentuk, padahal kebijakan yang membentuk kesempatan awal dapat lebih efektif dan lebih bermartabat dalam jangka panjang.

Selanjutnya, public transport menuntut perhatian terhadap waktu. Kelompok yang tidak menikmati manfaat sekarang mungkin dapat memperoleh manfaat di masa depan apabila pertumbuhan menghasilkan investasi, keterampilan, dan pasar baru. Namun janji tersebut hanya kredibel jika terdapat mekanisme nyata yang menghubungkan pertumbuhan hari ini dengan kesempatan esok hari. Tanpa jalur mobilitas, masyarakat akan melihat pertumbuhan sebagai keuntungan bagi kelompok lain. Persepsi semacam itu dapat menurunkan kepercayaan dan dukungan terhadap reformasi.

Dimensi urban inequality menekankan bahwa distribusi yang baik tidak sama dengan membagi hasil secara seragam. Pembangunan membutuhkan insentif bagi inovasi, investasi, kewirausahaan, dan pengambilan risiko. Yang perlu dijaga adalah agar keuntungan luar biasa berasal dari penciptaan nilai dan kompetisi, bukan dari rente, monopoli, atau akses politik. Dengan kata lain, ketimpangan yang berasal

dari inovasi produktif mempunyai implikasi berbeda dari ketimpangan yang berasal dari privilese kelembagaan.

Pada tingkat rumah tangga, manfaat pertumbuhan seharusnya terlihat melalui kombinasi peningkatan pendapatan riil, stabilitas pekerjaan, akses pelayanan publik, dan kemampuan menabung atau memiliki aset. Jika kenaikan pendapatan nominal habis oleh biaya perumahan, transportasi, pendidikan, atau kesehatan, pengalaman kesejahteraan dapat tertinggal dari statistik makro. Karena itu, ukuran distribusi perlu menggabungkan pendapatan dengan biaya hidup dan kualitas layanan yang diterima.

Pada tingkat perusahaan, pertumbuhan inklusif berarti semakin banyak perusahaan produktif mampu memasuki pasar, tumbuh, dan menghubungkan diri dengan rantai nilai yang lebih besar. Ekonomi yang didominasi sedikit perusahaan sangat produktif dan banyak usaha mikro berproduktivitas rendah akan menghasilkan dualisme. Kebijakan harus memfasilitasi transisi perusahaan dari mikro menuju kecil dan menengah melalui pembiayaan, manajemen, teknologi, standardisasi, dan akses pasar, bukan hanya memberikan bantuan yang mempertahankan skala kecil.

Pada tingkat daerah, agglomeration dan public transport harus dianalisis bersama. Daerah yang telah memiliki infrastruktur, tenaga terampil, pasar besar, dan jaringan pemasok cenderung terus menarik investasi sehingga muncul efek aglomerasi. Efisiensi aglomerasi penting, tetapi negara juga perlu mengurangi biaya konektivitas dan membangun kapasitas kota serta kawasan di luar pusat lama. Pemerataan spasial tidak berarti menyebarkan seluruh aktivitas secara sama, melainkan menciptakan cukup banyak pusat pertumbuhan agar penduduk mempunyai pilihan ekonomi tanpa harus selalu berpindah ke metropolitan utama.

Implikasi kebijakan dari pembahasan ini adalah perlunya evaluasi distributif pada setiap kebijakan utama. Pemerintah perlu menilai siapa penerima manfaat langsung dan tidak langsung, siapa menanggung biaya fiskal atau lingkungan, apakah kebijakan memperkuat kompetisi, serta apakah terdapat mekanisme koreksi jika manfaat terlalu terkonsentrasi. Pendekatan ini bukan anti-pertumbuhan. Justru distribusi yang lebih luas dapat memperbesar pasar domestik, memperkuat modal manusia, dan menciptakan dukungan politik bagi reformasi produktivitas.

Karena itu, keberhasilan pada tema ini perlu diuji melalui perubahan yang dapat diamati pada agglomeration, commuting, housing, public transport, dan urban inequality. Pertanyaan yang tepat bukan hanya apakah indikator rata-rata membaik, tetapi apakah kelompok bawah bergerak lebih cepat, apakah kelas menengah menjadi lebih aman, apakah pekerja memperoleh bagian dari produktivitas, dan apakah keuntungan ekonomi semakin bergantung pada inovasi dibanding akses khusus. Inilah perbedaan antara pertumbuhan yang sekadar terjadi dan pembangunan yang memperluas kemampuan masyarakat.

31. Desa dan Ekonomi Lokal

Pertumbuhan inklusif membutuhkan desa yang terhubung dengan pasar, teknologi, layanan, dan sumber pekerjaan nonpertanian. Perbedaan antara penciptaan nilai dan pembagian nilai merupakan inti analisis karena sektor yang tumbuh cepat belum tentu mempunyai keterkaitan luas dengan rumah tangga. Dalam konteks ini, rural infrastructure, BUMDes, dan agroindustry menjadi jalur penting yang menghubungkan aktivitas ekonomi dengan kesejahteraan. Karena Indonesia sangat beragam dalam struktur wilayah, pendidikan, kepemilikan aset, dan kesempatan kerja, satu angka nasional dapat menggambarkan arah

umum tetapi tidak cukup menjelaskan pengalaman masyarakat. Analisis perlu bergerak sampai ke tingkat kelompok pendapatan, pekerjaan, gender, generasi, dan daerah.

Dimensi rural infrastructure menunjukkan bahwa posisi awal sangat menentukan. Rumah tangga yang memiliki modal, tanah, pendidikan tinggi, jaringan bisnis, atau pekerjaan formal biasanya lebih mudah menangkap peluang baru. Sebaliknya, kelompok dengan aset terbatas sering harus menggunakan tambahan pendapatan untuk menutup kebutuhan dasar atau membayar utang. Akibatnya, tingkat pertumbuhan yang sama dapat menghasilkan akumulasi kekayaan yang sangat berbeda. Kebijakan publik harus menyadari efek kumulatif ini karena ketimpangan hari ini dapat menjadi ketimpangan kesempatan esok hari.

Dimensi BUMDes berkaitan dengan kekuatan tawar. Dalam pasar yang ideal, produktivitas dan kompetisi mendorong pembagian manfaat yang relatif efisien. Dalam praktik, informasi tidak sempurna, pasar dapat terkonsentrasi, dan pekerja atau pemasok kecil sering menghadapi pilihan terbatas. Ketika posisi tawar tidak seimbang, kenaikan nilai tambah dapat lebih banyak menjadi margin keuntungan daripada upah atau harga yang diterima produsen kecil. Institusi persaingan, hukum kontrak, organisasi pekerja, dan keterbukaan informasi karena itu memengaruhi distribusi hasil.

Dimensi agroindustry memperlihatkan peran negara sebagai pembentuk distribusi sebelum dan sesudah pasar. Sebelum pasar, negara memengaruhi kualitas pendidikan, kesehatan, infrastruktur, hak atas tanah, dan aturan kompetisi. Setelah pasar, negara menggunakan pajak, transfer, subsidi, dan layanan publik untuk memodifikasi hasil. Perdebatan tentang pemerataan sering terlalu berfokus pada redistribusi setelah pendapatan terbentuk, padahal kebijakan yang membentuk kesempatan awal dapat lebih efektif dan lebih bermartabat dalam jangka panjang.

Selanjutnya, connectivity menuntut perhatian terhadap waktu. Kelompok yang tidak menikmati manfaat sekarang mungkin dapat memperoleh manfaat di masa depan apabila pertumbuhan menghasilkan investasi, keterampilan, dan pasar baru. Namun janji tersebut hanya kredibel jika terdapat mekanisme nyata yang menghubungkan pertumbuhan hari ini dengan kesempatan esok hari. Tanpa jalur mobilitas, masyarakat akan melihat pertumbuhan sebagai keuntungan bagi kelompok lain. Persepsi semacam itu dapat menurunkan kepercayaan dan dukungan terhadap reformasi.

Dimensi migration menekankan bahwa distribusi yang baik tidak sama dengan membagi hasil secara seragam. Pembangunan membutuhkan insentif bagi inovasi, investasi, kewirausahaan, dan pengambilan risiko. Yang perlu dijaga adalah agar keuntungan luar biasa berasal dari penciptaan nilai dan kompetisi, bukan dari rente, monopoli, atau akses politik. Dengan kata lain, ketimpangan yang berasal dari inovasi produktif mempunyai implikasi berbeda dari ketimpangan yang berasal dari privilese kelembagaan.

Pada tingkat rumah tangga, manfaat pertumbuhan seharusnya terlihat melalui kombinasi peningkatan pendapatan riil, stabilitas pekerjaan, akses pelayanan publik, dan kemampuan menabung atau memiliki aset. Jika kenaikan pendapatan nominal habis oleh biaya perumahan, transportasi, pendidikan, atau kesehatan, pengalaman kesejahteraan dapat tertinggal dari statistik makro. Karena itu, ukuran distribusi perlu menggabungkan pendapatan dengan biaya hidup dan kualitas layanan yang diterima.

Pada tingkat perusahaan, pertumbuhan inklusif berarti semakin banyak perusahaan produktif mampu memasuki pasar, tumbuh, dan menghubungkan diri dengan rantai nilai yang lebih besar. Ekonomi yang didominasi sedikit perusahaan sangat produktif dan banyak usaha mikro berproduktivitas rendah akan menghasilkan dualisme. Kebijakan harus memfasilitasi transisi perusahaan dari mikro menuju kecil dan

menengah melalui pembiayaan, manajemen, teknologi, standardisasi, dan akses pasar, bukan hanya memberikan bantuan yang mempertahankan skala kecil.

Pada tingkat daerah, rural infrastructure dan connectivity harus dianalisis bersama. Daerah yang telah memiliki infrastruktur, tenaga terampil, pasar besar, dan jaringan pemasok cenderung terus menarik investasi sehingga muncul efek aglomerasi. Efisiensi aglomerasi penting, tetapi negara juga perlu mengurangi biaya konektivitas dan membangun kapasitas kota serta kawasan di luar pusat lama. Pemerataan spasial tidak berarti menyebarkan seluruh aktivitas secara sama, melainkan menciptakan cukup banyak pusat pertumbuhan agar penduduk mempunyai pilihan ekonomi tanpa harus selalu berpindah ke metropolitan utama.

Implikasi kebijakan dari pembahasan ini adalah perlunya evaluasi distributif pada setiap kebijakan utama. Pemerintah perlu menilai siapa penerima manfaat langsung dan tidak langsung, siapa menanggung biaya fiskal atau lingkungan, apakah kebijakan memperkuat kompetisi, serta apakah terdapat mekanisme koreksi jika manfaat terlalu terkonsentrasi. Pendekatan ini bukan anti-pertumbuhan. Justru distribusi yang lebih luas dapat memperbesar pasar domestik, memperkuat modal manusia, dan menciptakan dukungan politik bagi reformasi produktivitas.

Karena itu, keberhasilan pada tema ini perlu diuji melalui perubahan yang dapat diamati pada rural infrastructure, BUMDes, agroindustry, connectivity, dan migration. Pertanyaan yang tepat bukan hanya apakah indikator rata-rata membaik, tetapi apakah kelompok bawah bergerak lebih cepat, apakah kelas menengah menjadi lebih aman, apakah pekerja memperoleh bagian dari produktivitas, dan apakah keuntungan ekonomi semakin bergantung pada inovasi dibanding akses khusus. Inilah perbedaan antara pertumbuhan yang sekadar terjadi dan pembangunan yang memperluas kemampuan masyarakat.

32. Digitalisasi dan Platform

Platform digital dapat memperluas pasar bagi UMKM dan pekerja, tetapi juga menciptakan konsentrasi data, komisi, dan ketergantungan pada algoritma. Dalam ekonomi politik, distribusi manfaat tidak terjadi setelah pertumbuhan selesai; distribusi dibentuk sejak proses produksi, pengaturan pasar, dan penetapan hak atas aset. Dalam konteks ini, platform power, gig work, dan data menjadi jalur penting yang menghubungkan aktivitas ekonomi dengan kesejahteraan. Karena Indonesia sangat beragam dalam struktur wilayah, pendidikan, kepemilikan aset, dan kesempatan kerja, satu angka nasional dapat menggambarkan arah umum tetapi tidak cukup menjelaskan pengalaman masyarakat. Analisis perlu bergerak sampai ke tingkat kelompok pendapatan, pekerjaan, gender, generasi, dan daerah.

Dimensi platform power menunjukkan bahwa posisi awal sangat menentukan. Rumah tangga yang memiliki modal, tanah, pendidikan tinggi, jaringan bisnis, atau pekerjaan formal biasanya lebih mudah menangkap peluang baru. Sebaliknya, kelompok dengan aset terbatas sering harus menggunakan tambahan pendapatan untuk menutup kebutuhan dasar atau membayar utang. Akibatnya, tingkat pertumbuhan yang sama dapat menghasilkan akumulasi kekayaan yang sangat berbeda. Kebijakan publik harus menyadari efek kumulatif ini karena ketimpangan hari ini dapat menjadi ketimpangan kesempatan esok hari.

Dimensi gig work berkaitan dengan kekuatan tawar. Dalam pasar yang ideal, produktivitas dan kompetisi mendorong pembagian manfaat yang relatif efisien. Dalam praktik, informasi tidak sempurna, pasar dapat terkonsentrasi, dan pekerja atau pemasok kecil sering menghadapi pilihan terbatas. Ketika posisi

tawar tidak seimbang, kenaikan nilai tambah dapat lebih banyak menjadi margin keuntungan daripada upah atau harga yang diterima produsen kecil. Institusi persaingan, hukum kontrak, organisasi pekerja, dan keterbukaan informasi karena itu memengaruhi distribusi hasil.

Dimensi data memperlihatkan peran negara sebagai pembentuk distribusi sebelum dan sesudah pasar. Sebelum pasar, negara memengaruhi kualitas pendidikan, kesehatan, infrastruktur, hak atas tanah, dan aturan kompetisi. Setelah pasar, negara menggunakan pajak, transfer, subsidi, dan layanan publik untuk memodifikasi hasil. Perdebatan tentang pemerataan sering terlalu berfokus pada redistribusi setelah pendapatan terbentuk, padahal kebijakan yang membentuk kesempatan awal dapat lebih efektif dan lebih bermartabat dalam jangka panjang.

Selanjutnya, commissions menuntut perhatian terhadap waktu. Kelompok yang tidak menikmati manfaat sekarang mungkin dapat memperoleh manfaat di masa depan apabila pertumbuhan menghasilkan investasi, keterampilan, dan pasar baru. Namun janji tersebut hanya kredibel jika terdapat mekanisme nyata yang menghubungkan pertumbuhan hari ini dengan kesempatan esok hari. Tanpa jalur mobilitas, masyarakat akan melihat pertumbuhan sebagai keuntungan bagi kelompok lain. Persepsi semacam itu dapat menurunkan kepercayaan dan dukungan terhadap reformasi.

Dimensi network effects menekankan bahwa distribusi yang baik tidak sama dengan membagi hasil secara seragam. Pembangunan membutuhkan insentif bagi inovasi, investasi, kewirausahaan, dan pengambilan risiko. Yang perlu dijaga adalah agar keuntungan luar biasa berasal dari penciptaan nilai dan kompetisi, bukan dari rente, monopoli, atau akses politik. Dengan kata lain, ketimpangan yang berasal dari inovasi produktif mempunyai implikasi berbeda dari ketimpangan yang berasal dari privilese kelembagaan.

Pada tingkat rumah tangga, manfaat pertumbuhan seharusnya terlihat melalui kombinasi peningkatan pendapatan riil, stabilitas pekerjaan, akses pelayanan publik, dan kemampuan menabung atau memiliki aset. Jika kenaikan pendapatan nominal habis oleh biaya perumahan, transportasi, pendidikan, atau kesehatan, pengalaman kesejahteraan dapat tertinggal dari statistik makro. Karena itu, ukuran distribusi perlu menggabungkan pendapatan dengan biaya hidup dan kualitas layanan yang diterima.

Pada tingkat perusahaan, pertumbuhan inklusif berarti semakin banyak perusahaan produktif mampu memasuki pasar, tumbuh, dan menghubungkan diri dengan rantai nilai yang lebih besar. Ekonomi yang didominasi sedikit perusahaan sangat produktif dan banyak usaha mikro berproduktivitas rendah akan menghasilkan dualisme. Kebijakan harus memfasilitasi transisi perusahaan dari mikro menuju kecil dan menengah melalui pembiayaan, manajemen, teknologi, standardisasi, dan akses pasar, bukan hanya memberikan bantuan yang mempertahankan skala kecil.

Pada tingkat daerah, platform power dan commissions harus dianalisis bersama. Daerah yang telah memiliki infrastruktur, tenaga terampil, pasar besar, dan jaringan pemasok cenderung terus menarik investasi sehingga muncul efek aglomerasi. Efisiensi aglomerasi penting, tetapi negara juga perlu mengurangi biaya konektivitas dan membangun kapasitas kota serta kawasan di luar pusat lama. Pemerataan spasial tidak berarti menyebarkan seluruh aktivitas secara sama, melainkan menciptakan cukup banyak pusat pertumbuhan agar penduduk mempunyai pilihan ekonomi tanpa harus selalu berpindah ke metropolitan utama.

Implikasi kebijakan dari pembahasan ini adalah perlunya evaluasi distributif pada setiap kebijakan utama. Pemerintah perlu menilai siapa penerima manfaat langsung dan tidak langsung, siapa

menanggung biaya fiskal atau lingkungan, apakah kebijakan memperkuat kompetisi, serta apakah terdapat mekanisme koreksi jika manfaat terlalu terkonsentrasi. Pendekatan ini bukan anti-pertumbuhan. Justru distribusi yang lebih luas dapat memperbesar pasar domestik, memperkuat modal manusia, dan menciptakan dukungan politik bagi reformasi produktivitas.

Karena itu, keberhasilan pada tema ini perlu diuji melalui perubahan yang dapat diamati pada platform power, gig work, data, commissions, dan network effects. Pertanyaan yang tepat bukan hanya apakah indikator rata-rata membaik, tetapi apakah kelompok bawah bergerak lebih cepat, apakah kelas menengah menjadi lebih aman, apakah pekerja memperoleh bagian dari produktivitas, dan apakah keuntungan ekonomi semakin bergantung pada inovasi dibanding akses khusus. Inilah perbedaan antara pertumbuhan yang sekadar terjadi dan pembangunan yang memperluas kemampuan masyarakat.

33. AI, Produktivitas, dan Distribusi Baru

AI berpotensi menaikkan produktivitas tetapi manfaatnya akan bergantung pada siapa yang memiliki teknologi, data, modal, dan keterampilan. Cara masyarakat menikmati pertumbuhan ditentukan oleh posisi mereka dalam pasar kerja, kepemilikan aset, akses kepada layanan, dan kemampuan memengaruhi aturan. Dalam konteks ini, automation, augmentation, dan AI skills menjadi jalur penting yang menghubungkan aktivitas ekonomi dengan kesejahteraan. Karena Indonesia sangat beragam dalam struktur wilayah, pendidikan, kepemilikan aset, dan kesempatan kerja, satu angka nasional dapat menggambarkan arah umum tetapi tidak cukup menjelaskan pengalaman masyarakat. Analisis perlu bergerak sampai ke tingkat kelompok pendapatan, pekerjaan, gender, generasi, dan daerah.

Dimensi automation menunjukkan bahwa posisi awal sangat menentukan. Rumah tangga yang memiliki modal, tanah, pendidikan tinggi, jaringan bisnis, atau pekerjaan formal biasanya lebih mudah menangkap peluang baru. Sebaliknya, kelompok dengan aset terbatas sering harus menggunakan tambahan pendapatan untuk menutup kebutuhan dasar atau membayar utang. Akibatnya, tingkat pertumbuhan yang sama dapat menghasilkan akumulasi kekayaan yang sangat berbeda. Kebijakan publik harus menyadari efek kumulatif ini karena ketimpangan hari ini dapat menjadi ketimpangan kesempatan esok hari.

Dimensi augmentation berkaitan dengan kekuatan tawar. Dalam pasar yang ideal, produktivitas dan kompetisi mendorong pembagian manfaat yang relatif efisien. Dalam praktik, informasi tidak sempurna, pasar dapat terkonsentrasi, dan pekerja atau pemasok kecil sering menghadapi pilihan terbatas. Ketika posisi tawar tidak seimbang, kenaikan nilai tambah dapat lebih banyak menjadi margin keuntungan daripada upah atau harga yang diterima produsen kecil. Institusi persaingan, hukum kontrak, organisasi pekerja, dan keterbukaan informasi karena itu memengaruhi distribusi hasil.

Dimensi AI skills memperlihatkan peran negara sebagai pembentuk distribusi sebelum dan sesudah pasar. Sebelum pasar, negara memengaruhi kualitas pendidikan, kesehatan, infrastruktur, hak atas tanah, dan aturan kompetisi. Setelah pasar, negara menggunakan pajak, transfer, subsidi, dan layanan publik untuk memodifikasi hasil. Perdebatan tentang pemerataan sering terlalu berfokus pada redistribusi setelah pendapatan terbentuk, padahal kebijakan yang membentuk kesempatan awal dapat lebih efektif dan lebih bermartabat dalam jangka panjang.

Selanjutnya, capital concentration menuntut perhatian terhadap waktu. Kelompok yang tidak menikmati manfaat sekarang mungkin dapat memperoleh manfaat di masa depan apabila pertumbuhan

menghasilkan investasi, keterampilan, dan pasar baru. Namun janji tersebut hanya kredibel jika terdapat mekanisme nyata yang menghubungkan pertumbuhan hari ini dengan kesempatan esok hari. Tanpa jalur mobilitas, masyarakat akan melihat pertumbuhan sebagai keuntungan bagi kelompok lain. Persepsi semacam itu dapat menurunkan kepercayaan dan dukungan terhadap reformasi.

Dimensi reskilling menekankan bahwa distribusi yang baik tidak sama dengan membagi hasil secara seragam. Pembangunan membutuhkan insentif bagi inovasi, investasi, kewirausahaan, dan pengambilan risiko. Yang perlu dijaga adalah agar keuntungan luar biasa berasal dari penciptaan nilai dan kompetisi, bukan dari rente, monopoli, atau akses politik. Dengan kata lain, ketimpangan yang berasal dari inovasi produktif mempunyai implikasi berbeda dari ketimpangan yang berasal dari privilese kelembagaan.

Pada tingkat rumah tangga, manfaat pertumbuhan seharusnya terlihat melalui kombinasi peningkatan pendapatan riil, stabilitas pekerjaan, akses pelayanan publik, dan kemampuan menabung atau memiliki aset. Jika kenaikan pendapatan nominal habis oleh biaya perumahan, transportasi, pendidikan, atau kesehatan, pengalaman kesejahteraan dapat tertinggal dari statistik makro. Karena itu, ukuran distribusi perlu menggabungkan pendapatan dengan biaya hidup dan kualitas layanan yang diterima.

Pada tingkat perusahaan, pertumbuhan inklusif berarti semakin banyak perusahaan produktif mampu memasuki pasar, tumbuh, dan menghubungkan diri dengan rantai nilai yang lebih besar. Ekonomi yang didominasi sedikit perusahaan sangat produktif dan banyak usaha mikro berproduktivitas rendah akan menghasilkan dualisme. Kebijakan harus memfasilitasi transisi perusahaan dari mikro menuju kecil dan menengah melalui pembiayaan, manajemen, teknologi, standardisasi, dan akses pasar, bukan hanya memberikan bantuan yang mempertahankan skala kecil.

Pada tingkat daerah, automation dan capital concentration harus dianalisis bersama. Daerah yang telah memiliki infrastruktur, tenaga terampil, pasar besar, dan jaringan pemasok cenderung terus menarik investasi sehingga muncul efek aglomerasi. Efisiensi aglomerasi penting, tetapi negara juga perlu mengurangi biaya konektivitas dan membangun kapasitas kota serta kawasan di luar pusat lama. Pemerataan spasial tidak berarti menyebarkan seluruh aktivitas secara sama, melainkan menciptakan cukup banyak pusat pertumbuhan agar penduduk mempunyai pilihan ekonomi tanpa harus selalu berpindah ke metropolitan utama.

Implikasi kebijakan dari pembahasan ini adalah perlunya evaluasi distributif pada setiap kebijakan utama. Pemerintah perlu menilai siapa penerima manfaat langsung dan tidak langsung, siapa menanggung biaya fiskal atau lingkungan, apakah kebijakan memperkuat kompetisi, serta apakah terdapat mekanisme koreksi jika manfaat terlalu terkonsentrasi. Pendekatan ini bukan anti-pertumbuhan. Justru distribusi yang lebih luas dapat memperbesar pasar domestik, memperkuat modal manusia, dan menciptakan dukungan politik bagi reformasi produktivitas.

Karena itu, keberhasilan pada tema ini perlu diuji melalui perubahan yang dapat diamati pada automation, augmentation, AI skills, capital concentration, dan reskilling. Pertanyaan yang tepat bukan hanya apakah indikator rata-rata membaik, tetapi apakah kelompok bawah bergerak lebih cepat, apakah kelas menengah menjadi lebih aman, apakah pekerja memperoleh bagian dari produktivitas, dan apakah keuntungan ekonomi semakin bergantung pada inovasi dibanding akses khusus. Inilah perbedaan antara pertumbuhan yang sekadar terjadi dan pembangunan yang memperluas kemampuan masyarakat.

34. Korupsi dan Rent Seeking

Rent seeking memindahkan manfaat pertumbuhan dari aktivitas produktif menuju aktor yang memiliki akses khusus terhadap regulasi, lisensi, kontrak, atau sumber daya. Pertanyaan distribusional harus memeriksa bukan hanya pendapatan saat ini, tetapi juga keamanan ekonomi dan kemampuan memperoleh peluang di masa depan. Dalam konteks ini, procurement, licensing, dan political access menjadi jalur penting yang menghubungkan aktivitas ekonomi dengan kesejahteraan. Karena Indonesia sangat beragam dalam struktur wilayah, pendidikan, kepemilikan aset, dan kesempatan kerja, satu angka nasional dapat menggambarkan arah umum tetapi tidak cukup menjelaskan pengalaman masyarakat. Analisis perlu bergerak sampai ke tingkat kelompok pendapatan, pekerjaan, gender, generasi, dan daerah.

Dimensi procurement menunjukkan bahwa posisi awal sangat menentukan. Rumah tangga yang memiliki modal, tanah, pendidikan tinggi, jaringan bisnis, atau pekerjaan formal biasanya lebih mudah menangkap peluang baru. Sebaliknya, kelompok dengan aset terbatas sering harus menggunakan tambahan pendapatan untuk menutup kebutuhan dasar atau membayar utang. Akibatnya, tingkat pertumbuhan yang sama dapat menghasilkan akumulasi kekayaan yang sangat berbeda. Kebijakan publik harus menyadari efek kumulatif ini karena ketimpangan hari ini dapat menjadi ketimpangan kesempatan esok hari.

Dimensi licensing berkaitan dengan kekuatan tawar. Dalam pasar yang ideal, produktivitas dan kompetisi mendorong pembagian manfaat yang relatif efisien. Dalam praktik, informasi tidak sempurna, pasar dapat terkonsentrasi, dan pekerja atau pemasok kecil sering menghadapi pilihan terbatas. Ketika posisi tawar tidak seimbang, kenaikan nilai tambah dapat lebih banyak menjadi margin keuntungan daripada upah atau harga yang diterima produsen kecil. Institusi persaingan, hukum kontrak, organisasi pekerja, dan keterbukaan informasi karena itu memengaruhi distribusi hasil.

Dimensi political access memperlihatkan peran negara sebagai pembentuk distribusi sebelum dan sesudah pasar. Sebelum pasar, negara memengaruhi kualitas pendidikan, kesehatan, infrastruktur, hak atas tanah, dan aturan kompetisi. Setelah pasar, negara menggunakan pajak, transfer, subsidi, dan layanan publik untuk memodifikasi hasil. Perdebatan tentang pemerataan sering terlalu berfokus pada redistribusi setelah pendapatan terbentuk, padahal kebijakan yang membentuk kesempatan awal dapat lebih efektif dan lebih bermartabat dalam jangka panjang.

Selanjutnya, monopoly menuntut perhatian terhadap waktu. Kelompok yang tidak menikmati manfaat sekarang mungkin dapat memperoleh manfaat di masa depan apabila pertumbuhan menghasilkan investasi, keterampilan, dan pasar baru. Namun janji tersebut hanya kredibel jika terdapat mekanisme nyata yang menghubungkan pertumbuhan hari ini dengan kesempatan esok hari. Tanpa jalur mobilitas, masyarakat akan melihat pertumbuhan sebagai keuntungan bagi kelompok lain. Persepsi semacam itu dapat menurunkan kepercayaan dan dukungan terhadap reformasi.

Dimensi public loss menekankan bahwa distribusi yang baik tidak sama dengan membagi hasil secara seragam. Pembangunan membutuhkan insentif bagi inovasi, investasi, kewirausahaan, dan pengambilan risiko. Yang perlu dijaga adalah agar keuntungan luar biasa berasal dari penciptaan nilai dan kompetisi, bukan dari rente, monopoli, atau akses politik. Dengan kata lain, ketimpangan yang berasal dari inovasi produktif mempunyai implikasi berbeda dari ketimpangan yang berasal dari privilese kelembagaan.

Pada tingkat rumah tangga, manfaat pertumbuhan seharusnya terlihat melalui kombinasi peningkatan pendapatan riil, stabilitas pekerjaan, akses pelayanan publik, dan kemampuan menabung atau memiliki aset. Jika kenaikan pendapatan nominal habis oleh biaya perumahan, transportasi, pendidikan, atau kesehatan, pengalaman kesejahteraan dapat tertinggal dari statistik makro. Karena itu, ukuran distribusi perlu menggabungkan pendapatan dengan biaya hidup dan kualitas layanan yang diterima.

Pada tingkat perusahaan, pertumbuhan inklusif berarti semakin banyak perusahaan produktif mampu memasuki pasar, tumbuh, dan menghubungkan diri dengan rantai nilai yang lebih besar. Ekonomi yang didominasi sedikit perusahaan sangat produktif dan banyak usaha mikro berproduktivitas rendah akan menghasilkan dualisme. Kebijakan harus memfasilitasi transisi perusahaan dari mikro menuju kecil dan menengah melalui pembiayaan, manajemen, teknologi, standardisasi, dan akses pasar, bukan hanya memberikan bantuan yang mempertahankan skala kecil.

Pada tingkat daerah, procurement dan monopoly harus dianalisis bersama. Daerah yang telah memiliki infrastruktur, tenaga terampil, pasar besar, dan jaringan pemasok cenderung terus menarik investasi sehingga muncul efek aglomerasi. Efisiensi aglomerasi penting, tetapi negara juga perlu mengurangi biaya konektivitas dan membangun kapasitas kota serta kawasan di luar pusat lama. Pemerataan spasial tidak berarti menyebarkan seluruh aktivitas secara sama, melainkan menciptakan cukup banyak pusat pertumbuhan agar penduduk mempunyai pilihan ekonomi tanpa harus selalu berpindah ke metropolitan utama.

Implikasi kebijakan dari pembahasan ini adalah perlunya evaluasi distributif pada setiap kebijakan utama. Pemerintah perlu menilai siapa penerima manfaat langsung dan tidak langsung, siapa menanggung biaya fiskal atau lingkungan, apakah kebijakan memperkuat kompetisi, serta apakah terdapat mekanisme koreksi jika manfaat terlalu terkonsentrasi. Pendekatan ini bukan anti-pertumbuhan. Justru distribusi yang lebih luas dapat memperbesar pasar domestik, memperkuat modal manusia, dan menciptakan dukungan politik bagi reformasi produktivitas.

Karena itu, keberhasilan pada tema ini perlu diuji melalui perubahan yang dapat diamati pada procurement, licensing, political access, monopoly, dan public loss. Pertanyaan yang tepat bukan hanya apakah indikator rata-rata membaik, tetapi apakah kelompok bawah bergerak lebih cepat, apakah kelas menengah menjadi lebih aman, apakah pekerja memperoleh bagian dari produktivitas, dan apakah keuntungan ekonomi semakin bergantung pada inovasi dibanding akses khusus. Inilah perbedaan antara pertumbuhan yang sekadar terjadi dan pembangunan yang memperluas kemampuan masyarakat.

35. Oligarki dan Pengaruh atas Kebijakan

Konsentrasi kekayaan dapat berubah menjadi konsentrasi pengaruh politik ketika pembiayaan, jaringan, dan akses terhadap pembuat keputusan tidak transparan. Perbedaan antara penciptaan nilai dan pembagian nilai merupakan inti analisis karena sektor yang tumbuh cepat belum tentu mempunyai keterkaitan luas dengan rumah tangga. Dalam konteks ini, campaign finance, lobbying, dan media power menjadi jalur penting yang menghubungkan aktivitas ekonomi dengan kesejahteraan. Karena Indonesia sangat beragam dalam struktur wilayah, pendidikan, kepemilikan aset, dan kesempatan kerja, satu angka nasional dapat menggambarkan arah umum tetapi tidak cukup menjelaskan pengalaman masyarakat. Analisis perlu bergerak sampai ke tingkat kelompok pendapatan, pekerjaan, gender, generasi, dan daerah.

Dimensi campaign finance menunjukkan bahwa posisi awal sangat menentukan. Rumah tangga yang memiliki modal, tanah, pendidikan tinggi, jaringan bisnis, atau pekerjaan formal biasanya lebih mudah menangkap peluang baru. Sebaliknya, kelompok dengan aset terbatas sering harus menggunakan tambahan pendapatan untuk menutup kebutuhan dasar atau membayar utang. Akibatnya, tingkat pertumbuhan yang sama dapat menghasilkan akumulasi kekayaan yang sangat berbeda. Kebijakan publik harus menyadari efek kumulatif ini karena ketimpangan hari ini dapat menjadi ketimpangan kesempatan esok hari.

Dimensi lobbying berkaitan dengan kekuatan tawar. Dalam pasar yang ideal, produktivitas dan kompetisi mendorong pembagian manfaat yang relatif efisien. Dalam praktik, informasi tidak sempurna, pasar dapat terkonsentrasi, dan pekerja atau pemasok kecil sering menghadapi pilihan terbatas. Ketika posisi tawar tidak seimbang, kenaikan nilai tambah dapat lebih banyak menjadi margin keuntungan daripada upah atau harga yang diterima produsen kecil. Institusi persaingan, hukum kontrak, organisasi pekerja, dan keterbukaan informasi karena itu memengaruhi distribusi hasil.

Dimensi media power memperlihatkan peran negara sebagai pembentuk distribusi sebelum dan sesudah pasar. Sebelum pasar, negara memengaruhi kualitas pendidikan, kesehatan, infrastruktur, hak atas tanah, dan aturan kompetisi. Setelah pasar, negara menggunakan pajak, transfer, subsidi, dan layanan publik untuk memodifikasi hasil. Perdebatan tentang pemerataan sering terlalu berfokus pada redistribusi setelah pendapatan terbentuk, padahal kebijakan yang membentuk kesempatan awal dapat lebih efektif dan lebih bermartabat dalam jangka panjang.

Selanjutnya, regulatory capture menuntut perhatian terhadap waktu. Kelompok yang tidak menikmati manfaat sekarang mungkin dapat memperoleh manfaat di masa depan apabila pertumbuhan menghasilkan investasi, keterampilan, dan pasar baru. Namun janji tersebut hanya kredibel jika terdapat mekanisme nyata yang menghubungkan pertumbuhan hari ini dengan kesempatan esok hari. Tanpa jalur mobilitas, masyarakat akan melihat pertumbuhan sebagai keuntungan bagi kelompok lain. Persepsi semacam itu dapat menurunkan kepercayaan dan dukungan terhadap reformasi.

Dimensi accountability menekankan bahwa distribusi yang baik tidak sama dengan membagi hasil secara seragam. Pembangunan membutuhkan insentif bagi inovasi, investasi, kewirausahaan, dan pengambilan risiko. Yang perlu dijaga adalah agar keuntungan luar biasa berasal dari penciptaan nilai dan kompetisi, bukan dari rente, monopoli, atau akses politik. Dengan kata lain, ketimpangan yang berasal dari inovasi produktif mempunyai implikasi berbeda dari ketimpangan yang berasal dari privilese kelembagaan.

Pada tingkat rumah tangga, manfaat pertumbuhan seharusnya terlihat melalui kombinasi peningkatan pendapatan riil, stabilitas pekerjaan, akses pelayanan publik, dan kemampuan menabung atau memiliki aset. Jika kenaikan pendapatan nominal habis oleh biaya perumahan, transportasi, pendidikan, atau kesehatan, pengalaman kesejahteraan dapat tertinggal dari statistik makro. Karena itu, ukuran distribusi perlu menggabungkan pendapatan dengan biaya hidup dan kualitas layanan yang diterima.

Pada tingkat perusahaan, pertumbuhan inklusif berarti semakin banyak perusahaan produktif mampu memasuki pasar, tumbuh, dan menghubungkan diri dengan rantai nilai yang lebih besar. Ekonomi yang didominasi sedikit perusahaan sangat produktif dan banyak usaha mikro berproduktivitas rendah akan menghasilkan dualisme. Kebijakan harus memfasilitasi transisi perusahaan dari mikro menuju kecil dan

menengah melalui pembiayaan, manajemen, teknologi, standardisasi, dan akses pasar, bukan hanya memberikan bantuan yang mempertahankan skala kecil.

Pada tingkat daerah, campaign finance dan regulatory capture harus dianalisis bersama. Daerah yang telah memiliki infrastruktur, tenaga terampil, pasar besar, dan jaringan pemasok cenderung terus menarik investasi sehingga muncul efek aglomerasi. Efisiensi aglomerasi penting, tetapi negara juga perlu mengurangi biaya konektivitas dan membangun kapasitas kota serta kawasan di luar pusat lama. Pemerataan spasial tidak berarti menyebarkan seluruh aktivitas secara sama, melainkan menciptakan cukup banyak pusat pertumbuhan agar penduduk mempunyai pilihan ekonomi tanpa harus selalu berpindah ke metropolitan utama.

Implikasi kebijakan dari pembahasan ini adalah perlunya evaluasi distributif pada setiap kebijakan utama. Pemerintah perlu menilai siapa penerima manfaat langsung dan tidak langsung, siapa menanggung biaya fiskal atau lingkungan, apakah kebijakan memperkuat kompetisi, serta apakah terdapat mekanisme koreksi jika manfaat terlalu terkonsentrasi. Pendekatan ini bukan anti-pertumbuhan. Justru distribusi yang lebih luas dapat memperbesar pasar domestik, memperkuat modal manusia, dan menciptakan dukungan politik bagi reformasi produktivitas.

Karena itu, keberhasilan pada tema ini perlu diuji melalui perubahan yang dapat diamati pada campaign finance, lobbying, media power, regulatory capture, dan accountability. Pertanyaan yang tepat bukan hanya apakah indikator rata-rata membaik, tetapi apakah kelompok bawah bergerak lebih cepat, apakah kelas menengah menjadi lebih aman, apakah pekerja memperoleh bagian dari produktivitas, dan apakah keuntungan ekonomi semakin bergantung pada inovasi dibanding akses khusus. Inilah perbedaan antara pertumbuhan yang sekadar terjadi dan pembangunan yang memperluas kemampuan masyarakat.

36. Lingkungan: Siapa Menikmati, Siapa Menanggung Biaya?

Pertumbuhan berbasis ekstraksi dapat menghasilkan keuntungan privat sementara biaya polusi, kehilangan ekosistem, dan risiko kesehatan ditanggung masyarakat. Dalam ekonomi politik, distribusi manfaat tidak terjadi setelah pertumbuhan selesai; distribusi dibentuk sejak proses produksi, pengaturan pasar, dan penetapan hak atas aset. Dalam konteks ini, externalities, pollution, dan resource extraction menjadi jalur penting yang menghubungkan aktivitas ekonomi dengan kesejahteraan. Karena Indonesia sangat beragam dalam struktur wilayah, pendidikan, kepemilikan aset, dan kesempatan kerja, satu angka nasional dapat menggambarkan arah umum tetapi tidak cukup menjelaskan pengalaman masyarakat. Analisis perlu bergerak sampai ke tingkat kelompok pendapatan, pekerjaan, gender, generasi, dan daerah.

Dimensi externalities menunjukkan bahwa posisi awal sangat menentukan. Rumah tangga yang memiliki modal, tanah, pendidikan tinggi, jaringan bisnis, atau pekerjaan formal biasanya lebih mudah menangkap peluang baru. Sebaliknya, kelompok dengan aset terbatas sering harus menggunakan tambahan pendapatan untuk menutup kebutuhan dasar atau membayar utang. Akibatnya, tingkat pertumbuhan yang sama dapat menghasilkan akumulasi kekayaan yang sangat berbeda. Kebijakan publik harus menyadari efek kumulatif ini karena ketimpangan hari ini dapat menjadi ketimpangan kesempatan esok hari.

Dimensi pollution berkaitan dengan kekuatan tawar. Dalam pasar yang ideal, produktivitas dan kompetisi mendorong pembagian manfaat yang relatif efisien. Dalam praktik, informasi tidak sempurna, pasar

dapat terkonsentrasi, dan pekerja atau pemasok kecil sering menghadapi pilihan terbatas. Ketika posisi tawar tidak seimbang, kenaikan nilai tambah dapat lebih banyak menjadi margin keuntungan daripada upah atau harga yang diterima produsen kecil. Institusi persaingan, hukum kontrak, organisasi pekerja, dan keterbukaan informasi karena itu memengaruhi distribusi hasil.

Dimensi resource extraction memperlihatkan peran negara sebagai pembentuk distribusi sebelum dan sesudah pasar. Sebelum pasar, negara memengaruhi kualitas pendidikan, kesehatan, infrastruktur, hak atas tanah, dan aturan kompetisi. Setelah pasar, negara menggunakan pajak, transfer, subsidi, dan layanan publik untuk memodifikasi hasil. Perdebatan tentang pemerataan sering terlalu berfokus pada redistribusi setelah pendapatan terbentuk, padahal kebijakan yang membentuk kesempatan awal dapat lebih efektif dan lebih bermartabat dalam jangka panjang.

Selanjutnya, climate risk menuntut perhatian terhadap waktu. Kelompok yang tidak menikmati manfaat sekarang mungkin dapat memperoleh manfaat di masa depan apabila pertumbuhan menghasilkan investasi, keterampilan, dan pasar baru. Namun janji tersebut hanya kredibel jika terdapat mekanisme nyata yang menghubungkan pertumbuhan hari ini dengan kesempatan esok hari. Tanpa jalur mobilitas, masyarakat akan melihat pertumbuhan sebagai keuntungan bagi kelompok lain. Persepsi semacam itu dapat menurunkan kepercayaan dan dukungan terhadap reformasi.

Dimensi environmental justice menekankan bahwa distribusi yang baik tidak sama dengan membagi hasil secara seragam. Pembangunan membutuhkan insentif bagi inovasi, investasi, kewirausahaan, dan pengambilan risiko. Yang perlu dijaga adalah agar keuntungan luar biasa berasal dari penciptaan nilai dan kompetisi, bukan dari rente, monopoli, atau akses politik. Dengan kata lain, ketimpangan yang berasal dari inovasi produktif mempunyai implikasi berbeda dari ketimpangan yang berasal dari privilese kelembagaan.

Pada tingkat rumah tangga, manfaat pertumbuhan seharusnya terlihat melalui kombinasi peningkatan pendapatan riil, stabilitas pekerjaan, akses pelayanan publik, dan kemampuan menabung atau memiliki aset. Jika kenaikan pendapatan nominal habis oleh biaya perumahan, transportasi, pendidikan, atau kesehatan, pengalaman kesejahteraan dapat tertinggal dari statistik makro. Karena itu, ukuran distribusi perlu menggabungkan pendapatan dengan biaya hidup dan kualitas layanan yang diterima.

Pada tingkat perusahaan, pertumbuhan inklusif berarti semakin banyak perusahaan produktif mampu memasuki pasar, tumbuh, dan menghubungkan diri dengan rantai nilai yang lebih besar. Ekonomi yang didominasi sedikit perusahaan sangat produktif dan banyak usaha mikro berproduktivitas rendah akan menghasilkan dualisme. Kebijakan harus memfasilitasi transisi perusahaan dari mikro menuju kecil dan menengah melalui pembiayaan, manajemen, teknologi, standardisasi, dan akses pasar, bukan hanya memberikan bantuan yang mempertahankan skala kecil.

Pada tingkat daerah, externalities dan climate risk harus dianalisis bersama. Daerah yang telah memiliki infrastruktur, tenaga terampil, pasar besar, dan jaringan pemasok cenderung terus menarik investasi sehingga muncul efek aglomerasi. Efisiensi aglomerasi penting, tetapi negara juga perlu mengurangi biaya konektivitas dan membangun kapasitas kota serta kawasan di luar pusat lama. Pemerataan spasial tidak berarti menyebarkan seluruh aktivitas secara sama, melainkan menciptakan cukup banyak pusat pertumbuhan agar penduduk mempunyai pilihan ekonomi tanpa harus selalu berpindah ke metropolitan utama.

Implikasi kebijakan dari pembahasan ini adalah perlunya evaluasi distributif pada setiap kebijakan utama. Pemerintah perlu menilai siapa penerima manfaat langsung dan tidak langsung, siapa menanggung biaya fiskal atau lingkungan, apakah kebijakan memperkuat kompetisi, serta apakah terdapat mekanisme koreksi jika manfaat terlalu terkonsentrasi. Pendekatan ini bukan anti-pertumbuhan. Justru distribusi yang lebih luas dapat memperbesar pasar domestik, memperkuat modal manusia, dan menciptakan dukungan politik bagi reformasi produktivitas.

Karena itu, keberhasilan pada tema ini perlu diuji melalui perubahan yang dapat diamati pada externalities, pollution, resource extraction, climate risk, dan environmental justice. Pertanyaan yang tepat bukan hanya apakah indikator rata-rata membaik, tetapi apakah kelompok bawah bergerak lebih cepat, apakah kelas menengah menjadi lebih aman, apakah pekerja memperoleh bagian dari produktivitas, dan apakah keuntungan ekonomi semakin bergantung pada inovasi dibanding akses khusus. Inilah perbedaan antara pertumbuhan yang sekadar terjadi dan pembangunan yang memperluas kemampuan masyarakat.

37. Mobilitas Sosial sebagai Tes Utama

Pertumbuhan inklusif tidak hanya menaikkan rata-rata pendapatan, tetapi memungkinkan seseorang memperbaiki posisi ekonomi tanpa bergantung pada asal keluarga atau jaringan. Cara masyarakat menikmati pertumbuhan ditentukan oleh posisi mereka dalam pasar kerja, kepemilikan aset, akses kepada layanan, dan kemampuan memengaruhi aturan. Dalam konteks ini, education, jobs, dan assets menjadi jalur penting yang menghubungkan aktivitas ekonomi dengan kesejahteraan. Karena Indonesia sangat beragam dalam struktur wilayah, pendidikan, kepemilikan aset, dan kesempatan kerja, satu angka nasional dapat menggambarkan arah umum tetapi tidak cukup menjelaskan pengalaman masyarakat. Analisis perlu bergerak sampai ke tingkat kelompok pendapatan, pekerjaan, gender, generasi, dan daerah.

Dimensi education menunjukkan bahwa posisi awal sangat menentukan. Rumah tangga yang memiliki modal, tanah, pendidikan tinggi, jaringan bisnis, atau pekerjaan formal biasanya lebih mudah menangkap peluang baru. Sebaliknya, kelompok dengan aset terbatas sering harus menggunakan tambahan pendapatan untuk menutup kebutuhan dasar atau membayar utang. Akibatnya, tingkat pertumbuhan yang sama dapat menghasilkan akumulasi kekayaan yang sangat berbeda. Kebijakan publik harus menyadari efek kumulatif ini karena ketimpangan hari ini dapat menjadi ketimpangan kesempatan esok hari.

Dimensi jobs berkaitan dengan kekuatan tawar. Dalam pasar yang ideal, produktivitas dan kompetisi mendorong pembagian manfaat yang relatif efisien. Dalam praktik, informasi tidak sempurna, pasar dapat terkonsentrasi, dan pekerja atau pemasok kecil sering menghadapi pilihan terbatas. Ketika posisi tawar tidak seimbang, kenaikan nilai tambah dapat lebih banyak menjadi margin keuntungan daripada upah atau harga yang diterima produsen kecil. Institusi persaingan, hukum kontrak, organisasi pekerja, dan keterbukaan informasi karena itu memengaruhi distribusi hasil.

Dimensi assets memperlihatkan peran negara sebagai pembentuk distribusi sebelum dan sesudah pasar. Sebelum pasar, negara memengaruhi kualitas pendidikan, kesehatan, infrastruktur, hak atas tanah, dan aturan kompetisi. Setelah pasar, negara menggunakan pajak, transfer, subsidi, dan layanan publik untuk memodifikasi hasil. Perdebatan tentang pemerataan sering terlalu berfokus pada

redistribusi setelah pendapatan terbentuk, padahal kebijakan yang membentuk kesempatan awal dapat lebih efektif dan lebih bermartabat dalam jangka panjang.

Selanjutnya, meritocracy menuntut perhatian terhadap waktu. Kelompok yang tidak menikmati manfaat sekarang mungkin dapat memperoleh manfaat di masa depan apabila pertumbuhan menghasilkan investasi, keterampilan, dan pasar baru. Namun janji tersebut hanya kredibel jika terdapat mekanisme nyata yang menghubungkan pertumbuhan hari ini dengan kesempatan esok hari. Tanpa jalur mobilitas, masyarakat akan melihat pertumbuhan sebagai keuntungan bagi kelompok lain. Persepsi semacam itu dapat menurunkan kepercayaan dan dukungan terhadap reformasi.

Dimensi social capital menekankan bahwa distribusi yang baik tidak sama dengan membagi hasil secara seragam. Pembangunan membutuhkan insentif bagi inovasi, investasi, kewirausahaan, dan pengambilan risiko. Yang perlu dijaga adalah agar keuntungan luar biasa berasal dari penciptaan nilai dan kompetisi, bukan dari rente, monopoli, atau akses politik. Dengan kata lain, ketimpangan yang berasal dari inovasi produktif mempunyai implikasi berbeda dari ketimpangan yang berasal dari privilese kelembagaan.

Pada tingkat rumah tangga, manfaat pertumbuhan seharusnya terlihat melalui kombinasi peningkatan pendapatan riil, stabilitas pekerjaan, akses pelayanan publik, dan kemampuan menabung atau memiliki aset. Jika kenaikan pendapatan nominal habis oleh biaya perumahan, transportasi, pendidikan, atau kesehatan, pengalaman kesejahteraan dapat tertinggal dari statistik makro. Karena itu, ukuran distribusi perlu menggabungkan pendapatan dengan biaya hidup dan kualitas layanan yang diterima.

Pada tingkat perusahaan, pertumbuhan inklusif berarti semakin banyak perusahaan produktif mampu memasuki pasar, tumbuh, dan menghubungkan diri dengan rantai nilai yang lebih besar. Ekonomi yang didominasi sedikit perusahaan sangat produktif dan banyak usaha mikro berproduktivitas rendah akan menghasilkan dualisme. Kebijakan harus memfasilitasi transisi perusahaan dari mikro menuju kecil dan menengah melalui pembiayaan, manajemen, teknologi, standardisasi, dan akses pasar, bukan hanya memberikan bantuan yang mempertahankan skala kecil.

Pada tingkat daerah, education dan meritocracy harus dianalisis bersama. Daerah yang telah memiliki infrastruktur, tenaga terampil, pasar besar, dan jaringan pemasok cenderung terus menarik investasi sehingga muncul efek aglomerasi. Efisiensi aglomerasi penting, tetapi negara juga perlu mengurangi biaya konektivitas dan membangun kapasitas kota serta kawasan di luar pusat lama. Pemerataan spasial tidak berarti menyebarkan seluruh aktivitas secara sama, melainkan menciptakan cukup banyak pusat pertumbuhan agar penduduk mempunyai pilihan ekonomi tanpa harus selalu berpindah ke metropolitan utama.

Implikasi kebijakan dari pembahasan ini adalah perlunya evaluasi distributif pada setiap kebijakan utama. Pemerintah perlu menilai siapa penerima manfaat langsung dan tidak langsung, siapa menanggung biaya fiskal atau lingkungan, apakah kebijakan memperkuat kompetisi, serta apakah terdapat mekanisme koreksi jika manfaat terlalu terkonsentrasi. Pendekatan ini bukan anti-pertumbuhan. Justru distribusi yang lebih luas dapat memperbesar pasar domestik, memperkuat modal manusia, dan menciptakan dukungan politik bagi reformasi produktivitas.

Karena itu, keberhasilan pada tema ini perlu diuji melalui perubahan yang dapat diamati pada education, jobs, assets, meritocracy, dan social capital. Pertanyaan yang tepat bukan hanya apakah indikator rata-rata membaik, tetapi apakah kelompok bawah bergerak lebih cepat, apakah kelas menengah menjadi lebih aman, apakah pekerja memperoleh bagian dari produktivitas, dan apakah keuntungan ekonomi

semakin bergantung pada inovasi dibanding akses khusus. Inilah perbedaan antara pertumbuhan yang sekadar terjadi dan pembangunan yang memperluas kemampuan masyarakat.

38. Pertumbuhan Inklusif dan Pertumbuhan Pro-Rakyat

Pertumbuhan inklusif memerlukan partisipasi luas dalam proses produksi dan distribusi manfaat, sedangkan kebijakan pro-rakyat harus membangun kapabilitas, bukan hanya konsumsi sementara. Pertanyaan distribusional harus memeriksa bukan hanya pendapatan saat ini, tetapi juga keamanan ekonomi dan kemampuan memperoleh peluang di masa depan. Dalam konteks ini, inclusion, capability, dan productive assets menjadi jalur penting yang menghubungkan aktivitas ekonomi dengan kesejahteraan. Karena Indonesia sangat beragam dalam struktur wilayah, pendidikan, kepemilikan aset, dan kesempatan kerja, satu angka nasional dapat menggambarkan arah umum tetapi tidak cukup menjelaskan pengalaman masyarakat. Analisis perlu bergerak sampai ke tingkat kelompok pendapatan, pekerjaan, gender, generasi, dan daerah.

Dimensi inclusion menunjukkan bahwa posisi awal sangat menentukan. Rumah tangga yang memiliki modal, tanah, pendidikan tinggi, jaringan bisnis, atau pekerjaan formal biasanya lebih mudah menangkap peluang baru. Sebaliknya, kelompok dengan aset terbatas sering harus menggunakan tambahan pendapatan untuk menutup kebutuhan dasar atau membayar utang. Akibatnya, tingkat pertumbuhan yang sama dapat menghasilkan akumulasi kekayaan yang sangat berbeda. Kebijakan publik harus menyadari efek kumulatif ini karena ketimpangan hari ini dapat menjadi ketimpangan kesempatan esok hari.

Dimensi capability berkaitan dengan kekuatan tawar. Dalam pasar yang ideal, produktivitas dan kompetisi mendorong pembagian manfaat yang relatif efisien. Dalam praktik, informasi tidak sempurna, pasar dapat terkonsentrasi, dan pekerja atau pemasok kecil sering menghadapi pilihan terbatas. Ketika posisi tawar tidak seimbang, kenaikan nilai tambah dapat lebih banyak menjadi margin keuntungan daripada upah atau harga yang diterima produsen kecil. Institusi persaingan, hukum kontrak, organisasi pekerja, dan keterbukaan informasi karena itu memengaruhi distribusi hasil.

Dimensi productive assets memperlihatkan peran negara sebagai pembentuk distribusi sebelum dan sesudah pasar. Sebelum pasar, negara memengaruhi kualitas pendidikan, kesehatan, infrastruktur, hak atas tanah, dan aturan kompetisi. Setelah pasar, negara menggunakan pajak, transfer, subsidi, dan layanan publik untuk memodifikasi hasil. Perdebatan tentang pemerataan sering terlalu berfokus pada redistribusi setelah pendapatan terbentuk, padahal kebijakan yang membentuk kesempatan awal dapat lebih efektif dan lebih bermartabat dalam jangka panjang.

Selanjutnya, public services menuntut perhatian terhadap waktu. Kelompok yang tidak menikmati manfaat sekarang mungkin dapat memperoleh manfaat di masa depan apabila pertumbuhan menghasilkan investasi, keterampilan, dan pasar baru. Namun janji tersebut hanya kredibel jika terdapat mekanisme nyata yang menghubungkan pertumbuhan hari ini dengan kesempatan esok hari. Tanpa jalur mobilitas, masyarakat akan melihat pertumbuhan sebagai keuntungan bagi kelompok lain. Persepsi semacam itu dapat menurunkan kepercayaan dan dukungan terhadap reformasi.

Dimensi empowerment menekankan bahwa distribusi yang baik tidak sama dengan membagi hasil secara seragam. Pembangunan membutuhkan insentif bagi inovasi, investasi, kewirausahaan, dan pengambilan risiko. Yang perlu dijaga adalah agar keuntungan luar biasa berasal dari penciptaan nilai dan

kompetisi, bukan dari rente, monopoli, atau akses politik. Dengan kata lain, ketimpangan yang berasal dari inovasi produktif mempunyai implikasi berbeda dari ketimpangan yang berasal dari privilese kelembagaan.

Pada tingkat rumah tangga, manfaat pertumbuhan seharusnya terlihat melalui kombinasi peningkatan pendapatan riil, stabilitas pekerjaan, akses pelayanan publik, dan kemampuan menabung atau memiliki aset. Jika kenaikan pendapatan nominal habis oleh biaya perumahan, transportasi, pendidikan, atau kesehatan, pengalaman kesejahteraan dapat tertinggal dari statistik makro. Karena itu, ukuran distribusi perlu menggabungkan pendapatan dengan biaya hidup dan kualitas layanan yang diterima.

Pada tingkat perusahaan, pertumbuhan inklusif berarti semakin banyak perusahaan produktif mampu memasuki pasar, tumbuh, dan menghubungkan diri dengan rantai nilai yang lebih besar. Ekonomi yang didominasi sedikit perusahaan sangat produktif dan banyak usaha mikro berproduktivitas rendah akan menghasilkan dualisme. Kebijakan harus memfasilitasi transisi perusahaan dari mikro menuju kecil dan menengah melalui pembiayaan, manajemen, teknologi, standardisasi, dan akses pasar, bukan hanya memberikan bantuan yang mempertahankan skala kecil.

Pada tingkat daerah, inclusion dan public services harus dianalisis bersama. Daerah yang telah memiliki infrastruktur, tenaga terampil, pasar besar, dan jaringan pemasok cenderung terus menarik investasi sehingga muncul efek aglomerasi. Efisiensi aglomerasi penting, tetapi negara juga perlu mengurangi biaya konektivitas dan membangun kapasitas kota serta kawasan di luar pusat lama. Pemerataan spasial tidak berarti menyebarkan seluruh aktivitas secara sama, melainkan menciptakan cukup banyak pusat pertumbuhan agar penduduk mempunyai pilihan ekonomi tanpa harus selalu berpindah ke metropolitan utama.

Implikasi kebijakan dari pembahasan ini adalah perlunya evaluasi distributif pada setiap kebijakan utama. Pemerintah perlu menilai siapa penerima manfaat langsung dan tidak langsung, siapa menanggung biaya fiskal atau lingkungan, apakah kebijakan memperkuat kompetisi, serta apakah terdapat mekanisme koreksi jika manfaat terlalu terkonsentrasi. Pendekatan ini bukan anti-pertumbuhan. Justru distribusi yang lebih luas dapat memperbesar pasar domestik, memperkuat modal manusia, dan menciptakan dukungan politik bagi reformasi produktivitas.

Karena itu, keberhasilan pada tema ini perlu diuji melalui perubahan yang dapat diamati pada inclusion, capability, productive assets, public services, dan empowerment. Pertanyaan yang tepat bukan hanya apakah indikator rata-rata membaik, tetapi apakah kelompok bawah bergerak lebih cepat, apakah kelas menengah menjadi lebih aman, apakah pekerja memperoleh bagian dari produktivitas, dan apakah keuntungan ekonomi semakin bergantung pada inovasi dibanding akses khusus. Inilah perbedaan antara pertumbuhan yang sekadar terjadi dan pembangunan yang memperluas kemampuan masyarakat.

39. Mengukur Siapa Menikmati Pertumbuhan

Pengukuran harus menggabungkan PDB, pendapatan rumah tangga, upah median, distribusi aset, kemiskinan, ketimpangan, kualitas pekerjaan, dan akses layanan. Perbedaan antara penciptaan nilai dan pembagian nilai merupakan inti analisis karena sektor yang tumbuh cepat belum tentu mempunyai keterkaitan luas dengan rumah tangga. Dalam konteks ini, median income, labor share, dan wealth menjadi jalur penting yang menghubungkan aktivitas ekonomi dengan kesejahteraan. Karena Indonesia sangat beragam dalam struktur wilayah, pendidikan, kepemilikan aset, dan kesempatan kerja, satu angka

nasional dapat menggambarkan arah umum tetapi tidak cukup menjelaskan pengalaman masyarakat. Analisis perlu bergerak sampai ke tingkat kelompok pendapatan, pekerjaan, gender, generasi, dan daerah.

Dimensi median income menunjukkan bahwa posisi awal sangat menentukan. Rumah tangga yang memiliki modal, tanah, pendidikan tinggi, jaringan bisnis, atau pekerjaan formal biasanya lebih mudah menangkap peluang baru. Sebaliknya, kelompok dengan aset terbatas sering harus menggunakan tambahan pendapatan untuk menutup kebutuhan dasar atau membayar utang. Akibatnya, tingkat pertumbuhan yang sama dapat menghasilkan akumulasi kekayaan yang sangat berbeda. Kebijakan publik harus menyadari efek kumulatif ini karena ketimpangan hari ini dapat menjadi ketimpangan kesempatan esok hari.

Dimensi labor share berkaitan dengan kekuatan tawar. Dalam pasar yang ideal, produktivitas dan kompetisi mendorong pembagian manfaat yang relatif efisien. Dalam praktik, informasi tidak sempurna, pasar dapat terkonsentrasi, dan pekerja atau pemasok kecil sering menghadapi pilihan terbatas. Ketika posisi tawar tidak seimbang, kenaikan nilai tambah dapat lebih banyak menjadi margin keuntungan daripada upah atau harga yang diterima produsen kecil. Institusi persaingan, hukum kontrak, organisasi pekerja, dan keterbukaan informasi karena itu memengaruhi distribusi hasil.

Dimensi wealth memperlihatkan peran negara sebagai pembentuk distribusi sebelum dan sesudah pasar. Sebelum pasar, negara memengaruhi kualitas pendidikan, kesehatan, infrastruktur, hak atas tanah, dan aturan kompetisi. Setelah pasar, negara menggunakan pajak, transfer, subsidi, dan layanan publik untuk memodifikasi hasil. Perdebatan tentang pemerataan sering terlalu berfokus pada redistribusi setelah pendapatan terbentuk, padahal kebijakan yang membentuk kesempatan awal dapat lebih efektif dan lebih bermartabat dalam jangka panjang.

Selanjutnya, poverty menuntut perhatian terhadap waktu. Kelompok yang tidak menikmati manfaat sekarang mungkin dapat memperoleh manfaat di masa depan apabila pertumbuhan menghasilkan investasi, keterampilan, dan pasar baru. Namun janji tersebut hanya kredibel jika terdapat mekanisme nyata yang menghubungkan pertumbuhan hari ini dengan kesempatan esok hari. Tanpa jalur mobilitas, masyarakat akan melihat pertumbuhan sebagai keuntungan bagi kelompok lain. Persepsi semacam itu dapat menurunkan kepercayaan dan dukungan terhadap reformasi.

Dimensi multidimensional indicators menekankan bahwa distribusi yang baik tidak sama dengan membagi hasil secara seragam. Pembangunan membutuhkan insentif bagi inovasi, investasi, kewirausahaan, dan pengambilan risiko. Yang perlu dijaga adalah agar keuntungan luar biasa berasal dari penciptaan nilai dan kompetisi, bukan dari rente, monopoli, atau akses politik. Dengan kata lain, ketimpangan yang berasal dari inovasi produktif mempunyai implikasi berbeda dari ketimpangan yang berasal dari privilese kelembagaan.

Pada tingkat rumah tangga, manfaat pertumbuhan seharusnya terlihat melalui kombinasi peningkatan pendapatan riil, stabilitas pekerjaan, akses pelayanan publik, dan kemampuan menabung atau memiliki aset. Jika kenaikan pendapatan nominal habis oleh biaya perumahan, transportasi, pendidikan, atau kesehatan, pengalaman kesejahteraan dapat tertinggal dari statistik makro. Karena itu, ukuran distribusi perlu menggabungkan pendapatan dengan biaya hidup dan kualitas layanan yang diterima.

Pada tingkat perusahaan, pertumbuhan inklusif berarti semakin banyak perusahaan produktif mampu memasuki pasar, tumbuh, dan menghubungkan diri dengan rantai nilai yang lebih besar. Ekonomi yang

didominasi sedikit perusahaan sangat produktif dan banyak usaha mikro berproduktivitas rendah akan menghasilkan dualisme. Kebijakan harus memfasilitasi transisi perusahaan dari mikro menuju kecil dan menengah melalui pembiayaan, manajemen, teknologi, standardisasi, dan akses pasar, bukan hanya memberikan bantuan yang mempertahankan skala kecil.

Pada tingkat daerah, median income dan poverty harus dianalisis bersama. Daerah yang telah memiliki infrastruktur, tenaga terampil, pasar besar, dan jaringan pemasok cenderung terus menarik investasi sehingga muncul efek aglomerasi. Efisiensi aglomerasi penting, tetapi negara juga perlu mengurangi biaya konektivitas dan membangun kapasitas kota serta kawasan di luar pusat lama. Pemerataan spasial tidak berarti menyebarkan seluruh aktivitas secara sama, melainkan menciptakan cukup banyak pusat pertumbuhan agar penduduk mempunyai pilihan ekonomi tanpa harus selalu berpindah ke metropolitan utama.

Implikasi kebijakan dari pembahasan ini adalah perlunya evaluasi distributif pada setiap kebijakan utama. Pemerintah perlu menilai siapa penerima manfaat langsung dan tidak langsung, siapa menanggung biaya fiskal atau lingkungan, apakah kebijakan memperkuat kompetisi, serta apakah terdapat mekanisme koreksi jika manfaat terlalu terkonsentrasi. Pendekatan ini bukan anti-pertumbuhan. Justru distribusi yang lebih luas dapat memperbesar pasar domestik, memperkuat modal manusia, dan menciptakan dukungan politik bagi reformasi produktivitas.

Karena itu, keberhasilan pada tema ini perlu diuji melalui perubahan yang dapat diamati pada median income, labor share, wealth, poverty, dan multidimensional indicators. Pertanyaan yang tepat bukan hanya apakah indikator rata-rata membaik, tetapi apakah kelompok bawah bergerak lebih cepat, apakah kelas menengah menjadi lebih aman, apakah pekerja memperoleh bagian dari produktivitas, dan apakah keuntungan ekonomi semakin bergantung pada inovasi dibanding akses khusus. Inilah perbedaan antara pertumbuhan yang sekadar terjadi dan pembangunan yang memperluas kemampuan masyarakat.

40. Agenda Indonesia: Menyebarkan Manfaat Pertumbuhan

Agenda kebijakan harus membuat produktivitas dan kepemilikan ekonomi semakin luas melalui pekerjaan berkualitas, persaingan sehat, layanan publik, dan institusi yang kuat. Dalam ekonomi politik, distribusi manfaat tidak terjadi setelah pertumbuhan selesai; distribusi dibentuk sejak proses produksi, pengaturan pasar, dan penetapan hak atas aset. Dalam konteks ini, quality jobs, competition, dan tax-transfer menjadi jalur penting yang menghubungkan aktivitas ekonomi dengan kesejahteraan. Karena Indonesia sangat beragam dalam struktur wilayah, pendidikan, kepemilikan aset, dan kesempatan kerja, satu angka nasional dapat menggambarkan arah umum tetapi tidak cukup menjelaskan pengalaman masyarakat. Analisis perlu bergerak sampai ke tingkat kelompok pendapatan, pekerjaan, gender, generasi, dan daerah.

Dimensi quality jobs menunjukkan bahwa posisi awal sangat menentukan. Rumah tangga yang memiliki modal, tanah, pendidikan tinggi, jaringan bisnis, atau pekerjaan formal biasanya lebih mudah menangkap peluang baru. Sebaliknya, kelompok dengan aset terbatas sering harus menggunakan tambahan pendapatan untuk menutup kebutuhan dasar atau membayar utang. Akibatnya, tingkat pertumbuhan yang sama dapat menghasilkan akumulasi kekayaan yang sangat berbeda. Kebijakan publik harus menyadari efek kumulatif ini karena ketimpangan hari ini dapat menjadi ketimpangan kesempatan esok hari.

Dimensi competition berkaitan dengan kekuatan tawar. Dalam pasar yang ideal, produktivitas dan kompetisi mendorong pembagian manfaat yang relatif efisien. Dalam praktik, informasi tidak sempurna, pasar dapat terkonsentrasi, dan pekerja atau pemasok kecil sering menghadapi pilihan terbatas. Ketika posisi tawar tidak seimbang, kenaikan nilai tambah dapat lebih banyak menjadi margin keuntungan daripada upah atau harga yang diterima produsen kecil. Institusi persaingan, hukum kontrak, organisasi pekerja, dan keterbukaan informasi karena itu memengaruhi distribusi hasil.

Dimensi tax-transfer memperlihatkan peran negara sebagai pembentuk distribusi sebelum dan sesudah pasar. Sebelum pasar, negara memengaruhi kualitas pendidikan, kesehatan, infrastruktur, hak atas tanah, dan aturan kompetisi. Setelah pasar, negara menggunakan pajak, transfer, subsidi, dan layanan publik untuk memodifikasi hasil. Perdebatan tentang pemerataan sering terlalu berfokus pada redistribusi setelah pendapatan terbentuk, padahal kebijakan yang membentuk kesempatan awal dapat lebih efektif dan lebih bermartabat dalam jangka panjang.

Selanjutnya, human capital menuntut perhatian terhadap waktu. Kelompok yang tidak menikmati manfaat sekarang mungkin dapat memperoleh manfaat di masa depan apabila pertumbuhan menghasilkan investasi, keterampilan, dan pasar baru. Namun janji tersebut hanya kredibel jika terdapat mekanisme nyata yang menghubungkan pertumbuhan hari ini dengan kesempatan esok hari. Tanpa jalur mobilitas, masyarakat akan melihat pertumbuhan sebagai keuntungan bagi kelompok lain. Persepsi semacam itu dapat menurunkan kepercayaan dan dukungan terhadap reformasi.

Dimensi institutions menekankan bahwa distribusi yang baik tidak sama dengan membagi hasil secara seragam. Pembangunan membutuhkan insentif bagi inovasi, investasi, kewirausahaan, dan pengambilan risiko. Yang perlu dijaga adalah agar keuntungan luar biasa berasal dari penciptaan nilai dan kompetisi, bukan dari rente, monopoli, atau akses politik. Dengan kata lain, ketimpangan yang berasal dari inovasi produktif mempunyai implikasi berbeda dari ketimpangan yang berasal dari privilese kelembagaan.

Pada tingkat rumah tangga, manfaat pertumbuhan seharusnya terlihat melalui kombinasi peningkatan pendapatan riil, stabilitas pekerjaan, akses pelayanan publik, dan kemampuan menabung atau memiliki aset. Jika kenaikan pendapatan nominal habis oleh biaya perumahan, transportasi, pendidikan, atau kesehatan, pengalaman kesejahteraan dapat tertinggal dari statistik makro. Karena itu, ukuran distribusi perlu menggabungkan pendapatan dengan biaya hidup dan kualitas layanan yang diterima.

Pada tingkat perusahaan, pertumbuhan inklusif berarti semakin banyak perusahaan produktif mampu memasuki pasar, tumbuh, dan menghubungkan diri dengan rantai nilai yang lebih besar. Ekonomi yang didominasi sedikit perusahaan sangat produktif dan banyak usaha mikro berproduktivitas rendah akan menghasilkan dualisme. Kebijakan harus memfasilitasi transisi perusahaan dari mikro menuju kecil dan menengah melalui pembiayaan, manajemen, teknologi, standardisasi, dan akses pasar, bukan hanya memberikan bantuan yang mempertahankan skala kecil.

Pada tingkat daerah, quality jobs dan human capital harus dianalisis bersama. Daerah yang telah memiliki infrastruktur, tenaga terampil, pasar besar, dan jaringan pemasok cenderung terus menarik investasi sehingga muncul efek aglomerasi. Efisiensi aglomerasi penting, tetapi negara juga perlu mengurangi biaya konektivitas dan membangun kapasitas kota serta kawasan di luar pusat lama. Pemerataan spasial tidak berarti menyebarkan seluruh aktivitas secara sama, melainkan menciptakan cukup banyak pusat pertumbuhan agar penduduk mempunyai pilihan ekonomi tanpa harus selalu berpindah ke metropolitan utama.

Implikasi kebijakan dari pembahasan ini adalah perlunya evaluasi distributif pada setiap kebijakan utama. Pemerintah perlu menilai siapa penerima manfaat langsung dan tidak langsung, siapa menanggung biaya fiskal atau lingkungan, apakah kebijakan memperkuat kompetisi, serta apakah terdapat mekanisme koreksi jika manfaat terlalu terkonsentrasi. Pendekatan ini bukan anti-pertumbuhan. Justru distribusi yang lebih luas dapat memperbesar pasar domestik, memperkuat modal manusia, dan menciptakan dukungan politik bagi reformasi produktivitas.

Karena itu, keberhasilan pada tema ini perlu diuji melalui perubahan yang dapat diamati pada quality jobs, competition, tax-transfer, human capital, dan institutions. Pertanyaan yang tepat bukan hanya apakah indikator rata-rata membaik, tetapi apakah kelompok bawah bergerak lebih cepat, apakah kelas menengah menjadi lebih aman, apakah pekerja memperoleh bagian dari produktivitas, dan apakah keuntungan ekonomi semakin bergantung pada inovasi dibanding akses khusus. Inilah perbedaan antara pertumbuhan yang sekadar terjadi dan pembangunan yang memperluas kemampuan masyarakat.

41. Skenario 2030: Pertumbuhan Terkonsentrasi atau Inklusif

Indonesia dapat bergerak menuju pertumbuhan tinggi tetapi terkonsentrasi, atau pertumbuhan yang lebih produktif dan inklusif dengan mobilitas sosial yang lebih kuat. Cara masyarakat menikmati pertumbuhan ditentukan oleh posisi mereka dalam pasar kerja, kepemilikan aset, akses kepada layanan, dan kemampuan memengaruhi aturan. Dalam konteks ini, scenario, reform, dan technology menjadi jalur penting yang menghubungkan aktivitas ekonomi dengan kesejahteraan. Karena Indonesia sangat beragam dalam struktur wilayah, pendidikan, kepemilikan aset, dan kesempatan kerja, satu angka nasional dapat menggambarkan arah umum tetapi tidak cukup menjelaskan pengalaman masyarakat. Analisis perlu bergerak sampai ke tingkat kelompok pendapatan, pekerjaan, gender, generasi, dan daerah.

Dimensi scenario menunjukkan bahwa posisi awal sangat menentukan. Rumah tangga yang memiliki modal, tanah, pendidikan tinggi, jaringan bisnis, atau pekerjaan formal biasanya lebih mudah menangkap peluang baru. Sebaliknya, kelompok dengan aset terbatas sering harus menggunakan tambahan pendapatan untuk menutup kebutuhan dasar atau membayar utang. Akibatnya, tingkat pertumbuhan yang sama dapat menghasilkan akumulasi kekayaan yang sangat berbeda. Kebijakan publik harus menyadari efek kumulatif ini karena ketimpangan hari ini dapat menjadi ketimpangan kesempatan esok hari.

Dimensi reform berkaitan dengan kekuatan tawar. Dalam pasar yang ideal, produktivitas dan kompetisi mendorong pembagian manfaat yang relatif efisien. Dalam praktik, informasi tidak sempurna, pasar dapat terkonsentrasi, dan pekerja atau pemasok kecil sering menghadapi pilihan terbatas. Ketika posisi tawar tidak seimbang, kenaikan nilai tambah dapat lebih banyak menjadi margin keuntungan daripada upah atau harga yang diterima produsen kecil. Institusi persaingan, hukum kontrak, organisasi pekerja, dan keterbukaan informasi karena itu memengaruhi distribusi hasil.

Dimensi technology memperlihatkan peran negara sebagai pembentuk distribusi sebelum dan sesudah pasar. Sebelum pasar, negara memengaruhi kualitas pendidikan, kesehatan, infrastruktur, hak atas tanah, dan aturan kompetisi. Setelah pasar, negara menggunakan pajak, transfer, subsidi, dan layanan publik untuk memodifikasi hasil. Perdebatan tentang pemerataan sering terlalu berfokus pada

redistribusi setelah pendapatan terbentuk, padahal kebijakan yang membentuk kesempatan awal dapat lebih efektif dan lebih bermartabat dalam jangka panjang.

Selanjutnya, demography menuntut perhatian terhadap waktu. Kelompok yang tidak menikmati manfaat sekarang mungkin dapat memperoleh manfaat di masa depan apabila pertumbuhan menghasilkan investasi, keterampilan, dan pasar baru. Namun janji tersebut hanya kredibel jika terdapat mekanisme nyata yang menghubungkan pertumbuhan hari ini dengan kesempatan esok hari. Tanpa jalur mobilitas, masyarakat akan melihat pertumbuhan sebagai keuntungan bagi kelompok lain. Persepsi semacam itu dapat menurunkan kepercayaan dan dukungan terhadap reformasi.

Dimensi governance menekankan bahwa distribusi yang baik tidak sama dengan membagi hasil secara seragam. Pembangunan membutuhkan insentif bagi inovasi, investasi, kewirausahaan, dan pengambilan risiko. Yang perlu dijaga adalah agar keuntungan luar biasa berasal dari penciptaan nilai dan kompetisi, bukan dari rente, monopoli, atau akses politik. Dengan kata lain, ketimpangan yang berasal dari inovasi produktif mempunyai implikasi berbeda dari ketimpangan yang berasal dari privilese kelembagaan.

Pada tingkat rumah tangga, manfaat pertumbuhan seharusnya terlihat melalui kombinasi peningkatan pendapatan riil, stabilitas pekerjaan, akses pelayanan publik, dan kemampuan menabung atau memiliki aset. Jika kenaikan pendapatan nominal habis oleh biaya perumahan, transportasi, pendidikan, atau kesehatan, pengalaman kesejahteraan dapat tertinggal dari statistik makro. Karena itu, ukuran distribusi perlu menggabungkan pendapatan dengan biaya hidup dan kualitas layanan yang diterima.

Pada tingkat perusahaan, pertumbuhan inklusif berarti semakin banyak perusahaan produktif mampu memasuki pasar, tumbuh, dan menghubungkan diri dengan rantai nilai yang lebih besar. Ekonomi yang didominasi sedikit perusahaan sangat produktif dan banyak usaha mikro berproduktivitas rendah akan menghasilkan dualisme. Kebijakan harus memfasilitasi transisi perusahaan dari mikro menuju kecil dan menengah melalui pembiayaan, manajemen, teknologi, standardisasi, dan akses pasar, bukan hanya memberikan bantuan yang mempertahankan skala kecil.

Pada tingkat daerah, scenario dan demography harus dianalisis bersama. Daerah yang telah memiliki infrastruktur, tenaga terampil, pasar besar, dan jaringan pemasok cenderung terus menarik investasi sehingga muncul efek aglomerasi. Efisiensi aglomerasi penting, tetapi negara juga perlu mengurangi biaya konektivitas dan membangun kapasitas kota serta kawasan di luar pusat lama. Pemerataan spasial tidak berarti menyebarkan seluruh aktivitas secara sama, melainkan menciptakan cukup banyak pusat pertumbuhan agar penduduk mempunyai pilihan ekonomi tanpa harus selalu berpindah ke metropolitan utama.

Implikasi kebijakan dari pembahasan ini adalah perlunya evaluasi distributif pada setiap kebijakan utama. Pemerintah perlu menilai siapa penerima manfaat langsung dan tidak langsung, siapa menanggung biaya fiskal atau lingkungan, apakah kebijakan memperkuat kompetisi, serta apakah terdapat mekanisme koreksi jika manfaat terlalu terkonsentrasi. Pendekatan ini bukan anti-pertumbuhan. Justru distribusi yang lebih luas dapat memperbesar pasar domestik, memperkuat modal manusia, dan menciptakan dukungan politik bagi reformasi produktivitas.

Karena itu, keberhasilan pada tema ini perlu diuji melalui perubahan yang dapat diamati pada scenario, reform, technology, demography, dan governance. Pertanyaan yang tepat bukan hanya apakah indikator rata-rata membaik, tetapi apakah kelompok bawah bergerak lebih cepat, apakah kelas menengah menjadi lebih aman, apakah pekerja memperoleh bagian dari produktivitas, dan apakah keuntungan

ekonomi semakin bergantung pada inovasi dibanding akses khusus. Inilah perbedaan antara pertumbuhan yang sekadar terjadi dan pembangunan yang memperluas kemampuan masyarakat.

42. Indonesia Emas 2045: Siapa yang Harus Menikmati?

Visi negara maju hanya bermakna jika generasi mendatang mewarisi produktivitas, institusi, lingkungan, dan kesempatan yang lebih baik. Pertanyaan distribusional harus memeriksa bukan hanya pendapatan saat ini, tetapi juga keamanan ekonomi dan kemampuan memperoleh peluang di masa depan. Dalam konteks ini, future generations, high income, dan social cohesion menjadi jalur penting yang menghubungkan aktivitas ekonomi dengan kesejahteraan. Karena Indonesia sangat beragam dalam struktur wilayah, pendidikan, kepemilikan aset, dan kesempatan kerja, satu angka nasional dapat menggambarkan arah umum tetapi tidak cukup menjelaskan pengalaman masyarakat. Analisis perlu bergerak sampai ke tingkat kelompok pendapatan, pekerjaan, gender, generasi, dan daerah.

Dimensi future generations menunjukkan bahwa posisi awal sangat menentukan. Rumah tangga yang memiliki modal, tanah, pendidikan tinggi, jaringan bisnis, atau pekerjaan formal biasanya lebih mudah menangkap peluang baru. Sebaliknya, kelompok dengan aset terbatas sering harus menggunakan tambahan pendapatan untuk menutup kebutuhan dasar atau membayar utang. Akibatnya, tingkat pertumbuhan yang sama dapat menghasilkan akumulasi kekayaan yang sangat berbeda. Kebijakan publik harus menyadari efek kumulatif ini karena ketimpangan hari ini dapat menjadi ketimpangan kesempatan esok hari.

Dimensi high income berkaitan dengan kekuatan tawar. Dalam pasar yang ideal, produktivitas dan kompetisi mendorong pembagian manfaat yang relatif efisien. Dalam praktik, informasi tidak sempurna, pasar dapat terkonsentrasi, dan pekerja atau pemasok kecil sering menghadapi pilihan terbatas. Ketika posisi tawar tidak seimbang, kenaikan nilai tambah dapat lebih banyak menjadi margin keuntungan daripada upah atau harga yang diterima produsen kecil. Institusi persaingan, hukum kontrak, organisasi pekerja, dan keterbukaan informasi karena itu memengaruhi distribusi hasil.

Dimensi social cohesion memperlihatkan peran negara sebagai pembentuk distribusi sebelum dan sesudah pasar. Sebelum pasar, negara memengaruhi kualitas pendidikan, kesehatan, infrastruktur, hak atas tanah, dan aturan kompetisi. Setelah pasar, negara menggunakan pajak, transfer, subsidi, dan layanan publik untuk memodifikasi hasil. Perdebatan tentang pemerataan sering terlalu berfokus pada redistribusi setelah pendapatan terbentuk, padahal kebijakan yang membentuk kesempatan awal dapat lebih efektif dan lebih bermartabat dalam jangka panjang.

Selanjutnya, sustainability menuntut perhatian terhadap waktu. Kelompok yang tidak menikmati manfaat sekarang mungkin dapat memperoleh manfaat di masa depan apabila pertumbuhan menghasilkan investasi, keterampilan, dan pasar baru. Namun janji tersebut hanya kredibel jika terdapat mekanisme nyata yang menghubungkan pertumbuhan hari ini dengan kesempatan esok hari. Tanpa jalur mobilitas, masyarakat akan melihat pertumbuhan sebagai keuntungan bagi kelompok lain. Persepsi semacam itu dapat menurunkan kepercayaan dan dukungan terhadap reformasi.

Dimensi institutional quality menekankan bahwa distribusi yang baik tidak sama dengan membagi hasil secara seragam. Pembangunan membutuhkan insentif bagi inovasi, investasi, kewirausahaan, dan pengambilan risiko. Yang perlu dijaga adalah agar keuntungan luar biasa berasal dari penciptaan nilai dan kompetisi, bukan dari rente, monopoli, atau akses politik. Dengan kata lain, ketimpangan yang berasal

dari inovasi produktif mempunyai implikasi berbeda dari ketimpangan yang berasal dari privilese kelembagaan.

Pada tingkat rumah tangga, manfaat pertumbuhan seharusnya terlihat melalui kombinasi peningkatan pendapatan riil, stabilitas pekerjaan, akses pelayanan publik, dan kemampuan menabung atau memiliki aset. Jika kenaikan pendapatan nominal habis oleh biaya perumahan, transportasi, pendidikan, atau kesehatan, pengalaman kesejahteraan dapat tertinggal dari statistik makro. Karena itu, ukuran distribusi perlu menggabungkan pendapatan dengan biaya hidup dan kualitas layanan yang diterima.

Pada tingkat perusahaan, pertumbuhan inklusif berarti semakin banyak perusahaan produktif mampu memasuki pasar, tumbuh, dan menghubungkan diri dengan rantai nilai yang lebih besar. Ekonomi yang didominasi sedikit perusahaan sangat produktif dan banyak usaha mikro berproduktivitas rendah akan menghasilkan dualisme. Kebijakan harus memfasilitasi transisi perusahaan dari mikro menuju kecil dan menengah melalui pembiayaan, manajemen, teknologi, standardisasi, dan akses pasar, bukan hanya memberikan bantuan yang mempertahankan skala kecil.

Pada tingkat daerah, future generations dan sustainability harus dianalisis bersama. Daerah yang telah memiliki infrastruktur, tenaga terampil, pasar besar, dan jaringan pemasok cenderung terus menarik investasi sehingga muncul efek aglomerasi. Efisiensi aglomerasi penting, tetapi negara juga perlu mengurangi biaya konektivitas dan membangun kapasitas kota serta kawasan di luar pusat lama. Pemerataan spasial tidak berarti menyebarkan seluruh aktivitas secara sama, melainkan menciptakan cukup banyak pusat pertumbuhan agar penduduk mempunyai pilihan ekonomi tanpa harus selalu berpindah ke metropolitan utama.

Implikasi kebijakan dari pembahasan ini adalah perlunya evaluasi distributif pada setiap kebijakan utama. Pemerintah perlu menilai siapa penerima manfaat langsung dan tidak langsung, siapa menanggung biaya fiskal atau lingkungan, apakah kebijakan memperkuat kompetisi, serta apakah terdapat mekanisme koreksi jika manfaat terlalu terkonsentrasi. Pendekatan ini bukan anti-pertumbuhan. Justru distribusi yang lebih luas dapat memperbesar pasar domestik, memperkuat modal manusia, dan menciptakan dukungan politik bagi reformasi produktivitas.

Karena itu, keberhasilan pada tema ini perlu diuji melalui perubahan yang dapat diamati pada future generations, high income, social cohesion, sustainability, dan institutional quality. Pertanyaan yang tepat bukan hanya apakah indikator rata-rata membaik, tetapi apakah kelompok bawah bergerak lebih cepat, apakah kelas menengah menjadi lebih aman, apakah pekerja memperoleh bagian dari produktivitas, dan apakah keuntungan ekonomi semakin bergantung pada inovasi dibanding akses khusus. Inilah perbedaan antara pertumbuhan yang sekadar terjadi dan pembangunan yang memperluas kemampuan masyarakat.

43. Kesimpulan: Dari Pertumbuhan untuk Sebagian menuju Kemajuan untuk Banyak

Pertanyaan siapa menikmati pertumbuhan harus menjadi bagian rutin evaluasi kebijakan karena distribusi menentukan legitimasi, stabilitas, dan keberlanjutan pembangunan. Perbedaan antara penciptaan nilai dan pembagian nilai merupakan inti analisis karena sektor yang tumbuh cepat belum tentu mempunyai keterkaitan luas dengan rumah tangga. Dalam konteks ini, distribution, legitimacy, dan

productivity menjadi jalur penting yang menghubungkan aktivitas ekonomi dengan kesejahteraan. Karena Indonesia sangat beragam dalam struktur wilayah, pendidikan, kepemilikan aset, dan kesempatan kerja, satu angka nasional dapat menggambarkan arah umum tetapi tidak cukup menjelaskan pengalaman masyarakat. Analisis perlu bergerak sampai ke tingkat kelompok pendapatan, pekerjaan, gender, generasi, dan daerah.

Dimensi distribution menunjukkan bahwa posisi awal sangat menentukan. Rumah tangga yang memiliki modal, tanah, pendidikan tinggi, jaringan bisnis, atau pekerjaan formal biasanya lebih mudah menangkap peluang baru. Sebaliknya, kelompok dengan aset terbatas sering harus menggunakan tambahan pendapatan untuk menutup kebutuhan dasar atau membayar utang. Akibatnya, tingkat pertumbuhan yang sama dapat menghasilkan akumulasi kekayaan yang sangat berbeda. Kebijakan publik harus menyadari efek kumulatif ini karena ketimpangan hari ini dapat menjadi ketimpangan kesempatan esok hari.

Dimensi legitimacy berkaitan dengan kekuatan tawar. Dalam pasar yang ideal, produktivitas dan kompetisi mendorong pembagian manfaat yang relatif efisien. Dalam praktik, informasi tidak sempurna, pasar dapat terkonsentrasi, dan pekerja atau pemasok kecil sering menghadapi pilihan terbatas. Ketika posisi tawar tidak seimbang, kenaikan nilai tambah dapat lebih banyak menjadi margin keuntungan daripada upah atau harga yang diterima produsen kecil. Institusi persaingan, hukum kontrak, organisasi pekerja, dan keterbukaan informasi karena itu memengaruhi distribusi hasil.

Dimensi productivity memperlihatkan peran negara sebagai pembentuk distribusi sebelum dan sesudah pasar. Sebelum pasar, negara memengaruhi kualitas pendidikan, kesehatan, infrastruktur, hak atas tanah, dan aturan kompetisi. Setelah pasar, negara menggunakan pajak, transfer, subsidi, dan layanan publik untuk memodifikasi hasil. Perdebatan tentang pemerataan sering terlalu berfokus pada redistribusi setelah pendapatan terbentuk, padahal kebijakan yang membentuk kesempatan awal dapat lebih efektif dan lebih bermartabat dalam jangka panjang.

Selanjutnya, welfare menuntut perhatian terhadap waktu. Kelompok yang tidak menikmati manfaat sekarang mungkin dapat memperoleh manfaat di masa depan apabila pertumbuhan menghasilkan investasi, keterampilan, dan pasar baru. Namun janji tersebut hanya kredibel jika terdapat mekanisme nyata yang menghubungkan pertumbuhan hari ini dengan kesempatan esok hari. Tanpa jalur mobilitas, masyarakat akan melihat pertumbuhan sebagai keuntungan bagi kelompok lain. Persepsi semacam itu dapat menurunkan kepercayaan dan dukungan terhadap reformasi.

Dimensi trust menekankan bahwa distribusi yang baik tidak sama dengan membagi hasil secara seragam. Pembangunan membutuhkan insentif bagi inovasi, investasi, kewirausahaan, dan pengambilan risiko. Yang perlu dijaga adalah agar keuntungan luar biasa berasal dari penciptaan nilai dan kompetisi, bukan dari rente, monopoli, atau akses politik. Dengan kata lain, ketimpangan yang berasal dari inovasi produktif mempunyai implikasi berbeda dari ketimpangan yang berasal dari privilese kelembagaan.

Pada tingkat rumah tangga, manfaat pertumbuhan seharusnya terlihat melalui kombinasi peningkatan pendapatan riil, stabilitas pekerjaan, akses pelayanan publik, dan kemampuan menabung atau memiliki aset. Jika kenaikan pendapatan nominal habis oleh biaya perumahan, transportasi, pendidikan, atau kesehatan, pengalaman kesejahteraan dapat tertinggal dari statistik makro. Karena itu, ukuran distribusi perlu menggabungkan pendapatan dengan biaya hidup dan kualitas layanan yang diterima.

Pada tingkat perusahaan, pertumbuhan inklusif berarti semakin banyak perusahaan produktif mampu memasuki pasar, tumbuh, dan menghubungkan diri dengan rantai nilai yang lebih besar. Ekonomi yang didominasi sedikit perusahaan sangat produktif dan banyak usaha mikro berproduktivitas rendah akan menghasilkan dualisme. Kebijakan harus memfasilitasi transisi perusahaan dari mikro menuju kecil dan menengah melalui pembiayaan, manajemen, teknologi, standardisasi, dan akses pasar, bukan hanya memberikan bantuan yang mempertahankan skala kecil.

Pada tingkat daerah, distribution dan welfare harus dianalisis bersama. Daerah yang telah memiliki infrastruktur, tenaga terampil, pasar besar, dan jaringan pemasok cenderung terus menarik investasi sehingga muncul efek aglomerasi. Efisiensi aglomerasi penting, tetapi negara juga perlu mengurangi biaya konektivitas dan membangun kapasitas kota serta kawasan di luar pusat lama. Pemerataan spasial tidak berarti menyebarkan seluruh aktivitas secara sama, melainkan menciptakan cukup banyak pusat pertumbuhan agar penduduk mempunyai pilihan ekonomi tanpa harus selalu berpindah ke metropolitan utama.

Implikasi kebijakan dari pembahasan ini adalah perlunya evaluasi distributif pada setiap kebijakan utama. Pemerintah perlu menilai siapa penerima manfaat langsung dan tidak langsung, siapa menanggung biaya fiskal atau lingkungan, apakah kebijakan memperkuat kompetisi, serta apakah terdapat mekanisme koreksi jika manfaat terlalu terkonsentrasi. Pendekatan ini bukan anti-pertumbuhan. Justru distribusi yang lebih luas dapat memperbesar pasar domestik, memperkuat modal manusia, dan menciptakan dukungan politik bagi reformasi produktivitas.

Karena itu, keberhasilan pada tema ini perlu diuji melalui perubahan yang dapat diamati pada distribution, legitimacy, productivity, welfare, dan trust. Pertanyaan yang tepat bukan hanya apakah indikator rata-rata membaik, tetapi apakah kelompok bawah bergerak lebih cepat, apakah kelas menengah menjadi lebih aman, apakah pekerja memperoleh bagian dari produktivitas, dan apakah keuntungan ekonomi semakin bergantung pada inovasi dibanding akses khusus. Inilah perbedaan antara pertumbuhan yang sekadar terjadi dan pembangunan yang memperluas kemampuan masyarakat.

Kerangka Kebijakan: Sepuluh Uji Distribusi bagi Setiap Kebijakan Ekonomi

- 1. Uji Pendapatan:** Apakah kebijakan meningkatkan pendapatan riil kelompok bawah dan menengah atau terutama menaikkan pendapatan modal?
- 2. Uji Pekerjaan:** Apakah pertumbuhan menciptakan pekerjaan formal, aman, produktif, dan berjenjang?
- 3. Uji Aset:** Apakah masyarakat mendapat kesempatan membangun tabungan, rumah, tanah produktif, atau kepemilikan usaha?
- 4. Uji Kompetisi:** Apakah kebijakan membuka kesempatan bagi pemain baru atau memperkuat konsentrasi?
- 5. Uji Wilayah:** Apakah manfaat hanya terkonsentrasi di pusat pertumbuhan lama atau menciptakan keterkaitan daerah?
- 6. Uji Gender dan Generasi:** Apakah perempuan dan generasi muda memperoleh akses kesempatan yang sebanding?

- 7. Uji Fiskal:** Siapa membayar melalui pajak dan siapa menerima melalui belanja serta subsidi?
- 8. Uji Lingkungan:** Siapa memperoleh keuntungan ekonomi dan siapa menanggung biaya ekologis serta kesehatan?
- 9. Uji Mobilitas:** Apakah kebijakan memperbesar peluang seseorang naik kelas secara berkelanjutan?
- 10. Uji Institusi:** Apakah keuntungan berasal dari produktivitas atau dari rente, perlindungan, dan akses khusus?

Lampiran Analitis: Dua Belas Kasus Distribusi Pertumbuhan

Kasus 1. Kawasan industri dan masyarakat lokal

Sebuah kawasan industri baru menciptakan investasi besar, tetapi sebagian pekerjaan berkeahlian tinggi diisi tenaga dari luar daerah. Kasus hipotetis ini menunjukkan bahwa pertumbuhan tidak memiliki penerima manfaat tunggal. Efek pertama dapat terlihat pada output atau investasi, tetapi efek berikutnya mengalir melalui upah, harga tanah, pajak, kontrak pemasok, biaya lingkungan, dan permintaan lokal. Karena itu, evaluasi kebijakan yang berhenti pada nilai investasi atau jumlah proyek mudah melebihi manfaat yang benar-benar diterima masyarakat.

Langkah analitis pertama adalah memetakan rantai nilai dan struktur kepemilikan. Siapa memiliki aset utama, siapa memasok input, siapa memperoleh kontrak, dan dari mana pekerja berasal? Pemetaan tersebut mengungkap apakah nilai tambah berputar di wilayah dan kelompok sasaran atau cepat mengalir keluar. Kebijakan lokal content atau kemitraan hanya efektif apabila pemasok domestik mempunyai kapasitas memenuhi standar kualitas, sehingga pengembangan kemampuan harus berjalan sebelum atau bersama kewajiban penggunaan lokal.

Langkah kedua adalah membedakan manfaat bruto dari manfaat bersih. Proyek dapat menghasilkan upah dan pajak tetapi juga membutuhkan subsidi, infrastruktur publik, insentif, atau menimbulkan biaya lingkungan. Perhitungan sosial harus memasukkan biaya peluang dan distribusi. Satu rupiah manfaat bagi kelompok sangat kaya tidak mempunyai konsekuensi kesejahteraan yang sama dengan satu rupiah bagi rumah tangga miskin, meskipun akuntansi PDB memperlakukan transaksi tersebut secara serupa.

Langkah ketiga adalah melihat horizon waktu. Pada tahap awal, manfaat mungkin terkonsentrasi pada investor dan pekerja terampil, tetapi pendidikan, pelatihan, dan pengembangan pemasok dapat memperluas distribusi pada periode berikutnya. Jika mekanisme tersebut tidak dibangun, konsentrasi awal dapat menjadi permanen. Karena itu setiap strategi pertumbuhan memerlukan strategi difusi: bagaimana teknologi, keterampilan, pendapatan, dan kesempatan menyebar dari pusat aktivitas baru ke ekonomi yang lebih luas.

Langkah keempat adalah menjaga kompetisi dan tata kelola. Insentif investasi dapat diperlukan, tetapi konsesi eksklusif tanpa evaluasi dapat berubah menjadi rente. Transparansi kontrak, benchmark biaya, aturan konflik kepentingan, dan evaluasi berkala memperkecil risiko bahwa kebijakan industri dibajak oleh penerima manfaat yang paling terorganisasi. Negara harus cukup kuat untuk mendukung transformasi, sekaligus cukup akuntabel untuk menghentikan dukungan yang tidak menghasilkan nilai publik.

Pelajaran utama kasus ini adalah perlunya melihat pertumbuhan sebagai proses distribusi dinamis. Tujuan kebijakan bukan membuat semua kelompok menerima manfaat identik, melainkan memastikan bahwa akses terhadap peluang produktif terus meluas, biaya transisi ditangani secara adil, dan keuntungan jangka panjang bergantung pada penciptaan nilai. Dengan kerangka ini, pertanyaan 'siapa menikmati pertumbuhan?' menjadi alat evaluasi kebijakan yang konkret.

Kasus 2. Kenaikan harga komoditas

Harga komoditas ekspor naik dan laba perusahaan meningkat, sementara petani kecil menghadapi kenaikan biaya pupuk dan transportasi. Kasus hipotetis ini menunjukkan bahwa pertumbuhan tidak memiliki penerima manfaat tunggal. Efek pertama dapat terlihat pada output atau investasi, tetapi efek berikutnya mengalir melalui upah, harga tanah, pajak, kontrak pemasok, biaya lingkungan, dan permintaan lokal. Karena itu, evaluasi kebijakan yang berhenti pada nilai investasi atau jumlah proyek mudah melebihkan manfaat yang benar-benar diterima masyarakat.

Langkah analitis pertama adalah memetakan rantai nilai dan struktur kepemilikan. Siapa memiliki aset utama, siapa memasok input, siapa memperoleh kontrak, dan dari mana pekerja berasal? Pemetaan tersebut mengungkap apakah nilai tambah berputar di wilayah dan kelompok sasaran atau cepat mengalir keluar. Kebijakan lokal content atau kemitraan hanya efektif apabila pemasok domestik mempunyai kapasitas memenuhi standar kualitas, sehingga pengembangan kemampuan harus berjalan sebelum atau bersama kewajiban penggunaan lokal.

Langkah kedua adalah membedakan manfaat bruto dari manfaat bersih. Proyek dapat menghasilkan upah dan pajak tetapi juga membutuhkan subsidi, infrastruktur publik, insentif, atau menimbulkan biaya lingkungan. Perhitungan sosial harus memasukkan biaya peluang dan distribusi. Satu rupiah manfaat bagi kelompok sangat kaya tidak mempunyai konsekuensi kesejahteraan yang sama dengan satu rupiah bagi rumah tangga miskin, meskipun akuntansi PDB memperlakukan transaksi tersebut secara serupa.

Langkah ketiga adalah melihat horizon waktu. Pada tahap awal, manfaat mungkin terkonsentrasi pada investor dan pekerja terampil, tetapi pendidikan, pelatihan, dan pengembangan pemasok dapat memperluas distribusi pada periode berikutnya. Jika mekanisme tersebut tidak dibangun, konsentrasi awal dapat menjadi permanen. Karena itu setiap strategi pertumbuhan memerlukan strategi difusi: bagaimana teknologi, keterampilan, pendapatan, dan kesempatan menyebar dari pusat aktivitas baru ke ekonomi yang lebih luas.

Langkah keempat adalah menjaga kompetisi dan tata kelola. Insentif investasi dapat diperlukan, tetapi konsesi eksklusif tanpa evaluasi dapat berubah menjadi rente. Transparansi kontrak, benchmark biaya, aturan konflik kepentingan, dan evaluasi berkala memperkecil risiko bahwa kebijakan industri dibajak oleh penerima manfaat yang paling terorganisasi. Negara harus cukup kuat untuk mendukung transformasi, sekaligus cukup akuntabel untuk menghentikan dukungan yang tidak menghasilkan nilai publik.

Pelajaran utama kasus ini adalah perlunya melihat pertumbuhan sebagai proses distribusi dinamis. Tujuan kebijakan bukan membuat semua kelompok menerima manfaat identik, melainkan memastikan bahwa akses terhadap peluang produktif terus meluas, biaya transisi ditangani secara adil, dan keuntungan jangka panjang bergantung pada penciptaan nilai. Dengan kerangka ini, pertanyaan 'siapa menikmati pertumbuhan?' menjadi alat evaluasi kebijakan yang konkret.

Kasus 3. Digitalisasi UMKM

Platform memperluas jangkauan pasar UMKM tetapi komisi, iklan berbayar, dan penguasaan data mengubah pembagian margin. Kasus hipotetis ini menunjukkan bahwa pertumbuhan tidak memiliki penerima manfaat tunggal. Efek pertama dapat terlihat pada output atau investasi, tetapi efek berikutnya mengalir melalui upah, harga tanah, pajak, kontrak pemasok, biaya lingkungan, dan permintaan lokal. Karena itu, evaluasi kebijakan yang berhenti pada nilai investasi atau jumlah proyek mudah melebihi manfaat yang benar-benar diterima masyarakat.

Langkah analitis pertama adalah memetakan rantai nilai dan struktur kepemilikan. Siapa memiliki aset utama, siapa memasok input, siapa memperoleh kontrak, dan dari mana pekerja berasal? Pemetaan tersebut mengungkap apakah nilai tambah berputar di wilayah dan kelompok sasaran atau cepat mengalir keluar. Kebijakan lokal content atau kemitraan hanya efektif apabila pemasok domestik mempunyai kapasitas memenuhi standar kualitas, sehingga pengembangan kemampuan harus berjalan sebelum atau bersama kewajiban penggunaan lokal.

Langkah kedua adalah membedakan manfaat bruto dari manfaat bersih. Proyek dapat menghasilkan upah dan pajak tetapi juga membutuhkan subsidi, infrastruktur publik, insentif, atau menimbulkan biaya lingkungan. Perhitungan sosial harus memasukkan biaya peluang dan distribusi. Satu rupiah manfaat bagi kelompok sangat kaya tidak mempunyai konsekuensi kesejahteraan yang sama dengan satu rupiah bagi rumah tangga miskin, meskipun akuntansi PDB memperlakukan transaksi tersebut secara serupa.

Langkah ketiga adalah melihat horizon waktu. Pada tahap awal, manfaat mungkin terkonsentrasi pada investor dan pekerja terampil, tetapi pendidikan, pelatihan, dan pengembangan pemasok dapat memperluas distribusi pada periode berikutnya. Jika mekanisme tersebut tidak dibangun, konsentrasi awal dapat menjadi permanen. Karena itu setiap strategi pertumbuhan memerlukan strategi difusi: bagaimana teknologi, keterampilan, pendapatan, dan kesempatan menyebar dari pusat aktivitas baru ke ekonomi yang lebih luas.

Langkah keempat adalah menjaga kompetisi dan tata kelola. Insentif investasi dapat diperlukan, tetapi konsesi eksklusif tanpa evaluasi dapat berubah menjadi rente. Transparansi kontrak, benchmark biaya, aturan konflik kepentingan, dan evaluasi berkala memperkecil risiko bahwa kebijakan industri dibajak oleh penerima manfaat yang paling terorganisasi. Negara harus cukup kuat untuk mendukung transformasi, sekaligus cukup akuntabel untuk menghentikan dukungan yang tidak menghasilkan nilai publik.

Pelajaran utama kasus ini adalah perlunya melihat pertumbuhan sebagai proses distribusi dinamis. Tujuan kebijakan bukan membuat semua kelompok menerima manfaat identik, melainkan memastikan bahwa akses terhadap peluang produktif terus meluas, biaya transisi ditangani secara adil, dan keuntungan jangka panjang bergantung pada penciptaan nilai. Dengan kerangka ini, pertanyaan 'siapa menikmati pertumbuhan?' menjadi alat evaluasi kebijakan yang konkret.

Kasus 4. Transportasi massal kota

Investasi transportasi meningkatkan nilai tanah di sekitar stasiun, tetapi penyewa berpendapatan rendah menghadapi kenaikan sewa. Kasus hipotetis ini menunjukkan bahwa pertumbuhan tidak memiliki penerima manfaat tunggal. Efek pertama dapat terlihat pada output atau investasi, tetapi efek berikutnya mengalir melalui upah, harga tanah, pajak, kontrak pemasok, biaya lingkungan, dan permintaan lokal.

Karena itu, evaluasi kebijakan yang berhenti pada nilai investasi atau jumlah proyek mudah melebihi manfaat yang benar-benar diterima masyarakat.

Langkah analitis pertama adalah memetakan rantai nilai dan struktur kepemilikan. Siapa memiliki aset utama, siapa memasok input, siapa memperoleh kontrak, dan dari mana pekerja berasal? Pemetaan tersebut mengungkap apakah nilai tambah berputar di wilayah dan kelompok sasaran atau cepat mengalir keluar. Kebijakan lokal content atau kemitraan hanya efektif apabila pemasok domestik mempunyai kapasitas memenuhi standar kualitas, sehingga pengembangan kemampuan harus berjalan sebelum atau bersama kewajiban penggunaan lokal.

Langkah kedua adalah membedakan manfaat bruto dari manfaat bersih. Proyek dapat menghasilkan upah dan pajak tetapi juga membutuhkan subsidi, infrastruktur publik, insentif, atau menimbulkan biaya lingkungan. Perhitungan sosial harus memasukkan biaya peluang dan distribusi. Satu rupiah manfaat bagi kelompok sangat kaya tidak mempunyai konsekuensi kesejahteraan yang sama dengan satu rupiah bagi rumah tangga miskin, meskipun akuntansi PDB memperlakukan transaksi tersebut secara serupa.

Langkah ketiga adalah melihat horizon waktu. Pada tahap awal, manfaat mungkin terkonsentrasi pada investor dan pekerja terampil, tetapi pendidikan, pelatihan, dan pengembangan pemasok dapat memperluas distribusi pada periode berikutnya. Jika mekanisme tersebut tidak dibangun, konsentrasi awal dapat menjadi permanen. Karena itu setiap strategi pertumbuhan memerlukan strategi difusi: bagaimana teknologi, keterampilan, pendapatan, dan kesempatan menyebar dari pusat aktivitas baru ke ekonomi yang lebih luas.

Langkah keempat adalah menjaga kompetisi dan tata kelola. Insentif investasi dapat diperlukan, tetapi konsesi eksklusif tanpa evaluasi dapat berubah menjadi rente. Transparansi kontrak, benchmark biaya, aturan konflik kepentingan, dan evaluasi berkala memperkecil risiko bahwa kebijakan industri dibajak oleh penerima manfaat yang paling terorganisasi. Negara harus cukup kuat untuk mendukung transformasi, sekaligus cukup akuntabel untuk menghentikan dukungan yang tidak menghasilkan nilai publik.

Pelajaran utama kasus ini adalah perlunya melihat pertumbuhan sebagai proses distribusi dinamis. Tujuan kebijakan bukan membuat semua kelompok menerima manfaat identik, melainkan memastikan bahwa akses terhadap peluang produktif terus meluas, biaya transisi ditangani secara adil, dan keuntungan jangka panjang bergantung pada penciptaan nilai. Dengan kerangka ini, pertanyaan 'siapa menikmati pertumbuhan?' menjadi alat evaluasi kebijakan yang konkret.

Kasus 5. Hilirisasi mineral

Smelter meningkatkan ekspor dan pendapatan daerah, namun kualitas lingkungan dan keterkaitan pemasok lokal menjadi isu. Kasus hipotetis ini menunjukkan bahwa pertumbuhan tidak memiliki penerima manfaat tunggal. Efek pertama dapat terlihat pada output atau investasi, tetapi efek berikutnya mengalir melalui upah, harga tanah, pajak, kontrak pemasok, biaya lingkungan, dan permintaan lokal. Karena itu, evaluasi kebijakan yang berhenti pada nilai investasi atau jumlah proyek mudah melebihi manfaat yang benar-benar diterima masyarakat.

Langkah analitis pertama adalah memetakan rantai nilai dan struktur kepemilikan. Siapa memiliki aset utama, siapa memasok input, siapa memperoleh kontrak, dan dari mana pekerja berasal? Pemetaan tersebut mengungkap apakah nilai tambah berputar di wilayah dan kelompok sasaran atau cepat mengalir keluar. Kebijakan lokal content atau kemitraan hanya efektif apabila pemasok domestik

mempunyai kapasitas memenuhi standar kualitas, sehingga pengembangan kemampuan harus berjalan sebelum atau bersama kewajiban penggunaan lokal.

Langkah kedua adalah membedakan manfaat bruto dari manfaat bersih. Proyek dapat menghasilkan upah dan pajak tetapi juga membutuhkan subsidi, infrastruktur publik, insentif, atau menimbulkan biaya lingkungan. Perhitungan sosial harus memasukkan biaya peluang dan distribusi. Satu rupiah manfaat bagi kelompok sangat kaya tidak mempunyai konsekuensi kesejahteraan yang sama dengan satu rupiah bagi rumah tangga miskin, meskipun akuntansi PDB memperlakukan transaksi tersebut secara serupa.

Langkah ketiga adalah melihat horizon waktu. Pada tahap awal, manfaat mungkin terkonsentrasi pada investor dan pekerja terampil, tetapi pendidikan, pelatihan, dan pengembangan pemasok dapat memperluas distribusi pada periode berikutnya. Jika mekanisme tersebut tidak dibangun, konsentrasi awal dapat menjadi permanen. Karena itu setiap strategi pertumbuhan memerlukan strategi difusi: bagaimana teknologi, keterampilan, pendapatan, dan kesempatan menyebar dari pusat aktivitas baru ke ekonomi yang lebih luas.

Langkah keempat adalah menjaga kompetisi dan tata kelola. Insentif investasi dapat diperlukan, tetapi konsesi eksklusif tanpa evaluasi dapat berubah menjadi rente. Transparansi kontrak, benchmark biaya, aturan konflik kepentingan, dan evaluasi berkala memperkecil risiko bahwa kebijakan industri dibajak oleh penerima manfaat yang paling terorganisasi. Negara harus cukup kuat untuk mendukung transformasi, sekaligus cukup akuntabel untuk menghentikan dukungan yang tidak menghasilkan nilai publik.

Pelajaran utama kasus ini adalah perlunya melihat pertumbuhan sebagai proses distribusi dinamis. Tujuan kebijakan bukan membuat semua kelompok menerima manfaat identik, melainkan memastikan bahwa akses terhadap peluang produktif terus meluas, biaya transisi ditangani secara adil, dan keuntungan jangka panjang bergantung pada penciptaan nilai. Dengan kerangka ini, pertanyaan 'siapa menikmati pertumbuhan?' menjadi alat evaluasi kebijakan yang konkret.

Kasus 6. Subsidi energi

Harga energi ditahan untuk melindungi daya beli, tetapi konsumsi kelompok berpendapatan tinggi memperoleh manfaat nominal besar. Kasus hipotetis ini menunjukkan bahwa pertumbuhan tidak memiliki penerima manfaat tunggal. Efek pertama dapat terlihat pada output atau investasi, tetapi efek berikutnya mengalir melalui upah, harga tanah, pajak, kontrak pemasok, biaya lingkungan, dan permintaan lokal. Karena itu, evaluasi kebijakan yang berhenti pada nilai investasi atau jumlah proyek mudah melebihkan manfaat yang benar-benar diterima masyarakat.

Langkah analitis pertama adalah memetakan rantai nilai dan struktur kepemilikan. Siapa memiliki aset utama, siapa memasok input, siapa memperoleh kontrak, dan dari mana pekerja berasal? Pemetaan tersebut mengungkap apakah nilai tambah berputar di wilayah dan kelompok sasaran atau cepat mengalir keluar. Kebijakan lokal content atau kemitraan hanya efektif apabila pemasok domestik mempunyai kapasitas memenuhi standar kualitas, sehingga pengembangan kemampuan harus berjalan sebelum atau bersama kewajiban penggunaan lokal.

Langkah kedua adalah membedakan manfaat bruto dari manfaat bersih. Proyek dapat menghasilkan upah dan pajak tetapi juga membutuhkan subsidi, infrastruktur publik, insentif, atau menimbulkan biaya lingkungan. Perhitungan sosial harus memasukkan biaya peluang dan distribusi. Satu rupiah manfaat

bagi kelompok sangat kaya tidak mempunyai konsekuensi kesejahteraan yang sama dengan satu rupiah bagi rumah tangga miskin, meskipun akuntansi PDB memperlakukan transaksi tersebut secara serupa.

Langkah ketiga adalah melihat horizon waktu. Pada tahap awal, manfaat mungkin terkonsentrasi pada investor dan pekerja terampil, tetapi pendidikan, pelatihan, dan pengembangan pemasok dapat memperluas distribusi pada periode berikutnya. Jika mekanisme tersebut tidak dibangun, konsentrasi awal dapat menjadi permanen. Karena itu setiap strategi pertumbuhan memerlukan strategi difusi: bagaimana teknologi, keterampilan, pendapatan, dan kesempatan menyebar dari pusat aktivitas baru ke ekonomi yang lebih luas.

Langkah keempat adalah menjaga kompetisi dan tata kelola. Insentif investasi dapat diperlukan, tetapi konsesi eksklusif tanpa evaluasi dapat berubah menjadi rente. Transparansi kontrak, benchmark biaya, aturan konflik kepentingan, dan evaluasi berkala memperkecil risiko bahwa kebijakan industri dibajak oleh penerima manfaat yang paling terorganisasi. Negara harus cukup kuat untuk mendukung transformasi, sekaligus cukup akuntabel untuk menghentikan dukungan yang tidak menghasilkan nilai publik.

Pelajaran utama kasus ini adalah perlunya melihat pertumbuhan sebagai proses distribusi dinamis. Tujuan kebijakan bukan membuat semua kelompok menerima manfaat identik, melainkan memastikan bahwa akses terhadap peluang produktif terus meluas, biaya transisi ditangani secara adil, dan keuntungan jangka panjang bergantung pada penciptaan nilai. Dengan kerangka ini, pertanyaan 'siapa menikmati pertumbuhan?' menjadi alat evaluasi kebijakan yang konkret.

Kasus 7. AI di perusahaan jasa

AI meningkatkan output pekerja terampil, sementara sebagian pekerjaan rutin berkurang atau berubah. Kasus hipotetis ini menunjukkan bahwa pertumbuhan tidak memiliki penerima manfaat tunggal. Efek pertama dapat terlihat pada output atau investasi, tetapi efek berikutnya mengalir melalui upah, harga tanah, pajak, kontrak pemasok, biaya lingkungan, dan permintaan lokal. Karena itu, evaluasi kebijakan yang berhenti pada nilai investasi atau jumlah proyek mudah melebihi manfaat yang benar-benar diterima masyarakat.

Langkah analitis pertama adalah memetakan rantai nilai dan struktur kepemilikan. Siapa memiliki aset utama, siapa memasok input, siapa memperoleh kontrak, dan dari mana pekerja berasal? Pemetaan tersebut mengungkap apakah nilai tambah berputar di wilayah dan kelompok sasaran atau cepat mengalir keluar. Kebijakan lokal content atau kemitraan hanya efektif apabila pemasok domestik mempunyai kapasitas memenuhi standar kualitas, sehingga pengembangan kemampuan harus berjalan sebelum atau bersama kewajiban penggunaan lokal.

Langkah kedua adalah membedakan manfaat bruto dari manfaat bersih. Proyek dapat menghasilkan upah dan pajak tetapi juga membutuhkan subsidi, infrastruktur publik, insentif, atau menimbulkan biaya lingkungan. Perhitungan sosial harus memasukkan biaya peluang dan distribusi. Satu rupiah manfaat bagi kelompok sangat kaya tidak mempunyai konsekuensi kesejahteraan yang sama dengan satu rupiah bagi rumah tangga miskin, meskipun akuntansi PDB memperlakukan transaksi tersebut secara serupa.

Langkah ketiga adalah melihat horizon waktu. Pada tahap awal, manfaat mungkin terkonsentrasi pada investor dan pekerja terampil, tetapi pendidikan, pelatihan, dan pengembangan pemasok dapat memperluas distribusi pada periode berikutnya. Jika mekanisme tersebut tidak dibangun, konsentrasi awal dapat menjadi permanen. Karena itu setiap strategi pertumbuhan memerlukan strategi difusi:

bagaimana teknologi, keterampilan, pendapatan, dan kesempatan menyebar dari pusat aktivitas baru ke ekonomi yang lebih luas.

Langkah keempat adalah menjaga kompetisi dan tata kelola. Insentif investasi dapat diperlukan, tetapi konsesi eksklusif tanpa evaluasi dapat berubah menjadi rente. Transparansi kontrak, benchmark biaya, aturan konflik kepentingan, dan evaluasi berkala memperkecil risiko bahwa kebijakan industri dibajak oleh penerima manfaat yang paling terorganisasi. Negara harus cukup kuat untuk mendukung transformasi, sekaligus cukup akuntabel untuk menghentikan dukungan yang tidak menghasilkan nilai publik.

Pelajaran utama kasus ini adalah perlunya melihat pertumbuhan sebagai proses distribusi dinamis. Tujuan kebijakan bukan membuat semua kelompok menerima manfaat identik, melainkan memastikan bahwa akses terhadap peluang produktif terus meluas, biaya transisi ditangani secara adil, dan keuntungan jangka panjang bergantung pada penciptaan nilai. Dengan kerangka ini, pertanyaan 'siapa menikmati pertumbuhan?' menjadi alat evaluasi kebijakan yang konkret.

Kasus 8. Kredit murah untuk usaha

Program kredit memperluas pembiayaan, tetapi pelaku paling mikro tetap terkendala dokumen, data, dan kemampuan manajemen. Kasus hipotetis ini menunjukkan bahwa pertumbuhan tidak memiliki penerima manfaat tunggal. Efek pertama dapat terlihat pada output atau investasi, tetapi efek berikutnya mengalir melalui upah, harga tanah, pajak, kontrak pemasok, biaya lingkungan, dan permintaan lokal. Karena itu, evaluasi kebijakan yang berhenti pada nilai investasi atau jumlah proyek mudah melebihi manfaat yang benar-benar diterima masyarakat.

Langkah analitis pertama adalah memetakan rantai nilai dan struktur kepemilikan. Siapa memiliki aset utama, siapa memasok input, siapa memperoleh kontrak, dan dari mana pekerja berasal? Pemetaan tersebut mengungkap apakah nilai tambah berputar di wilayah dan kelompok sasaran atau cepat mengalir keluar. Kebijakan lokal content atau kemitraan hanya efektif apabila pemasok domestik mempunyai kapasitas memenuhi standar kualitas, sehingga pengembangan kemampuan harus berjalan sebelum atau bersama kewajiban penggunaan lokal.

Langkah kedua adalah membedakan manfaat bruto dari manfaat bersih. Proyek dapat menghasilkan upah dan pajak tetapi juga membutuhkan subsidi, infrastruktur publik, insentif, atau menimbulkan biaya lingkungan. Perhitungan sosial harus memasukkan biaya peluang dan distribusi. Satu rupiah manfaat bagi kelompok sangat kaya tidak mempunyai konsekuensi kesejahteraan yang sama dengan satu rupiah bagi rumah tangga miskin, meskipun akuntansi PDB memperlakukan transaksi tersebut secara serupa.

Langkah ketiga adalah melihat horizon waktu. Pada tahap awal, manfaat mungkin terkonsentrasi pada investor dan pekerja terampil, tetapi pendidikan, pelatihan, dan pengembangan pemasok dapat memperluas distribusi pada periode berikutnya. Jika mekanisme tersebut tidak dibangun, konsentrasi awal dapat menjadi permanen. Karena itu setiap strategi pertumbuhan memerlukan strategi difusi: bagaimana teknologi, keterampilan, pendapatan, dan kesempatan menyebar dari pusat aktivitas baru ke ekonomi yang lebih luas.

Langkah keempat adalah menjaga kompetisi dan tata kelola. Insentif investasi dapat diperlukan, tetapi konsesi eksklusif tanpa evaluasi dapat berubah menjadi rente. Transparansi kontrak, benchmark biaya, aturan konflik kepentingan, dan evaluasi berkala memperkecil risiko bahwa kebijakan industri dibajak oleh penerima manfaat yang paling terorganisasi. Negara harus cukup kuat untuk mendukung

transformasi, sekaligus cukup akuntabel untuk menghentikan dukungan yang tidak menghasilkan nilai publik.

Pelajaran utama kasus ini adalah perlunya melihat pertumbuhan sebagai proses distribusi dinamis. Tujuan kebijakan bukan membuat semua kelompok menerima manfaat identik, melainkan memastikan bahwa akses terhadap peluang produktif terus meluas, biaya transisi ditangani secara adil, dan keuntungan jangka panjang bergantung pada penciptaan nilai. Dengan kerangka ini, pertanyaan 'siapa menikmati pertumbuhan?' menjadi alat evaluasi kebijakan yang konkret.

Kasus 9. Pembangunan pariwisata

Kunjungan wisata naik, tetapi kepemilikan hotel, tanah, dan rantai pasok menentukan berapa banyak pendapatan tinggal di masyarakat lokal. Kasus hipotetis ini menunjukkan bahwa pertumbuhan tidak memiliki penerima manfaat tunggal. Efek pertama dapat terlihat pada output atau investasi, tetapi efek berikutnya mengalir melalui upah, harga tanah, pajak, kontrak pemasok, biaya lingkungan, dan permintaan lokal. Karena itu, evaluasi kebijakan yang berhenti pada nilai investasi atau jumlah proyek mudah melebihkan manfaat yang benar-benar diterima masyarakat.

Langkah analitis pertama adalah memetakan rantai nilai dan struktur kepemilikan. Siapa memiliki aset utama, siapa memasok input, siapa memperoleh kontrak, dan dari mana pekerja berasal? Pemetaan tersebut mengungkap apakah nilai tambah berputar di wilayah dan kelompok sasaran atau cepat mengalir keluar. Kebijakan lokal content atau kemitraan hanya efektif apabila pemasok domestik mempunyai kapasitas memenuhi standar kualitas, sehingga pengembangan kemampuan harus berjalan sebelum atau bersama kewajiban penggunaan lokal.

Langkah kedua adalah membedakan manfaat bruto dari manfaat bersih. Proyek dapat menghasilkan upah dan pajak tetapi juga membutuhkan subsidi, infrastruktur publik, insentif, atau menimbulkan biaya lingkungan. Perhitungan sosial harus memasukkan biaya peluang dan distribusi. Satu rupiah manfaat bagi kelompok sangat kaya tidak mempunyai konsekuensi kesejahteraan yang sama dengan satu rupiah bagi rumah tangga miskin, meskipun akuntansi PDB memperlakukan transaksi tersebut secara serupa.

Langkah ketiga adalah melihat horizon waktu. Pada tahap awal, manfaat mungkin terkonsentrasi pada investor dan pekerja terampil, tetapi pendidikan, pelatihan, dan pengembangan pemasok dapat memperluas distribusi pada periode berikutnya. Jika mekanisme tersebut tidak dibangun, konsentrasi awal dapat menjadi permanen. Karena itu setiap strategi pertumbuhan memerlukan strategi difusi: bagaimana teknologi, keterampilan, pendapatan, dan kesempatan menyebar dari pusat aktivitas baru ke ekonomi yang lebih luas.

Langkah keempat adalah menjaga kompetisi dan tata kelola. Insentif investasi dapat diperlukan, tetapi konsesi eksklusif tanpa evaluasi dapat berubah menjadi rente. Transparansi kontrak, benchmark biaya, aturan konflik kepentingan, dan evaluasi berkala memperkecil risiko bahwa kebijakan industri dibajak oleh penerima manfaat yang paling terorganisasi. Negara harus cukup kuat untuk mendukung transformasi, sekaligus cukup akuntabel untuk menghentikan dukungan yang tidak menghasilkan nilai publik.

Pelajaran utama kasus ini adalah perlunya melihat pertumbuhan sebagai proses distribusi dinamis. Tujuan kebijakan bukan membuat semua kelompok menerima manfaat identik, melainkan memastikan bahwa akses terhadap peluang produktif terus meluas, biaya transisi ditangani secara adil, dan

keuntungan jangka panjang bergantung pada penciptaan nilai. Dengan kerangka ini, pertanyaan 'siapa menikmati pertumbuhan?' menjadi alat evaluasi kebijakan yang konkret.

Kasus 10. Reformasi pajak properti

Pajak berbasis nilai tanah dapat memperkuat pendapatan daerah namun membutuhkan perlindungan bagi pemilik berpendapatan rendah yang asetnya naik nilainya. Kasus hipotetis ini menunjukkan bahwa pertumbuhan tidak memiliki penerima manfaat tunggal. Efek pertama dapat terlihat pada output atau investasi, tetapi efek berikutnya mengalir melalui upah, harga tanah, pajak, kontrak pemasok, biaya lingkungan, dan permintaan lokal. Karena itu, evaluasi kebijakan yang berhenti pada nilai investasi atau jumlah proyek mudah melebihi manfaat yang benar-benar diterima masyarakat.

Langkah analitis pertama adalah memetakan rantai nilai dan struktur kepemilikan. Siapa memiliki aset utama, siapa memasok input, siapa memperoleh kontrak, dan dari mana pekerja berasal? Pemetaan tersebut mengungkap apakah nilai tambah berputar di wilayah dan kelompok sasaran atau cepat mengalir keluar. Kebijakan lokal content atau kemitraan hanya efektif apabila pemasok domestik mempunyai kapasitas memenuhi standar kualitas, sehingga pengembangan kemampuan harus berjalan sebelum atau bersama kewajiban penggunaan lokal.

Langkah kedua adalah membedakan manfaat bruto dari manfaat bersih. Proyek dapat menghasilkan upah dan pajak tetapi juga membutuhkan subsidi, infrastruktur publik, insentif, atau menimbulkan biaya lingkungan. Perhitungan sosial harus memasukkan biaya peluang dan distribusi. Satu rupiah manfaat bagi kelompok sangat kaya tidak mempunyai konsekuensi kesejahteraan yang sama dengan satu rupiah bagi rumah tangga miskin, meskipun akuntansi PDB memperlakukan transaksi tersebut secara serupa.

Langkah ketiga adalah melihat horizon waktu. Pada tahap awal, manfaat mungkin terkonsentrasi pada investor dan pekerja terampil, tetapi pendidikan, pelatihan, dan pengembangan pemasok dapat memperluas distribusi pada periode berikutnya. Jika mekanisme tersebut tidak dibangun, konsentrasi awal dapat menjadi permanen. Karena itu setiap strategi pertumbuhan memerlukan strategi difusi: bagaimana teknologi, keterampilan, pendapatan, dan kesempatan menyebar dari pusat aktivitas baru ke ekonomi yang lebih luas.

Langkah keempat adalah menjaga kompetisi dan tata kelola. Insentif investasi dapat diperlukan, tetapi konsesi eksklusif tanpa evaluasi dapat berubah menjadi rente. Transparansi kontrak, benchmark biaya, aturan konflik kepentingan, dan evaluasi berkala memperkecil risiko bahwa kebijakan industri dibajak oleh penerima manfaat yang paling terorganisasi. Negara harus cukup kuat untuk mendukung transformasi, sekaligus cukup akuntabel untuk menghentikan dukungan yang tidak menghasilkan nilai publik.

Pelajaran utama kasus ini adalah perlunya melihat pertumbuhan sebagai proses distribusi dinamis. Tujuan kebijakan bukan membuat semua kelompok menerima manfaat identik, melainkan memastikan bahwa akses terhadap peluang produktif terus meluas, biaya transisi ditangani secara adil, dan keuntungan jangka panjang bergantung pada penciptaan nilai. Dengan kerangka ini, pertanyaan 'siapa menikmati pertumbuhan?' menjadi alat evaluasi kebijakan yang konkret.

Kasus 11. Perlindungan sosial adaptif

Guncangan ekonomi memicu perluasan bantuan, tetapi basis data harus mampu menemukan rumah tangga yang baru jatuh rentan. Kasus hipotetis ini menunjukkan bahwa pertumbuhan tidak memiliki

penerima manfaat tunggal. Efek pertama dapat terlihat pada output atau investasi, tetapi efek berikutnya mengalir melalui upah, harga tanah, pajak, kontrak pemasok, biaya lingkungan, dan permintaan lokal. Karena itu, evaluasi kebijakan yang berhenti pada nilai investasi atau jumlah proyek mudah melebihi manfaat yang benar-benar diterima masyarakat.

Langkah analitis pertama adalah memetakan rantai nilai dan struktur kepemilikan. Siapa memiliki aset utama, siapa memasok input, siapa memperoleh kontrak, dan dari mana pekerja berasal? Pemetaan tersebut mengungkap apakah nilai tambah berputar di wilayah dan kelompok sasaran atau cepat mengalir keluar. Kebijakan lokal content atau kemitraan hanya efektif apabila pemasok domestik mempunyai kapasitas memenuhi standar kualitas, sehingga pengembangan kemampuan harus berjalan sebelum atau bersama kewajiban penggunaan lokal.

Langkah kedua adalah membedakan manfaat bruto dari manfaat bersih. Proyek dapat menghasilkan upah dan pajak tetapi juga membutuhkan subsidi, infrastruktur publik, insentif, atau menimbulkan biaya lingkungan. Perhitungan sosial harus memasukkan biaya peluang dan distribusi. Satu rupiah manfaat bagi kelompok sangat kaya tidak mempunyai konsekuensi kesejahteraan yang sama dengan satu rupiah bagi rumah tangga miskin, meskipun akuntansi PDB memperlakukan transaksi tersebut secara serupa.

Langkah ketiga adalah melihat horizon waktu. Pada tahap awal, manfaat mungkin terkonsentrasi pada investor dan pekerja terampil, tetapi pendidikan, pelatihan, dan pengembangan pemasok dapat memperluas distribusi pada periode berikutnya. Jika mekanisme tersebut tidak dibangun, konsentrasi awal dapat menjadi permanen. Karena itu setiap strategi pertumbuhan memerlukan strategi difusi: bagaimana teknologi, keterampilan, pendapatan, dan kesempatan menyebar dari pusat aktivitas baru ke ekonomi yang lebih luas.

Langkah keempat adalah menjaga kompetisi dan tata kelola. Insentif investasi dapat diperlukan, tetapi konsesi eksklusif tanpa evaluasi dapat berubah menjadi rente. Transparansi kontrak, benchmark biaya, aturan konflik kepentingan, dan evaluasi berkala memperkecil risiko bahwa kebijakan industri dibajak oleh penerima manfaat yang paling terorganisasi. Negara harus cukup kuat untuk mendukung transformasi, sekaligus cukup akuntabel untuk menghentikan dukungan yang tidak menghasilkan nilai publik.

Pelajaran utama kasus ini adalah perlunya melihat pertumbuhan sebagai proses distribusi dinamis. Tujuan kebijakan bukan membuat semua kelompok menerima manfaat identik, melainkan memastikan bahwa akses terhadap peluang produktif terus meluas, biaya transisi ditangani secara adil, dan keuntungan jangka panjang bergantung pada penciptaan nilai. Dengan kerangka ini, pertanyaan 'siapa menikmati pertumbuhan?' menjadi alat evaluasi kebijakan yang konkret.

Kasus 12. Universitas dan pusat inovasi daerah

Kampus dapat menjadi mesin ekonomi lokal jika riset, talenta, bisnis, pemerintah daerah, dan pembiayaan inovasi terhubung. Kasus hipotetis ini menunjukkan bahwa pertumbuhan tidak memiliki penerima manfaat tunggal. Efek pertama dapat terlihat pada output atau investasi, tetapi efek berikutnya mengalir melalui upah, harga tanah, pajak, kontrak pemasok, biaya lingkungan, dan permintaan lokal. Karena itu, evaluasi kebijakan yang berhenti pada nilai investasi atau jumlah proyek mudah melebihi manfaat yang benar-benar diterima masyarakat.

Langkah analitis pertama adalah memetakan rantai nilai dan struktur kepemilikan. Siapa memiliki aset utama, siapa memasok input, siapa memperoleh kontrak, dan dari mana pekerja berasal? Pemetaan

tersebut mengungkap apakah nilai tambah berputar di wilayah dan kelompok sasaran atau cepat mengalir keluar. Kebijakan lokal content atau kemitraan hanya efektif apabila pemasok domestik mempunyai kapasitas memenuhi standar kualitas, sehingga pengembangan kemampuan harus berjalan sebelum atau bersama kewajiban penggunaan lokal.

Langkah kedua adalah membedakan manfaat bruto dari manfaat bersih. Proyek dapat menghasilkan upah dan pajak tetapi juga membutuhkan subsidi, infrastruktur publik, insentif, atau menimbulkan biaya lingkungan. Perhitungan sosial harus memasukkan biaya peluang dan distribusi. Satu rupiah manfaat bagi kelompok sangat kaya tidak mempunyai konsekuensi kesejahteraan yang sama dengan satu rupiah bagi rumah tangga miskin, meskipun akuntansi PDB memperlakukan transaksi tersebut secara serupa.

Langkah ketiga adalah melihat horizon waktu. Pada tahap awal, manfaat mungkin terkonsentrasi pada investor dan pekerja terampil, tetapi pendidikan, pelatihan, dan pengembangan pemasok dapat memperluas distribusi pada periode berikutnya. Jika mekanisme tersebut tidak dibangun, konsentrasi awal dapat menjadi permanen. Karena itu setiap strategi pertumbuhan memerlukan strategi difusi: bagaimana teknologi, keterampilan, pendapatan, dan kesempatan menyebar dari pusat aktivitas baru ke ekonomi yang lebih luas.

Langkah keempat adalah menjaga kompetisi dan tata kelola. Insentif investasi dapat diperlukan, tetapi konsesi eksklusif tanpa evaluasi dapat berubah menjadi rente. Transparansi kontrak, benchmark biaya, aturan konflik kepentingan, dan evaluasi berkala memperkecil risiko bahwa kebijakan industri dibajak oleh penerima manfaat yang paling terorganisasi. Negara harus cukup kuat untuk mendukung transformasi, sekaligus cukup akuntabel untuk menghentikan dukungan yang tidak menghasilkan nilai publik.

Pelajaran utama kasus ini adalah perlunya melihat pertumbuhan sebagai proses distribusi dinamis. Tujuan kebijakan bukan membuat semua kelompok menerima manfaat identik, melainkan memastikan bahwa akses terhadap peluang produktif terus meluas, biaya transisi ditangani secara adil, dan keuntungan jangka panjang bergantung pada penciptaan nilai. Dengan kerangka ini, pertanyaan 'siapa menikmati pertumbuhan?' menjadi alat evaluasi kebijakan yang konkret.

Glossarium

Asset inequality — Ketimpangan dalam kepemilikan aset seperti tanah, rumah, usaha, dan aset finansial.

Capability approach — Pendekatan yang menilai pembangunan dari kemampuan nyata manusia menjalani kehidupan yang bernilai.

Capital gains — Keuntungan dari kenaikan nilai aset.

Decent work — Pekerjaan yang produktif, aman, memberikan penghasilan layak, perlindungan, dan hak kerja.

Distribusi fungsional pendapatan — Pembagian pendapatan nasional antara tenaga kerja, modal, tanah, dan bentuk pendapatan produksi lainnya.

Expenditure share — Porsi pengeluaran suatu kelompok penduduk terhadap total pengeluaran.

Financial inclusion — Akses dan penggunaan layanan keuangan formal yang sesuai kebutuhan dan terjangkau.

Gini Ratio — Indikator ketimpangan distribusi dengan nilai 0 berarti pemerataan sempurna dan 1 ketimpangan maksimum.

Growth incidence — Pola bagaimana manfaat pertumbuhan tersebar di antara kelompok pendapatan.

Informalitas — Kegiatan kerja atau usaha yang tidak sepenuhnya tercakup aturan formal dan perlindungan sosial.

Labor share — Bagian pendapatan nasional yang diterima tenaga kerja.

Mobilitas sosial — Perubahan posisi sosial-ekonomi individu atau rumah tangga sepanjang waktu atau antargenerasi.

Near poor — Penduduk yang berada sedikit di atas garis kemiskinan dan mudah jatuh miskin saat terkena guncangan.

Predistribution — Kebijakan yang memengaruhi distribusi pendapatan sebelum pajak dan transfer, misalnya pendidikan, kompetisi, dan aturan pasar kerja.

Progressive taxation — Sistem pajak di mana beban relatif meningkat seiring kemampuan membayar.

Regulatory capture — Kondisi ketika regulasi lebih mencerminkan kepentingan pihak yang diatur daripada kepentingan publik.

Rent seeking — Upaya mendapatkan keuntungan melalui privilese, lisensi, monopoli, atau pengaruh politik tanpa penciptaan nilai sepadan.

Social protection — Kebijakan untuk melindungi masyarakat dari kemiskinan dan risiko ekonomi melalui bantuan, asuransi, dan jaminan sosial.

Spillover — Dampak tidak langsung suatu kegiatan ekonomi terhadap pihak lain, seperti transfer teknologi atau pembentukan pemasok.

Wealth inequality — Ketimpangan dalam nilai kekayaan bersih yang dimiliki rumah tangga atau individu.

Daftar Pustaka

- Acemoglu, D., & Robinson, J. A. (2012). *Why nations fail: The origins of power, prosperity, and poverty*. Crown.
- Alesina, A., & Rodrik, D. (1994). Distributive politics and economic growth. *Quarterly Journal of Economics*, 109(2), 465–490. <https://doi.org/10.2307/2118470>
- Atkinson, A. B. (2015). *Inequality: What can be done?* Harvard University Press. <https://doi.org/10.4159/9780674287013>
- Badan Pusat Statistik. (2026a). *Ekonomi Indonesia triwulan II-2026 tumbuh 5,29 persen (y-on-y)*. BPS.
- Badan Pusat Statistik. (2026b). *Gini ratio Maret 2026 tercatat sebesar 0,368*. BPS.

- Badan Pusat Statistik. (2026c). Persentase penduduk miskin Maret 2026 turun menjadi 8,07 persen. BPS.
- Badan Pusat Statistik. (2026d). Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 4,65 persen; rata-rata upah buruh sebesar 3,39 juta rupiah. BPS.
- Bourguignon, F. (2004). The poverty-growth-inequality triangle. Indian Council for Research on International Economic Relations.
- Chetty, R., Hendren, N., Kline, P., & Saez, E. (2014). Where is the land of opportunity? The geography of intergenerational mobility in the United States. *Quarterly Journal of Economics*, 129(4), 1553–1623. <https://doi.org/10.1093/qje/qju022>
- Deaton, A. (2013). The great escape: Health, wealth, and the origins of inequality. Princeton University Press. <https://doi.org/10.1515/9781400847969>
- Fields, G. S. (2001). *Distribution and development: A new look at the developing world*. MIT Press.
- Kuznets, S. (1955). Economic growth and income inequality. *American Economic Review*, 45(1), 1–28.
- Lustig, N. (2018). *Commitment to equity handbook: Estimating the impact of fiscal policy on inequality and poverty*. Brookings Institution Press.
- Milanovic, B. (2016). *Global inequality: A new approach for the age of globalization*. Harvard University Press. <https://doi.org/10.4159/9780674969797>
- North, D. C. (1990). *Institutions, institutional change and economic performance*. Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/CBO9780511808678>
- Ostry, J. D., Berg, A., & Tsangarides, C. G. (2014). Redistribution, inequality, and growth. IMF Staff Discussion Note 14/02. <https://doi.org/10.5089/9781484352076.006>
- Piketty, T. (2014). *Capital in the twenty-first century*. Harvard University Press. <https://doi.org/10.4159/9780674369542>
- Ravallion, M. (2001). Growth, inequality and poverty: Looking beyond averages. *World Development*, 29(11), 1803–1815. [https://doi.org/10.1016/S0305-750X\(01\)00072-9](https://doi.org/10.1016/S0305-750X(01)00072-9)
- Rodrik, D. (2011). *The globalization paradox: Democracy and the future of the world economy*. W. W. Norton.
- Sen, A. (1999). *Development as freedom*. Alfred A. Knopf.
- Stiglitz, J. E. (2012). *The price of inequality*. W. W. Norton.
- World Bank. (2016). *Indonesia's rising divide*. World Bank.
- World Bank. (2020). *Aspiring Indonesia: Expanding the middle class*. World Bank. <https://doi.org/10.1596/33237>
- World Bank. (2024). *Poverty, prosperity, and planet report 2024: Pathways out of the polycrisis*. World Bank. <https://doi.org/10.1596/978-1-4648-2123-3>

Catatan Penutup: Pertumbuhan sebagai Kontrak Sosial

Pertumbuhan ekonomi pada akhirnya bukan hanya proses teknis peningkatan produksi, melainkan bagian dari kontrak sosial antara negara, pasar, dan masyarakat. Masyarakat menerima perubahan, kompetisi, inovasi, dan bahkan sebagian biaya penyesuaian ketika terdapat keyakinan bahwa aturan berlaku cukup adil dan bahwa kesempatan untuk maju tersedia secara nyata. Kepercayaan tersebut tidak dapat dibangun hanya melalui komunikasi. Ia harus dibuktikan melalui pengalaman: pekerjaan yang membaik, sekolah yang berkualitas, layanan kesehatan yang dapat diakses, transportasi yang efisien, lingkungan yang sehat, serta sistem hukum yang tidak membedakan warga berdasarkan kekuatan ekonomi atau hubungan politik.

Dalam pengertian ini, pertanyaan siapa menikmati pertumbuhan mempunyai fungsi diagnostik. Pertanyaan tersebut memaksa pemerintah dan masyarakat melihat di balik indikator rata-rata, memeriksa rantai distribusi nilai tambah, serta mengidentifikasi hambatan yang membuat kelompok tertentu berulang kali tertinggal. Jika manfaat hanya terkonsentrasi pada pemilik aset, pusat-pusat metropolitan, atau perusahaan yang telah mapan, maka respons yang diperlukan bukan menghentikan pertumbuhan, melainkan memperluas pintu masuk menuju produktivitas: pendidikan bermutu, akses modal, persaingan sehat, infrastruktur, teknologi, perlindungan sosial, dan institusi yang dapat dipercaya.

Indonesia memiliki peluang besar karena skala pasar domestik, populasi usia kerja, kekayaan sumber daya, posisi geografis, dan perkembangan ekonomi digital dapat menjadi sumber pertumbuhan jangka panjang. Namun skala saja tidak menjamin kemakmuran yang luas. Kunci berikutnya adalah difusi: bagaimana teknologi menyebar dari perusahaan terdepan ke perusahaan lain, bagaimana investasi besar menciptakan pemasok lokal, bagaimana kota-kota utama terhubung dengan daerah hinterland, dan bagaimana peningkatan penerimaan negara diubah menjadi layanan yang memperbesar kemampuan produktif warga. Difusi inilah yang mengubah pertumbuhan sektoral menjadi transformasi nasional.

Karena itu, agenda pembangunan Indonesia perlu menggabungkan tiga prinsip. Pertama, memperbesar penciptaan nilai melalui produktivitas, inovasi, dan investasi. Kedua, memperluas partisipasi sehingga pekerja, UMKM, daerah, perempuan, pemuda, dan kelompok rentan mempunyai akses nyata terhadap peluang produktif. Ketiga, memperkuat institusi distribusi dan koreksi melalui pajak yang adil, perlindungan sosial, pelayanan publik, persaingan, dan rule of law. Ketiga prinsip tersebut tidak saling menggantikan. Pertumbuhan tanpa distribusi dapat kehilangan legitimasi, sedangkan distribusi tanpa produktivitas akan menghadapi keterbatasan sumber daya.

Ukuran keberhasilan akhirnya harus kembali pada kehidupan manusia. Pertumbuhan yang bermakna memungkinkan keluarga merencanakan masa depan tanpa kecemasan berlebihan, pekerja melihat jalur peningkatan keterampilan dan pendapatan, wirausaha kecil mempunyai kesempatan tumbuh, petani dan nelayan memperoleh posisi tawar yang lebih kuat, serta generasi muda percaya bahwa pendidikan dan kerja keras dapat mengubah nasib. Ketika kondisi tersebut semakin luas, pertanyaan 'siapa menikmati pertumbuhan?' memperoleh jawaban yang lebih memuaskan: bukan hanya sebagian kecil masyarakat, melainkan semakin banyak warga Indonesia sebagai pelaku sekaligus penerima manfaat pembangunan.